



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2019



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
Jl. Pemuda No. 249 Telp. 0272-321046 Fax. 322567
Teleks 325637 Klaten 57424

Kata Pengantar



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2019 disusun sebagai suatu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Klaten untuk mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemdayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. **Maksud dan tujuan Penyusunan LKjIP adalah untuk:** (a) meningkatkan akuntabilitas Kinerja OPD, (b) sebagai umpan balik peningkatan kinerja instansi pemerintah, (c) mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab instansi, (d) mendorong OPD untuk melaksanakan tata penyelenggaraan pemerintahan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, dan (e) menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat berjalan secara efisien dan efektif, serta responsif terhadap issue yang berkembang.

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten beserta analisis dan evaluasi sangat penting sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi secara terus menerus guna menjamin berkelanjutan tata penyelenggaraan pemerintah diukur dari pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, serta untuk mewujudkan: ***Masyarakat Kabupaten Klaten Maju, Mandiri dan Berdaya Saing.***

Klaten, 17 Maret 2020



BUPATI KLATEN,

SRI MULYANI



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

INSPEKTORAT

Jalan Mayor Kusmanto No.23 Telp. 321040 Kode Pos 57415
K L A T E N

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah untuk Tahun Anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

INSPEKTUR KABUPATEN KLATEN

INSPEKTORAT
JAJANG PRIHONO, S.STP
Pembina
NIP. 19810216 199912 1 001

Eksekutif Summary

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2019 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja, di mana Laporan kinerja instansi pemerintah merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban atas kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Memedomani sebagaimana ketentuan di atas, serta memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 ditetapkan 45 (empat puluh lima) sasaran strategis dengan 67 (enam puluh tujuh) Indikator Kinerja Sasaran yang terdiri dari: 60 (enam puluh) indikator yang sifatnya progresif, dan 7 (tujuh) indikator yang sifatnya regresif.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 45 (empat puluh lima) sasaran strategis dengan 67 (enam puluh tujuh) Indikator Kinerja Sasaran yang terdiri dari: 60 (enam puluh) indikator yang sifatnya progresif, dan 7 (tujuh) indikator yang sifatnya regresif. Dari masing-masing indikator diperoleh hasil:

A. Indikator Progresif, dengan hasil:

- a. Sebanyak 49 (empat puluh sembilan) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 81,67% dengan Kriteria ***Sangat Tinggi***;
- b. Sebanyak 5 (lima) atau sebanyak 8,33% dengan Kriteria ***Tinggi***;
- c. Sebanyak 2 (dua) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 3,33% dengan kriteria ***Sedang***;
- d. Sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 1,67% dengan Kriteria ***Rendah***; dan
- e. Sebanyak 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 5,00% dengan Kriteria ***Sangat Rendah***.

Adapun perincian atas hasil pengukuran kinerja, sebagai berikut:

- a. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria ***Sangat Tinggi*** (atau interval nilai realisasi kinerja $\geq 90,1$) sebanyak 49 (*empat puluh sembilan*) indikator atau 81,67%, diantaranya:
 1. Prosentase Sekolah Dasar yang Memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
 2. Prosentase Sekolah Menengah Pertama yang Memenuhi Standar Nasional;
 3. Usia Harapan Hidup;

4. Persentase Penguatan Kapasitas PSKS;
5. Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda;
6. Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga;
7. Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan;
8. Prosentase Kenaikan Kunjungan Masyarakat;
9. Indeks Profesionalitas ASN;
10. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
11. Persentase Raperda yang Disahkan Tepat Waktu;
12. Tingkat Konsistensi dan Ketepatan Waktu Perencanaan;
13. Prosentase Kenaikan SKPD Mengelola Arsip Secara Baku;
14. Prosentase Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel;
15. Level Maturitas SPIP;
16. Level Kapabilitas APIP;
17. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
18. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD);
19. Persentase Tercapainya Penyusunan Produk Hukum dan Penanganan Perkara;
20. Indeks Kabupaten Peduli HAM;
21. Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik yang Sesuai Regulasi;
22. Persentase Publikasi Kebijakan dan Kegiatan Kepala Daerah;
23. Persentase Dokumentasi Kegiatan Kepala Daerah;
24. Persentase Pelayanan Keprotokolan Kegiatan Kepala Daerah;
25. Persentase Keterlibatan Stakeholder Dalam Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesra;
26. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB;
27. Prosentase Desa yang Memiliki LEM, LED dan Posyantek;
28. Persentase Peningkatan PAD dari Sektor Pariwisata;
29. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB;
30. Persentase UMKM yang Memiliki Daya Saing;
31. Prosentase Inovasi yang Diterapkan;
32. Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi PMDN;
33. Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi PMA;
34. Rasio Penduduk yang Bekerja;
35. Angka Partisipasi Angkatan Kerja;
36. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB;
37. Persentase IKM yang Memiliki Daya Saing;
38. Indeks Layanan Infrastruktur;
39. Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan;
40. Ketaatan Terhadap RTRW;
41. Indeks Kualitas Udara;

42. Indeks Tutupan Vegetasi (lahan);
 43. Kelas Indeks Kapasitas Bencana;
 44. Indeks Demokrasi;
 45. Indeks Ketertiban Masyarakat;
 46. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
 47. Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan;
 48. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat; dan
 49. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat;
- b. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria *tinggi*, atau interval nilai realisasi kinerja $75,1 \leq 90$ sebanyak 5 (lima) indikator, diantaranya:
1. Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan;
 2. Rata-rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan);
 3. Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana);
 4. Indeks Kualitas Air; dan
 5. Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA).
- c. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria *sedang*, atau interval nilai realisasi kinerja $65,01 \leq 75$ sebanyak 2 (dua) indikator, yaitu:
1. Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan
 2. Indeks Kualitas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman;
- d. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria *rendah*, atau interval nilai realisasi kinerja $50,1 \leq 65$ sebanyak 1 (satu) indikator, yaitu: Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya.
- e. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria *sangat rendah*, atau interval nilai realisasi kinerja ≤ 50 sebanyak 3 (tiga) indikator, diantara:
1. Rasio daya serap tenaga kerja PMDN;
 2. Rasio daya serap tenaga kerja PMA; dan
 3. Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi.

B. Indikator Regresif, dengan hasil:

Indikator regresif dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria ***Tercapai: (Berhasil Menekan)***, atau interval nilai realisasi kinerja skala $99,9 \leq$ sebanyak 7 (tujuh) indikator, diantaranya:

1. Kasus Kematian Ibu;
2. Angka Kematian Bayi;
3. Angka Kematian Balita; dan
4. Prevalensi Gizi Buruk (BB/U);
5. Tingkat Inflasi YoY;

6. Angka Kelahiran (Total Fertility Rate)/TFR; dan
7. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Selanjutnya untuk mengimplementasikan RPJMD, telah ditetapkan pula Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan APBD Kabupaten Klaten Tahun 2019 tercatat sebanyak 169 program dengan 2.918 kegiatan. Realisasi fisik tercapai 95% dari target rencana. Dukungan dana untuk melaksanakan pembangunan dianggarkan sebanyak Rp.1.012.713.701.277,52 dan terserap sebesar Rp.857.012.047.026,68 (atau 84,63%).

Evaluasi atas data pendukung beserta berbagai permasalahan yang muncul dari setiap sasaran strategis perlu diantisipasi. Sebagaimana hasil menunjukkan berdasar tingkat efisiensi sumber daya diperoleh hasil: Jumlah sasaran strategis yang memiliki tingkat efisiensi tinggi sebanyak 28 sasaran (atau 62,22% dari sebanyak 45 sasaran strategis), sedangkan jumlah indikator sasaran strategis yang memiliki tingkat efisiensi tinggi sebanyak 39 sasaran (atau 58,21% dari sebanyak 67 sasaran strategis). Sedangkan tingkat efektifitas sumber daya: yang efektif sebanyak 70,18%, kurang efektif sebanyak 17,54% dan yang tidak efektif sebanyak 12,28%.

Sebab sekalipun realisasi kinerja menunjukkan hasil sangat baik, di lapangan belum tentu menjawab isu-isu pembangunan secara tuntas. Sehingga kehadiran pemerintah harus selalu ada disaat-saat masyarakat memerlukan pelayanan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Pernyataan Telah Direviu	iii
Executive Summary	iv
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Grafik.....	xvi
Daftar Diagram	xviii
Daftar Gambar.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Pembangunan Menyeluruh dan Tren Wilayah.....	I-2
1.3 Kondisi Ekonomi Daerah.....	I-9
1.4 Kapabilitas SDM Pemerintah Kabupaten Klaten.....	I-13
1.5 Isu Startegis.....	I-16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
2.1 Rencana Strategis	II-1
2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019	II-13
2.3 Program Pendukung Pencapaian Sasaran.....	II-16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	III-2
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	III-10
3.3 Akuntabilitas Anggaran	III-141
3.4 Efektifitas Sumber Daya.....	III-164
BAB IV PENUTUP	IV-1
4.1 Kesimpulan.....	IV-1
4.2 Rencana Tindak Lanjut	IV-2
Lampiran I Penghargaan dan Piagam Penghargaan Kabupaten Klaten tahun 2019	
Lampiran II Struktur Pemerintah Kabupaten Klaten	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rasio Beban Tanggungan (RBT) Kabupaten Klaten Tahun 2015 - 2019	I-4
Tabel 1.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Klaten 2014 - 2018	I-6
Tabel 1.3	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019	I-6
Tabel 1.4	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Klaten Tahun 2015 – 2019	I-10
Tabel 1.5	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Klaten Tahun 2015 – 2019	I-12
Tabel 1.6	Pejabat Struktural Yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan Kabupaten Klaten Tahun 2015 – 2019.....	I-15
Tabel 1.7	Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat, Bintek dan Seminar Tahun 2015 – 2019	I-16
Tabel 2.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021.....	II-8
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Kabupaten Klaten Tahun 2019.....	II-13
Tabel 2.3	Program Pendukung Pencapaian Sasaran.....	II-16
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja Progresif.....	III-2
Tabel 3.2	Skala Nilai Peringkat Kinerja Regresif	III-2
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2019	III-3
Tabel 3.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal	III-10
Tabel 3.5	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Klaten Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2015 – 2019 ...	III-13
Tabel 3.6	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Klaten Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2015 -2019	III-13
Tabel 3.7	Perkembangan Persentase Angka Putus Sekolah (APS) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2015 -2019	III-14
Tabel 3.8	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D IV Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019	III-16

Tabel 3.9	Kepala Sekolah yang Memenuhi Kualifikasi SI/D IV/S2 dan Bersertifikat Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2015-2019	III-17
Tabel 3.10	Perkembangan Angka Melanjutkan Sekolah dari SMP/MTs Ke SMA/MA/SMK Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019	III-18
Tabel 3.11	Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi baik Tahun 2015 - 2019.....	III-19
Tabel 3.12	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian, Angka Kesakitan dan Kecacatan	III-21
Tabel 3.13	Jumlah Kasus Kematian Ibu Melahirkan Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Klaten Tahun 2015 - 2019.....	III-22
Tabel 3.14	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Menurunnya Angka Kelahiran (Total Fertility Rate)	III-27
Tabel 3.15	Peserta KB dan KB Aktif di Kabupaten Klaten Tahun 2015 - 2019.....	III-28
Tabel 3.16	Jumlah Pentahapan Keluarga Sejahtera Menurut Jenisnya di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019	III-28
Tabel 3.17	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Pemanfaatan Pelayanan Kerumahsakitkan oleh Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian di rumah Sakit.....	III-30
Tabel 3.18	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Upaya Pencegahan Permasalahan Sosial dan Aksesibilitas PMKS dalam Memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi yang Berperspektif HAM	III-34
Tabel 3.19	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.....	III-37
Tabel 3.20	Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019	III-38
Tabel 3.21	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya ..	III-39
Tabel 3.22	Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019	III-40
Tabel 3.23	Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019	III-41
Tabel 3.24	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan	III-42

Tabel 3.25	Perkembangan Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019	III-43
Tabel 3.26	Perkembangan Jumlah Perpustakaan Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019	III-43
Tabel 3.27	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah.....	III-45
Tabel 3.28	Capaian Indeks Profesionalitas ASN	III-45
Tabel 3.29	Rencana dan realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	III-47
Tabel 3.30	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2015-2018	III-48
Tabel 3.31	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD.....	III-49
Tabel 3.32	Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan Pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2019	III-50
Tabel 3.33	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.....	III-52
Tabel 3.34	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Tata Kelola Arsip SKPD.....	III-53
Tabel 3.35	Pengelolaan Kearsipan di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019.....	III-54
Tabel 3.36	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel	III-55
Tabel 3.37	Lembaga Ekonomi Perdesaan	III-56
Tabel 3.38	Pelatihan Teknologi Tepat Guna Tahun 2015-2019.....	III-56
Tabel 3.39	Lokasi Pengembangan Wisata.....	III-58
Tabel 3.40	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	III-61
Tabel 3.41	Penjaminan Kualitas Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten.....	III-63
Tabel 3.42	Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten.....	III-64
Tabel 3.43	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.....	III-67

Tabel 3.44	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi Penataan Peraturan Perundang-Undangan serta Bantuan Hukum dan HAM.....	III-69
Tabel 3.45	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	III-70
Tabel 3.46	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang Kredibel	III-71
Tabel 3.47	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi Bidang Kehumasan dan Keprotokolan	III-73
Tabel 3.48	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Fasilitasi dan Pengawasan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian	III-74
Tabel 3.49	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi Kesejahteraan Rakyat.....	III-76
Tabel 3.50	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.....	III-78
Tabel 3.51	Luas Lahan Pertanian dan Bukan Lahan Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019.....	III-78
Tabel 3.52	Perkembangan Luas Tanam dan Luas Panen Tanaman Pangan Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019.....	III-80
Tabel 3.53	Perkembangan Produksi dan Produktifitas Tahun 2015-2019.....	III-80
Tabel 3.54	Produksi Perkebunan Tahun 2015-2019	III-81
Tabel 3.57	Produksi Ternak Tahun 2015-2019	III-81
Tabel 3.56	Produksi Susu, Daging dan Telur Tahun 2015-2019.....	III-82
Tabel 3.57	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Peran LEM, LED dan Pengembangan Potensi TTG di Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan.....	III-84
Tabel 3.58	Lembaga Ekonomi Perdesaan	III-85
Tabel 3.59	Pelatihan Teknologi Tepat Guna Tahun 2015-2019.....	III-85
Tabel 3.60	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata	III-88
Tabel 3.61	Jumlah Obyek Wisata, Pengunjung, Lama Tinggal dan Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) tahun 2015-2019	III-88

Tabel 3.62	Sumbangan Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019	III-89
Tabel 3.63	Nama dan Jenis Obyek Wisata serta Lokasinya di Kabupaten Klaten Tahun 2019.....	III-90
Tabel 3.64	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Nilai tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UMKM	III-93
Tabel 3.65	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah.....	III-95
Tabel 3.66	Inovasi Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten.....	III-96
Tabel 3.67	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Nilai tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Penanaman Modal.....	III-99
Tabel 3.68	Jumlah Investasi PMA dan PMDN Tahun 2015-2019	III-100
Tabel 3.69	Perkembangan Realisasi PMDN Tahun 2015-2019.....	III-100
Tabel 3.70	Perkembangan Realisasi PMA Tahun 2014-2018	III-101
Tabel 3.71	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing, Sektor Ketenagakerjaan	III-102
Tabel 3.72	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Perlindungan Sektor Ketenagakerjaan.....	III-105
Tabel 3.73	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Perindustrian	III-106
Tabel 3.74	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Insfrastruktur Publik dan Sarana Prasarana Dasar Masyarakat.....	III-108
Tabel 3.75	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Penyelenggaraan Angkutan.....	III-110
Tabel 3.76	Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi) di Kabupaten Klaten tahun 2015-2019.....	III-111
Tabel 3.77	Data Terminal Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Klaten Tahun 2019	III-111
Tabel 3.78	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Indeks Kualitas Perumahan dan Permukiman	III-114
Tabel 3.79	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai Dengan Konsep Tata Ruang.....	III-115

Tabel 3.80	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup.....	III-116
Tabel 3.81	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Pengurangan kerentanan Risiko Bencana.....	III-120
Tabel 3.82	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Politik dan Demokrasi.....	III-121
Tabel 3.83	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat Dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya	III-123
Tabel 3.84	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	III-124
Tabel 3.85	Rekapitulasi Data Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Tahun 2015-2019	III-125
Tabel 3.86	Rekapitulasi Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Minuman Keras / Beralkohol Tahun 2015-2019	III-126
Tabel 3.87	Kondisi Jenis Permasalahan Ketentraman Umum Tahun 2015-2019	III-127
Tabel 3.88	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Kapasitas Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak	III-129
Tabel 3.89	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019	III-130
Tabel 3.90	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019	III-130
Tabel 3.91	Keikutsertaan Perempuan di dalam Jabatan Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019.....	III-131
Tabel 3.92	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019	III-132
Tabel 3.93	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Layanan Perhubungan	III-133
Tabel 3.94	Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi) di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019.....	III-134
Tabel 3.95	Data terminal Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019	III-134
Tabel 3.96	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelayanan Perijinan Satu Pintu Yang Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat.....	III-135

Tabel 3.97	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas	III-137
Tabel 3.98	Jumlah Pelayanan Akte di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019.....	III-138
Tabel 3.99	Penduduk kabupaten Klaten yang Belum ber-Akte lahir dan KTP Elektronik Tahun 2015-2019	III-138
Tabel 3.100	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Pengembangan Ketransmigrasian.....	III-139
Tabel 3.101	Realisasi Penempatan Transmigrasi Umum Menurut Daerah Penempatan Tahun 2015-2019	III-140
Tabel 3.102	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019	III-143
Tabel 3.103	Tingkat Efisiensi Sumber Daya.....	III-165
Tabel 3.104	Jumlah Sumber Daya Aparatur di Lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2019.....	III-175

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Perkembangan Jumlah Kepala Keluarga (KK) Kabupaten Klaten Tahun 2015 - 2019	I-4
Grafik 1.2	Perkembangan Angka IPM Kabupaten Klaten dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018	I-5
Grafik 1.3	Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Klaten Terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015 – 2019	I-7
Grafik 1.4	Perkembangan Relevansi Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Kab. Klaten Terhadap Provinsi Jawa Tengah 2015-2019	I-8
Grafik 1.5	Perkembangan Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten terhadap Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015-2019	I-8
Grafik 1.6	Perbandingan Pertumbuhan Perekonomian Antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019	I-14
Grafik 1.7	Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 di Kabupaten Klaten dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019	I-13
Grafik 1.8	Profil Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019	I-14
Grafik 3.1	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2014 – 2018	III-11
Grafik 3.2	Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Klaten tahun 2015– 2019	III-12
Grafik 3.3	Angka Kelulusan (AL) Tahun 2015 – 2019	III-15
Grafik 3.4	Angka Melek Huruf Penduduk Usia > 15 tahun ke Atas di Kabupaten Klaten Tahun 2015 – 2019	III-15
Grafik 3.5	Rasio Guru Terhadap Murid untuk Jenjang SD/MI dan SMP/MTS Tahun 2015-2019	III-17
Grafik 3.6	Perkembangan Kasus Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019	III-22
Grafik 3.7	Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019	III-23
Grafik 3.8	Perkembangan Angka Kematian Balita di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019	III-24
Grafik 3.9	Perkembangan Persentase Gizi Buruk di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019	III-25

Grafik 3.10	Perkembangan Usia Harapan Hidup Masyarakat di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019.....	III-31
Grafik 3.11	Perkembangan Indikator BOR Bulanan (Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu).....	III-32
Grafik 3.12	Perkembangan Indikator BOR Tahunan (Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu)	III-32
Grafik 3.13	PMKS yang Memperoleh Bantuan Tahun 2015-2019.....	III-35
Grafik 3.14	Laju Inflasi di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019	III-75
Grafik 3.15	Indeks Kualitas Air dan Kualitas Udara	III-117
Grafik 3.16	Capaian Konservasi Penghijauan Daerah Sumber Mata Air Kabupaten Klaten Tahun 2018-2019 dan Target sampai tahun 2021.....	III-118

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1	Tema/Agenda Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021	II-11
Diagram 2.2	Korelasi antara Tujuan dan Misi Pembangunan Daerah	II-12
Diagram 3.1	Peringkat Kinerja Progresif	III-9
Diagram 3.1	Peringkat Kinerja Regresif	III-9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Aministrasi Kabupaten Klaten Menurut Kecamatan	I-3
------------	---	-----



1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan menuntut adanya pengelolaan atau manajemen pemerintahan yang baik. Manajemen pemerintahan yang baik bermuara pada terwujudnya *good governance* yang akan berdampak pada pengambilan kebijakan-kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan masyarakat dan daya saing daerah (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017). Disamping itu, tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif, serta memiliki pendapatan per kapita untuk hidup layak (*Human Development Report, 1990*).

Sebagai langkah awal untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, maka harus disusun *grand-design* perencanaan yang terpadu dari berbagai sektor, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sehingga perencanaan pembangunan

daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional harus dilaksanakan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu penguatan pelaksanaan *otonomi daerah* dalam upaya peningkatan pelayanan publik secara terus-menerus dan berkelanjutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2019 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari :
1.1 Latar Belakang
1.2 Pembangunan Menyeluruh dan Trend Wilayah
1.3 Kondisi Ekonomi Daerah
1.4 Kapabilitas SDM Pemerintah Kabupaten Klaten
1.5 Isu Strategis



dan Review Atas Laporan Kinerja. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud, bahwa pelaporan capaian kinerja instansi pemerintah yang disampaikan secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2019 disusun bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam *Dokumen Perjanjian Kinerja*. Adapun pengukuran capaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dihasilkan dari setiap instansi pemerintah.

Sehingga laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Memedomani ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja, Pemerintah Kabupaten Klaten menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 *Pembangunan Menyeluruh dan Trend Wilayah*

1.2.1 Kondisi Geografi dan Demografi

a. Letak Geografis

Kabupaten Klaten dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota yang mempunyai nilai strategis dan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan wilayah di Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Klaten terletak di jalur yang sangat strategis, karena berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang dikenal sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW). Dari sisi bentangan garis katulistiwa, Kabupaten Klaten terletak antara 7°32'19" Lintang Selatan sampai 7°48'33" Lintang Selatan dan antara 110°26'14" Bujur Timur sampai 110°47'51" Bujur Timur.

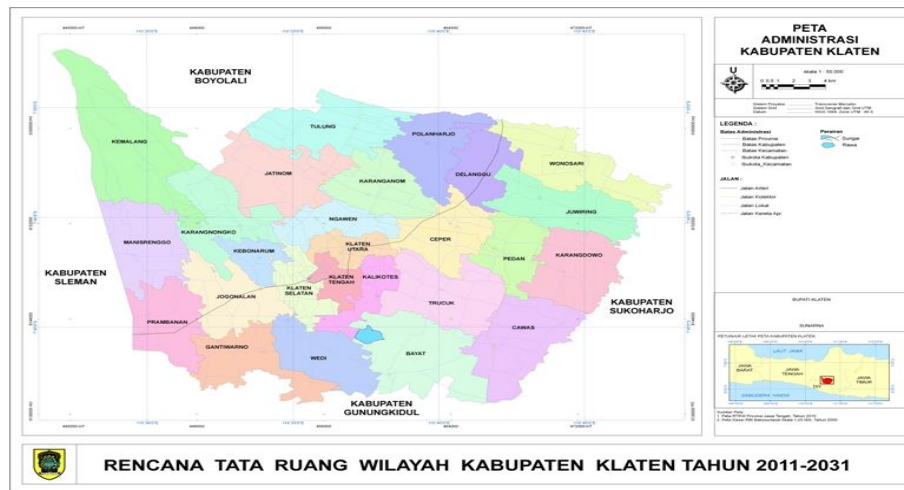
b. Tata Letak dan Wilayah Administrasi Administrasi

Kabupaten Klaten mempunyai luas wilayah 65.556 ha (655,56 km²) atau seluas 2,014% dari luas Provinsi Jawa Tengah, yang luasnya 3.254.412 ha. Luas wilayah tersebut mencakup seluruh wilayah administrasi di Kabupaten Klaten yang terdiri dari 26 Kecamatan, 391 Desa serta 10 Kelurahan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:



1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul (DIY); dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman (DIY).

Gambaran Peta Wilayah Kabupaten Klaten berdasar Kecamatan, selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1.1



Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Klaten Menurut Kecamatan

Adapun pembagian wilayah ada 26 kecamatan, 391 desa, 10 kelurahan, 3.689 RW dan 9.592 RT.

c. Penggunaan Lahan

Dari sisi penggunaan lahan pertanian selama 5 (lima) tahun terakhir mulai tahun 2014-2018 terjadi perubahan pola penggunaan lahan sawah irigasi. Penggunaan lahan sawah dari 33.314 Ha pada tahun 2014, menjadi 33.220 Ha pada tahun 2015, menjadi 33.220 Ha pada tahun 2016, pada tahun 2017 menjadi 33.111 Ha, dan pada tahun 2018 menjadi 33.066 Ha.

Adapun perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian pada tahun 2017 perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian seluas 55,2309 Ha, dengan perincian peruntukan: perumahan 40,8997 Ha, dan industri 13,6631 Ha. Sedangkan tahun 2018 seluas 45,391 Ha, dengan perincian peruntukan: perumahan 33,0577 Ha, industri 8,9094 Ha, perusahaan seluas 0,113 Ha, dan jasa seluas 3,3109 Ha.

Besaran luas lahan dan persentase lahan sawah yang beririgasi di Kabupaten Klaten menunjukkan bahwa tanah pertanian di Kabupaten Klaten masih sangat potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan agropolitan. Hal ini juga didukung oleh kenyataan bahwa selama ini Kabupaten Klaten mendapat sebutan sebagai penyangga pangan di

Provinsi Jawa Tengah. Pengembangan Kabupaten Klaten sebagai kawasan agropolitan, perlu adanya pengendalian dan optimalisasi pemanfaatan lahan sesuai produk unggulan yang disesuaikan dengan tata ruang wilayah.

d. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Klaten pada tahun 2018 sebanyak 1.314.781 jiwa, dan pada tahun 2019 menjadi sebanyak 1.323.609 jiwa (atau rerata pertumbuhan sebesar 0,67%). Berdasarkan jumlah penduduk yang tervalidasi, mengakibatkan pergeseran Rasio Beban Tanggungan (RBT) sebagaimana Tabel 1.1.

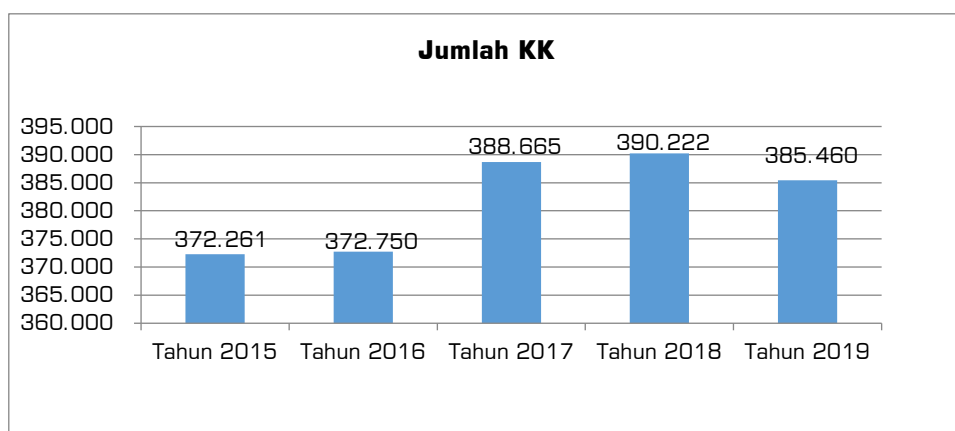
Tabel 1.1.
Rasio Beban Tanggungan (RBT)
Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019

No	Tahun	Penduduk Kelompok Umur			Jumlah Penduduk	Persentase RBT
		0-14	15-64	65+		
1	2015	288.064	1.023.245	168.962	1.480.271	44,66%
2	2016	288.047	1.028.714	169.665	1.486.426	44,49%
3	2017	275.208	907.665	125.839	1.308.712	44,18%
4	2018	251.025	916.620	147.136	1.314.781	43,44%
5	2019*)	252.707	922.761	148.141	1.323.609	43,44%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klaten, 2020.

*) Data sementara, (diolah).

Disamping RBT sebagaimana tersebut di atas, jumlah KK yang semula sejumlah 372.261 KK pada tahun 2015, pada tahun 2019 menjadi sebanyak 385.460 KK (atau bertambah sebanyak 13.219 KK), hal ini disebabkan validasi administrasi kependudukan. Gambaran perkembangan jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019 disajikan pada Grafik 1.1.



Sumber : Dinas Sosial, P3AKB Kab. Klaten, 2020.

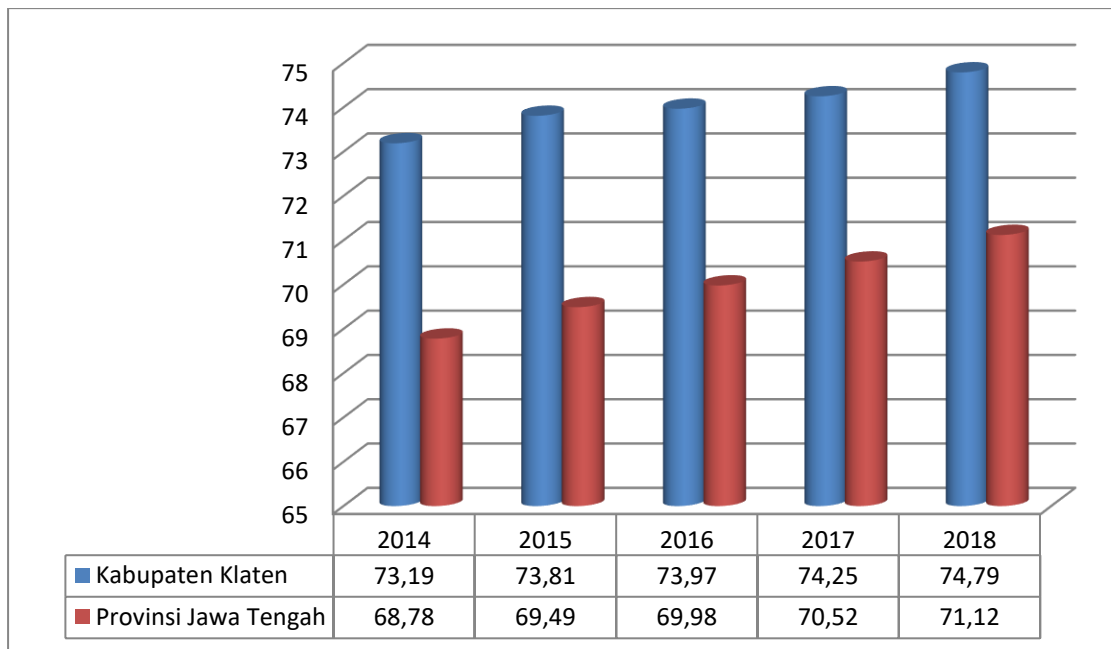
Grafik 1.1. Perkembangan Jumlah Kepala Keluarga (KK) Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019



1.2.2 Indeks Pembangunan Manusia

Berbagai program pembangunan khususnya dalam pembangunan manusia yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Klaten selama ini telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Salah satu indikator untuk mengukur kualitas pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM merupakan suatu indeks komposit yang disusun dari 3 (tiga) komponen esensial untuk kehidupan manusia, yaitu: (i) Usia hidup panjang dan sehat diukur dengan Angka harapan Hidup, (ii) Pengetahuan (*knowledge*) yang diukur dengan Rata-rata lama sekolah dan Angka harapan lama sekolah (iii) Standar hidup layak yang diukur dengan Pengeluaran Riel Per kapita. Perkembangan angka IPM Kabupaten Klaten dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018 disajikan pada Grafik 1.2.



Sumber : BPS Kabupaten. Klaten, 2019. (diolah)

Grafik 1.2. Perkembangan Angka IPM Kabupaten Klaten dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

Berdasarkan Grafik 1.2. di atas Perkembangan Angka IPM Kabupaten Klaten dari tahun 2014-2018 perkembangannya di atas rerata Provinsi Jawa Tengah, dan untuk mengetahui perkembangan komponen pembentuk IPM Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

Indikator IPM	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Harapan Hidup (tahun)	76,54	76,55	76,59	76,68	76,67
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,92	8,16	8,22	8,24	8,24
Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,74	12,84	12,85	12,94	13,13
Pengeluaran Riil Per Kapita (dalam Ribuan Rp.)	10.965	11.178	11.276	11.369	11.738
IPM	73,19	73,81	73,97	74,25	74,79

Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2020. Update Data Terakhir 07 Maret 2018

1.2.3 Kemiskinan

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Klaten dapat disajikan dengan 2 (dua) pendekatan pendataan, yaitu: 1. Persentase penduduk miskin, dan 2. Jumlah rumah tangga miskin yang masing-masing dihitung dengan kriteria yang berbeda.

a. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin dihitung berdasarkan pada hasil survey Susenas, dimana angka yang diperoleh adalah angka makro. Adapun penentuan penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan yang dihitung berdasarkan pemenuhan kebutuhan pangan maupun non pangan. Garis kemiskinan setara dengan 2.100 kkal per kapita. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Klaten selama tahun 2015-2019 cenderung mengalami penurunan walaupun penurunannya relatif lambat. Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Penduduk <i>Disdukcapil</i> (Jiwa)	Jumlah Penduduk <i>BPS</i> (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2015	1.480.271	1.158.295	172.300	14,89
2016	1.486.426	1.163.218	168.010	14,46
2017	1.308.712	1.166.100	164.990	14,15
2018	1.314.781	1.171.411	151.730	12,96
2019	1.323,609	1.171.411*)	144.140	12,28

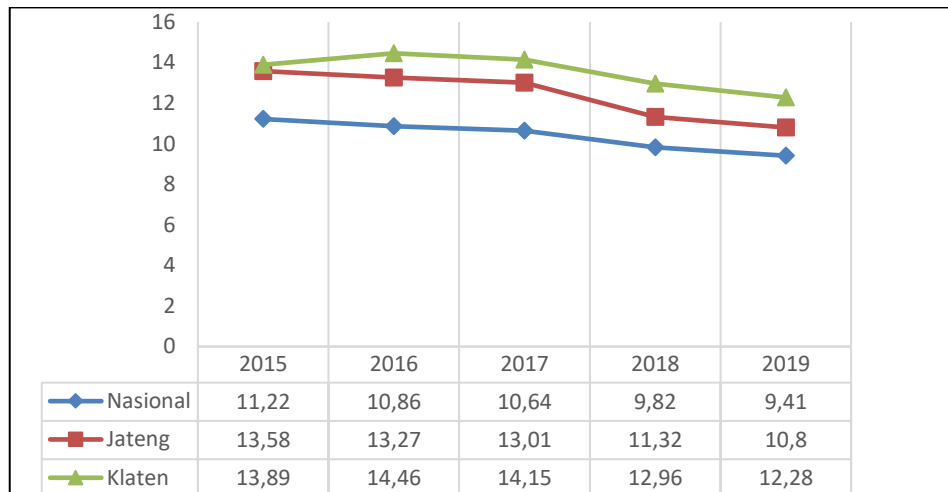
Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Klaten, 2020. Update Data Terakhir 27 November 2019.

*) Data Sementara



Pada tahun 2019 angka persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 0,68% dibanding tahun 2018, hal ini didorong percepatan bantuan sosial bagi masyarakat miskin dari pemerintah turun tepat waktu, seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Dana Desa, pengendalian inflasi dan lain-lain.

Perkembangan relevansi persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Klaten tahun 2015-2019 disajikan pada Grafik 1.3.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Klaten, 2020.

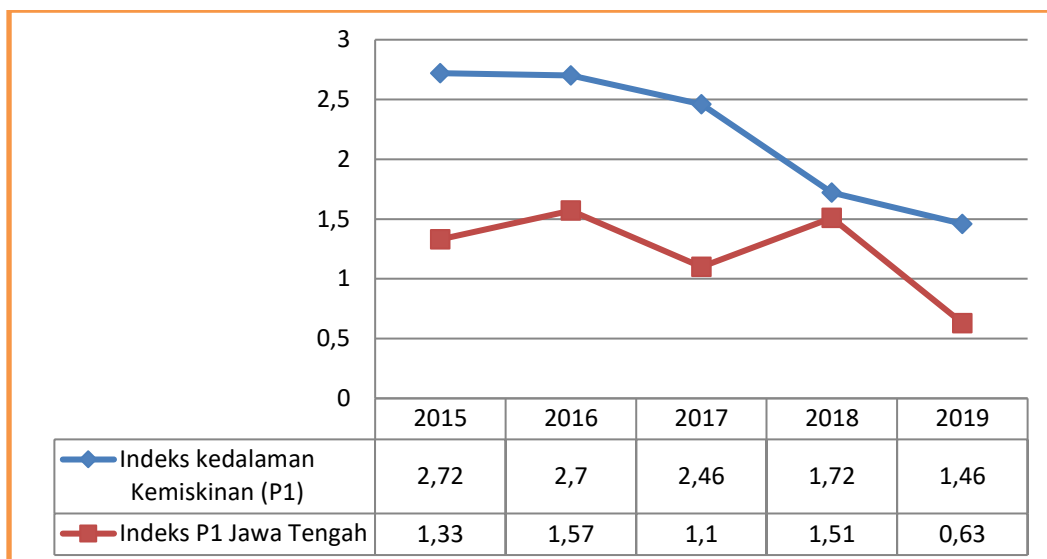
Grafik 1.3. Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Klaten Terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015 - 2019

Penurunan angka kemiskinan terjadi baik di Kabupaten, Provinsi maupun Nasional, hal ini dikarenakan keberhasilan program penganggulangan kemiskinan lintas sektor. Namun angka kemiskinan Kabupaten Klaten masih di atas angka kemiskinan provinsi dan nasional, hal ini disebabkan kesulitan penurunan kemiskinan karena terjadinya *inclusion error* yaitu kesalahan sasaran penerimaan program. Masyarakat yang sebenarnya tidak berhak justru menerima bantuan alih-alih warga miskin. "Ada *exclusion error*, yaitu kesalahan yang terjadi karena orang yang seharusnya menjadi sasaran program pengentasan kemiskinan namun kenyataannya malah tidak menerima, begitu pula sebaliknya. Orang tidak miskin malah dapat bantuan".

b. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Data Kemiskinan Makro

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) sebagai ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Posisi relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Klaten dengan Provinsi Jawa Tengah dapat disajikan pada Grafik 1.4.



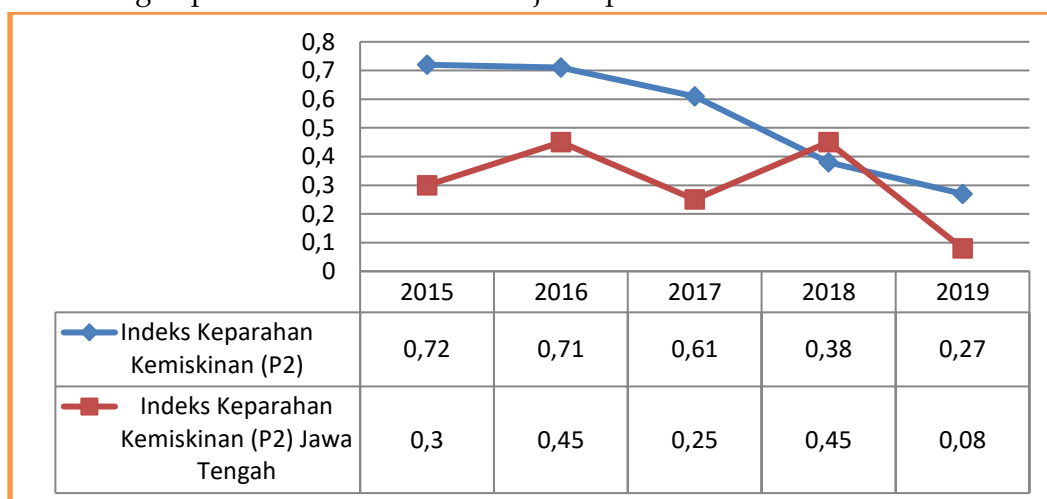


Grafik 1.4. Perkembangan Relevansi Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Kab. Klaten Terhadap Provinsi Jawa Tengah 2015-2019

Pada Grafik 1.4. ditunjukkan Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Klaten pada tahun 2019 sebesar 1,46 masih di atas posisi Provinsi Jawa Tengah (0,63).

c. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Data Kemiskinan Makro

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan ukuran untuk mengetahui penyebaran ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Perkembangan relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten terhadap Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015-2019 disajikan pada Grafik 1.5.



Grafik 1.5. Perkembangan Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten terhadap Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015-2019

Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten tahun 2015-2019 terhadap perkembangan realisasi Provinsi Jawa

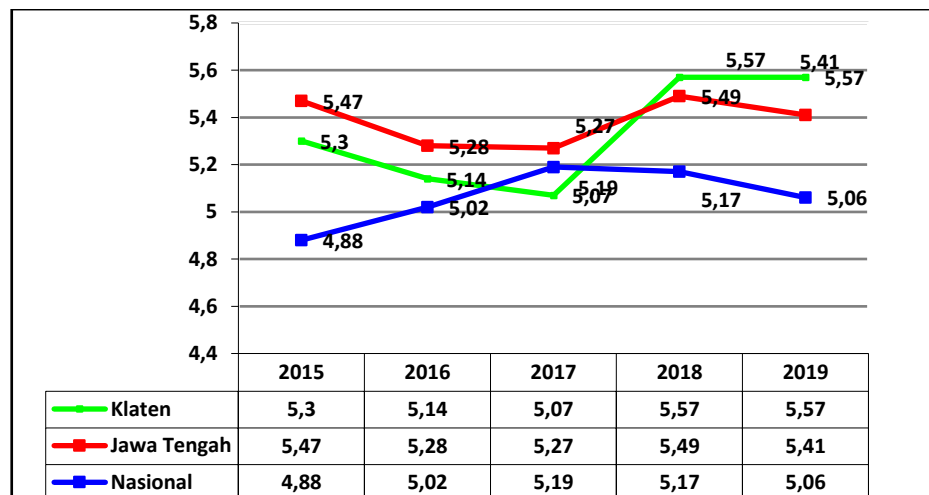


Tengah, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten pada tahun 2019 (0,27) masih di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (0,08).

1.3 Kondisi Ekonomi Daerah

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Klaten selama Tahun 2015-2019 menunjukkan kinerja positif, hal ini ditunjang adanya pertumbuhan sektor UMKM dan lapangan usaha yang mendukung peningkatan sektor jasa. Tahun 2015 sebesar 5,30%, Tahun 2016 sebesar 5,14%, Tahun 2017 sebesar 5,07%, pada tahun 2018 tumbuh sebesar 5,44% dan pada tahun 2019 tumbuh sebesar 5,57%, hal ini sebagai dampak adanya pelaksanaan program pembangunan yang sinergis antar sektor.

Perbandingan pertumbuhan perekonomian antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama Tahun 2015-2019, dapat dilihat pada Grafik 1.6.



Sumber : BPS Kab. Klaten, 2020 (diolah)

Grafik 1.6. Perbandingan Pertumbuhan Perekonomian Antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klaten atas Dasar Harga Konstan 2010 selama Tahun 2015-2019 tumbuh secara positif. Gambaran selengkapnya Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010, di Kabupaten Klaten selama Tahun 2015-2019 dapat dilihat dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4.
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019 (dalam Rp. Juta)

No	Lapangan Usaha	2015		2016		2017		2018		2019	
		Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan (%)	Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan %	Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan %	Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan (%)	Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan %
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.732.275,47	4,84	2.814.072,15	2,99	2.845.097,06	1,10	2.908.070,61	2,21	2.943.761,34	1,23
2	Pertambangan dan Penggalian	617.439,64	3,33	635.553,28	2,93	664.166,20	4,50	685.313,55	3,18	706.900,93	3,15
3	Industri Pengolahan	7.540.801,78	6,31	8.004.239,75	6,15	8.504.714,04	6,25	9.013.718,21	5,98	9.601.710,72	6,52
4	Pengadaan Listrik dan gas	39.160,62	1,65	41.588,12	6,20	44.249,82	6,40	47.094,12	6,43	49.644,40	5,42
5	Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah, dan Daur Ulang	11.793,17	2,30	12.047,34	2,16	12.826,81	6,47	13.532,60	5,50	14.308,02	5,73
6	Konstruksi	1.356.317,55	4,76	1.435.985,49	5,87	1.531.575,76	6,66	1.635.233,26	6,67	1.745.775,03	6,76
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.209.074,39	2,80	4.362.061,18	3,63	4.531.078,43	3,37	4.719.954,10	4,17	4.923.412,16	4,31
8	Transportasi dan Pergudangan	544.592,24	5,65	566.772,32	4,07	597.101,45	5,35	625.692,51	4,79	656.720,86	4,96
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	832.820,90	5,14	883.680,17	6,11	944.707,06	6,91	1.018.074,62	7,77	1.098.344,48	7,78
10	Informasi dan Komunikasi	844.708,79	6,26	908.551,37	7,56	1.026.807,26	13,02	1.147.054,83	11,71	1.282.866,12	11,84
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	767.642,41	6,82	821.907,83	7,07	857.588,05	4,34	887.591,04	3,50	915.313,03	3,12
12	Real Estate	339.893,73	7,54	361.069,45	6,23	382.324,67	5,89	401.354,47	4,98	420.057,59	4,66
13	Jasa Perusahaan	70.961,66	8,13	77.484,45	9,19	83.734,52	8,07	90.076,27	7,57	96.931,07	7,61
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	574.874,57	5,13	591.863,52	2,96	610.862,34	3,31	631.265,14	3,34	641.455,60	1,61
15	Jasa Pendidikan	1.438.727,68	7,88	1.520.064,74	5,66	1.607.474,21	5,75	1.720.461,03	7,03	1.842.721,54	7,11
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	241.260,27	7,70	260.226,42	7,86	282.328,51	8,49	307.894,68	9,06	336.313,36	9,23
17	Jasa Lainnya	396.731,26	4,01	428.573,40	8,03	466.467,08	8,84	508.328,89	8,97	553.417,66	8,87
Produk Domestik Regional Bruto		22.558.976,15	5,30	23.725.740,98	5,17	24.983.103,27	5,34	26.360.649,93	5,47	27.829.653,91	5,57

Sumber: BPS Kabupaten Klaten 2020. Update data terakhir 2 Maret 2020.

Berdasarkan Tabel 1.4. dapat diketahui bahwa PDRB atas dasar Harga Konstan di Kabupaten Klaten selama Tahun 2015-2019 mengalami kenaikan dari sebesar Rp.22.558.976,15 juta pada tahun 2015, meningkat menjadi sebesar Rp. 27.829.653,91 juta pada tahun 2019 (atau rata-rata naik 4,67%).

Jika dilihat Atas Dasar Harga Konstan sumbangan sektor PDRB berdasarkan lapangan usaha terjadi pertumbuhan yang fluktuatif, ada yang mengalami kenaikan namun juga ada yang menurun. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2019 tumbuh paling rendah diantara sektor lainnya, hal ini disebabkan perubahan iklim, adanya serangan hama dan lambatnya peningkatan produksi maupun produktifitas yang berakibat lambatnya nilai tambah sektor pertanian.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor meskipun tumbuh melambat, namun apabila dilihat dari nilai investasi mempunyai peluang usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengatasi pengangguran. Sektor lain yang protektif, dan tumbuh pesat adalah sektor industri pengolahan. Sektor ini tumbuh tidak saja ditunjukkan berkembangnya usaha kecil mikro dan industri olahan, tetapi juga ditunjang menguatnya daya beli masyarakat yang menopang tumbuhnya perekonomian daerah.

Sementara itu, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010, pada Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 1.5.

Tabel 1.5.
 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Klaten
 Tahun 2015-2019 (dln Juta Rupiah)

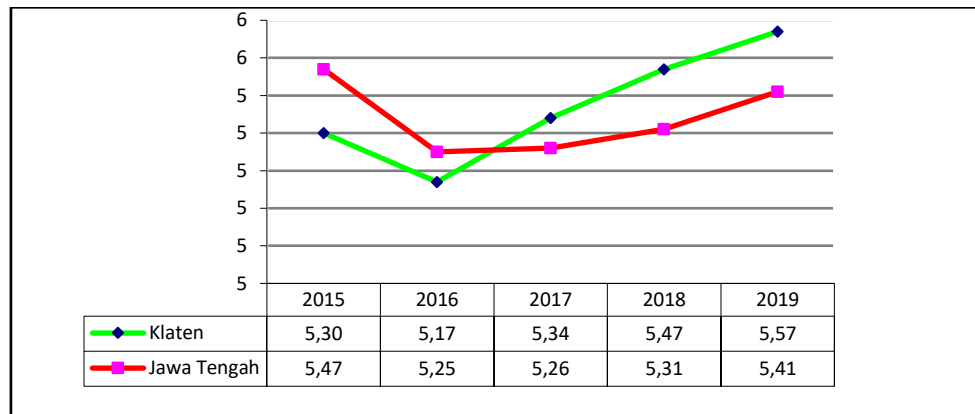
No	Lapangan Usaha	2015		2016		2017		2018		2019	
		Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.622.347,95	10,30	3.810.348,98	5,19	3.880.677,98	1,85	4.085.464,24	5,28	4.206.652,77	2,97
2	Pertambangan dan Penggalian	955.364,63	18,06	1.030.613,84	7,88	1.112.144,57	7,91	1.177.376,22	5,87	1.245.553,58	5,79
3	Industri Pengolahan	10.178.503,39	11,65	11.381.482,63	11,82	12.446.837,51	9,36	13.611.869,50	9,36	14.726.080,24	8,19
4	Pengadaan Listrik dan gas	39.661,13	7,45	44.053,13	11,07	50.784,96	15,28	55.741,58	9,76	58.861,29	5,60
5	Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah, dan Daur Ulang	12.698,33	4,96	13.246,78	4,32	14.143,63	6,77	14.964,95	5,81	16.371,66	9,40
6	Konstruksi	1.780.130,61	10,92	1.914.709,83	7,56	2.094.601,40	9,40	2.333.361,55	11,40	2.552.697,54	9,40
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.947.444,05	7,34	5.292.431,30	6,97	5.631.766,56	6,41	6.000.014,15	6,54	6.430.015,48	7,17
8	Transportasi dan Pergudangan	614.745,60	10,27	645.183,06	4,95	690.596,13	7,04	729.681,82	5,66	779.971,91	6,89
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	974.845,99	11,01	1.091.254,92	11,94	1.180.067,24	8,14	1.284.456,54	8,85	1.404.195,46	9,32
10	Informasi dan Komunikasi	880.528,28	5,31	948.913,65	7,77	1.119.938,75	18,02	1.252.092,63	11,80	1.419.789,34	13,39
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	985.803,41	10,90	1.081.527,12	9,71	1.175.828,75	8,72	1.259.961,03	7,16	1.321.513,91	4,89
12	Real Estate	381.078,74	11,05	409.338,03	7,42	444.310,49	8,54	477.618,78	7,50	509.514,95	6,68
13	Jasa Perusahaan	90.459,78	13,56	102.585,38	13,40	115.088,85	12,19	126.797,73	10,17	139.716,72	10,19
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	730.951,96	9,35	792.119,46	8,37	844.376,28	6,60	882.410,22	4,50	908.656,78	2,97
15	Jasa Pendidikan	1.984.205,50	9,87	2.160.832,68	8,90	2.379.643,26	10,13	2.606.214,15	9,52	2.881.198,28	10,55
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	339.329,96	11,94	372.019,69	9,63	409.870,96	10,17	452.676,88	10,44	495.228,51	9,40
17	Jasa Lainnya	470.679,24	7,76	528.580,71	12,30	584.142,53	10,51	642.768,49	10,04	703.188,73	9,40
	Produk Domestik Regional Bruto	28.988.778,55	10,10	31.619.241,19	8,78	34.174.819,85	9,24	36.993.470,46	8,21	39.799.207,15	7,78

Sumber: BPS Kabupaten Klaten 2020. Update Data Terakhir per 2 Maret 2020.

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019 mengalami kenaikan dari sebesar Rp.28.988.778,55 juta pada tahun 2015, meningkat menjadi sebesar Rp.39.799.207,15 juta pada tahun 2019 (atau rata-rata naik 7,46%).

Sedangkan jika dilihat Atas Dasar Harga Berlaku sumbangan sektor PDRB berdasarkan lapangan usaha terjadi pertumbuhan yang sifatnya fluktuatif, ada yang mengalami kenaikan namun juga ada yang menurun. Pada tahun 2019, kontribusi terbesar atas dasar harga berlaku masih disumbang oleh sektor industri pengolahan sebesar 7,17% atau Rp.6.430.015,48 juta, dan sumbangan terendah dari sektor Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah, dan Daur Ulang sebanyak Rp. 16.371,66 Juta (atau dengan daya tumbuh 9,40%)

Sedangkan sebagai gambaran Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 di Kabupaten Klaten dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019 sebagaimana Grafik 1.7.



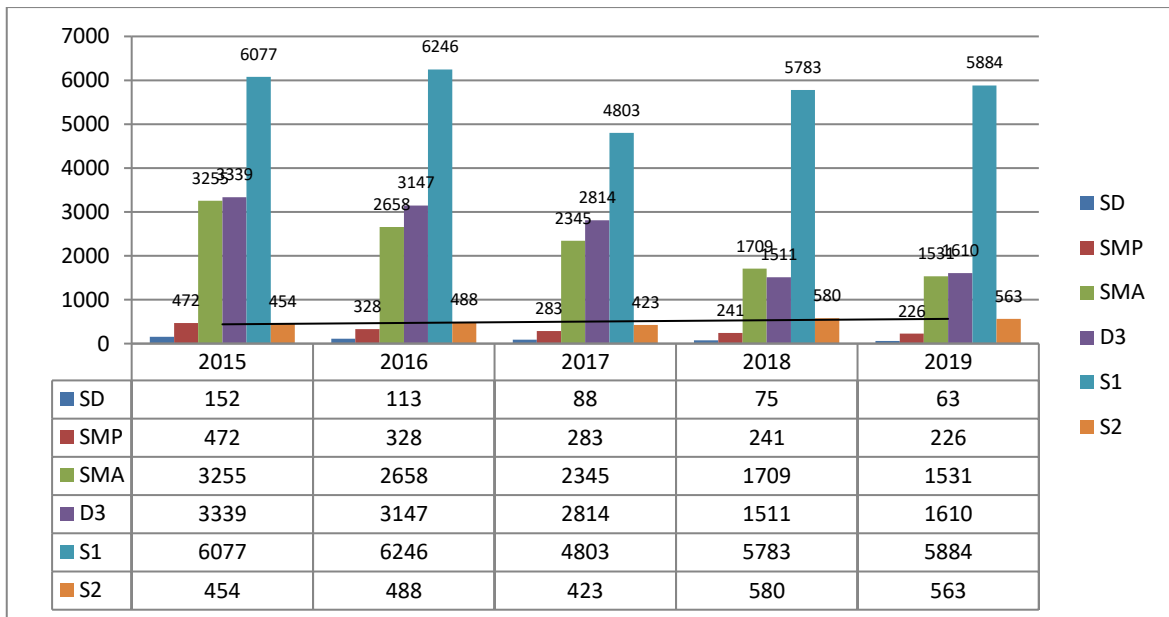
Sumber : BPS Provinsi Jawa tengah 2020, Update Terakhir per Maret 2020.

Grafik 1.7. Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 di Kabupaten Klaten dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019

Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 di Kabupaten Klaten pada tiga tahun terakhir (2017-2019) sudah di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah, hal ini menandakan perkembangan perekonomian di Kabupaten Klaten jauh lebih baik dibanding rerata Provinsi.

1.4 Kapabilitas SDM Pemerintah Kabupaten Klaten

Kapabilitas SDM Pemerintah Kabupaten Klaten berdasarkan jumlah ASN pada tahun 2018 sebanyak 9.899 orang, dan pada tahun 2019 menjadi sebanyak 9.877 orang (atau turun 0,22%). Gambaran singkat profil jumlah pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan, dan dapat disajikan dalam Grafik 1.8.



Sumber : BKPPD Kabupaten Klaten, 2020.

Grafik 1.8 Profil Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019

Berdasarkan Grafik 1.8. sebagaimana tersebut di atas, Pendidikan dan pelatihan memiliki peran strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yaitu aparatur pegawai yang profesional baik dalam hal kompetensi, sikap dan perilaku yang diharapkan sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Berikut Tabel ASN yang telah mengikuti diklat struktural di Kabupaten Klaten. Sedangkan pejabat Struktural yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Kabupaten Klaten 2015–2019 disajikan pada Tabel 1.6.

Tabel 1.6.

Pejabat Struktural Yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan
Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019

NO	Jabatan (Eselon)	Jenis Diklat Struktural	Sudah Mengikuti Diklat Struktural														
			TAHUN 2015			TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
			LULUS	JML PEJABAT	%	LULUS	JML PEJABAT	%	LULUS	JML PEJABAT	%	LULUS	JML PEJABAT	%	LULUS	JML PEJABAT	%
1	JPT (Eselon II)	Diklatpim Tingkat II	0	24	0	5	21	23,8	5	21	23,8 1	5	27	18,52	5	31	16,13
2	Administrator (Eselon III)	Diklatpim Tingkat III	2	148	1,35	3	143	2,1	8	138	5,80	16	152	10,53	47	162	29,01
3	Pengawas (Eselon IV)	Diklatpim Tingkat IV	2	602	0,33	2	520	0,38	16	495	3,23	48	452	10,62	73	510	14,31

Sumber: BKPPD Kabupaten Klaten, 2019.

Berdasarkan Tabel 1.6. sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pejabat yang mengikuti Diklat pada Tahun 2019 : Diklat Kepemimpinan Tingkat II sebanyak 16.13%, Diklat Kepemimpinan Tingkat III 29.01 % dan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 14.31 %. Sedangkan dalam rangka peningkatan sumber daya aparatur terdapat data ASN yang telah mengikuti Diklat, BinteK dan Seminar tahun 2015–2019 disajikan pada Tabel 1.7.

Tabel 1.7.

Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat, Bintek dan Seminar
Tahun 2015–2019

NO	PERMOHONAN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Diklat Teknis sesuai Tupoksi	41	56	211	450	353
2.	Diklat Teknis Fungsional	27	36	47	312	63
3.	Bimbingan Teknis	89	80	42	58	56
4.	Seminar dan sejenisnya	24	-	-	-	-
JUMLAH		181	172	300	820	472

Sumber: BKPPD Kabupaten Klaten, 2020.

Berdasarkan Tabel 1.7. sebagaimana tersebut di atas, kondisi jumlah pegawai Kabupaten Klaten yang berjumlah 9.877 ASN pada tahun 2019 yang mengikuti: Diklat Teknis sesuai Tupoksi sebanyak 353 orang, Diklat Teknis Fungsional sebanyak 63 orang dan Bimbingan Teknis sebanyak 56 orang. Atau dengan kata lain, jumlah ASN yang Diklat dan Bintek hanya berkisar 4,78%. Hal ini menandakan masih diperlukan peningkatan sumber daya aparatur agar kinerja ASN meningkat.

1.5. Isu Strategis

Isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan bagi Pemerintah Kabupaten Klaten, diantaranya:

a. **Kemiskinan dan Pengangguran**

Angka kemiskinan pada tahun 2017 sebesar 14,15%, pada tahun 2018 turun menjadi sebesar 12,96%, dan pada tahun 2019 turun lagi menjadi 12,28%. Kemiskinan terjadi karena rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat. Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Klaten yang masih rendah di banding dengan rerata Jawa Tengah, sementara tingkat inflasi yang masih relatif tinggi sangat memungkinkan terjadinya penurunan daya beli masyarakat, sehingga menimbulkan beban berat bagi masyarakat miskin. Langkah preventif dalam bentuk pemberdayaan dan langkah kuratif dalam bentuk jaminan sosial atas kebutuhan dasar mesti dilakukan. Sisi lain, masih terjadinya kesenjangan antar wilayah kecamatan yang memerlukan perhatian semua pihak.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2018 sebesar 3,11%, dan pada tahun 2019 naik menjadi sebesar 3,55%. Tingkat pengangguran terbuka yang terus meningkat selain disebabkan oleh dampak berkepanjangan krisis ekonomi dan bencana alam, juga disebabkan oleh rendahnya kualitas angkatan kerja yang tidak mampu bersaing dan tidak mampu menciptakan lapangan kerja mandiri. Disamping itu, lapangan kerja yang akan terus bertahan adalah terciptanya pangsa pasar yang besar dan memiliki daya saing produk, maka penerapan iptek



dalam produksi dan bisnis serta peningkatan hubungan antara produsen lokal dengan pasar yang luas harus menjadi perhatian.

b. Potensi Ekonomi Daerah

Angka pertumbuhan ekonomi Kab Klaten pada Tahun 2018 sebesar 5,57 % sudah di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (5,49%) dan nasional (5,17%). 3 (tiga) Sektor yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kab Klaten antara lain Industri pengolahan sebesar 34 %, diikuti sector perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 18,13 %, dan sector pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 11,42 %.

Upaya penguatan ekonomi daerah diarahkan untuk memanfaatkan potensi lokal secara optimal dalam upaya peningkatan kesejahteraan penduduk. Beberapa sektor ekonomi seperti pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan subsektor terkait perlu dikembangkan dan dikelola secara berencana menurut dukungan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya sosial yang tersedia untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

c. Infrastruktur dan Kesenjangan Antar Wilayah

Meningkatnya dinamika kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat serta pengembangan wilayah, menyebabkan semakin tinggi dan vitalnya peran infrastruktur sebagai sarana publik. Dalam hal ini, tidak terbatas pada infrastruktur fisik namun juga terintegrasi dengan infrastruktur non fisik dan teknologi informasi, sehingga ke depan partisipasi, transparansi dan ketepatan manfaat akan menjadi lebih baik. Tingginya laju pertumbuhan dan pesatnya kegiatan sosial ekonomi serta masih adanya kesenjangan antar wilayah, memerlukan pengembangan infrastruktur secara terpadu, integral dan lintas sektor yang sinergis dengan rencana tata ruang.

Belum optimalnya kondisi infrastruktur di Kabupaten Klaten dalam mengimbangi dinamika kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta wilayah, berimplikasi pada beban masyarakat dalam penyediaan produksi, dan mobilisasi sumberdaya. Selain itu, pengembangan dan pembenahan sarana transportasi publik juga menjadi hal penting guna mengurangi beban arus distribusi dan akan berefek domino pada koneksitas antar wilayah yang semakin kuat.

Pembangunan infrastruktur sumberdaya air diarahkan untuk mewujudkan air sebagai *collective goods*. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk kepentingan produksi dan konsumsi secara efektif dilakukan melalui perlindungan terhadap kawasan resapan air di daerah hulu dengan tetap memperhatikan keberlanjutan sumber-sumber air tersebut. Selain itu, pembangunan jaringan irigasi yang menunjang peningkatan produktivitas pertanian juga menjadi hal penting untuk tetap dilakukan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan di Klaten.

Pengembangan infrastruktur teknologi informasi juga menjadi hal penting dan menjadi bagian dari pembangunan infrastruktur secara utuh dan berkelanjutan. Namun demikian, pertumbuhan dan kegiatan sosial ekonomi juga



perlu mempertimbangkan kemampuan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar dapat menjamin keutuhan lingkungan hidup guna menjaga keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan akan datang. Pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk pengendalian pencemaran dan penanganan kerusakan lingkungan hidup melalui upaya rehabilitasi dan pemulihan sumber daya alam.

d. Pendidikan dan Kesehatan

Isu belum optimalnya penanaman nilai-nilai moralitas, budi pekerti dan integritas diibaratkan bahwa pendidikan memiliki dua mata pisau, di satu sisi berorientasi pada kecerdasan dan iptek guna kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan jasmaniah, di sisi lain berorientasi pada kecerdasan emosional dan spiritual guna kedamaian hidup, solidaritas dan kepedulian sosial.

Penunjang sisi yang pertama adalah adanya kesempatan dalam memperoleh pendidikan, sarana dan prasarana yang memadai, serta tenaga kependidikan yang berkualitas. Kesempatan yang sama tersebut berlaku baik laki-laki-perempuan, tua-muda, kaya maupun miskin, yang artinya bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Menuju pendidikan Wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Klaten, Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembangunan gedung dan prasarana lainnya, merupakan contoh riil perhatian pemerintah terhadap pendidikan. Agar pendidikan bisa bermanfaat, kurikulum pendidikan juga harus mempertimbangkan kebutuhan dunia usaha dan spesifikasi potensi setiap pelaku/siswa.

Penunjang sisi yang kedua adalah pembentukan karakter manusia yang berbudi, agar mampu memilih yang baik, menghindari/mencegah perilaku yang salah. Sehingga perlunya pendidikan untuk semua, dan peningkatkan moralitas menjadi upaya sinergis untuk menciptakan Kabupaten yang maju dan berdaya saing.

Percepatan pelaksanaan SDG"s dan pencapaian target indikator kinerja SPM Kesehatan belum tercapai. Angka kematian bayi dan balita, status Gizi masyarakat, endemi Demam Berdarah, Flu Burung dan Chikungunya, angka kesakitan dan kematian diabetes militus, kardiovaskuler dan keganasan (kanker), kebiasaan merokok serta pola hidup tidak sehat lainnya menjadi sebagian dari masalah yang harus ditangani.

Kesehatan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi, jaminan pelayanan kesehatan yang memuaskan bagi semua warga negara. Subsidi silang pun harus disadari oleh semua pengguna layanan kesehatan bahwa tanggung jawab pembangunan tidak hanya pada pemerintah, tetapi seluruh komponen masyarakat/swasta sesuai dengan kemampuannya.



e. **Tata kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi**

Isu reformasi birokrasi selama ini belum menyentuh akar permasalahan peningkatan pelayanan publik, dalam hal memperbaiki tata pemerintahan yang mencakup seluruh aspek manajemen (perencanaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur, pelaporan dan pertanggungjawaban) dengan pengertian:

- Dalam sistem perencanaan, kebijakan harus sinergis sejalan dengan kebutuhan dan kemampuan, terukur, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Dalam hal kelembagaan, organisasi pemerintah daerah dibentuk secara ramping namun mampu mencakup keseluruhan urusan/kepentingan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, jelas, tidak tumpang tindih dan memungkinkan kemudahan akses pelayanan terhadap publik.
- Penanganan berbagai permasalahan pemerintahan dan pembangunan (Penegakan Peraturan Daerah, dan Pencegahan Korupsi) yang sangat kompleks membutuhkan penempatan aparatur yang sesuai baik secara kualitas kompetensi maupun kuantitasnya. Pembinaan terhadap aparatur mesti terus dilakukan agar mampu menyikapi dinamika yang terjadi, responsif dengan dedikasi dan integritas yang tinggi untuk semata-mata kepentingan umum. Selain itu, pembangunan juga membutuhkan aparatur dengan daya inisiasi dan inovasi yang baik untuk dapat mengejar ketertinggalan dan mengatasi keterpurukan atas kemiskinan dan instabilitas yang terjadi.
- Kelemahan SKPD dalam pelaporan dan pertanggungjawaban biasanya terletak dalam kemampuan penyediaan data, analisa dan model laporan yang tidak simpel. Kesadaran akan pentingnya data yang lengkap dan akurat hingga kearsipan sebagai dokumen pembuktian harus ditingkatkan.
- Isu tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik selama ini masih adanya masyarakat belum sejahtera, padahal azas dasar tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan publik.
- Sehingga berbagai kebijakan pemerintah yang dikeluarkan dan harus dilaksanakan dalam rangka menyikapi tuntutan tersebut. Standar pelayanan (SPM, SPP, SOP) harus diterapkan, baik yang menyangkut sarana-prasarana, mekanisme/prosedur, SDM, keterbukaan informasi dan lain-lain. Kemudahan perizinan, transparansi/kejelasan SOP, tidak adanya pungutan liar dan iklim yang kondusif, akan sangat menunjang kegairahan dalam berinvestasi.



f. Lingkungan Hidup dan Bencana Alam

Menurunnya tingkat kesuburan tanah dan kerusakan lingkungan hidup di kawasan penambangan bahan galian golongan C, dan menurunnya daya dukung lingkungan, kelestarian fungsi adalah sebagai akibat kurangnya pengendalian para pemangku-kepentingan dalam pemanfaatan, dan penataan struktur ruang. Kesalahan dalam tata guna lahan, bangunan, rumah tidak layak huni, lingkungan pemukiman kumuh utamanya pada kawasan padat, penghijauan dan resapan air ke tanah serta penertiban perijinan perlu makin diperhatikan.

Dampak dari kesalahan tersebut akan meningkatnya potensi kerusakan lingkungan dan bencana non alam, bencana alam dan bencana sosial, menuntut kesiap-siagaan penanganan bencana dan dukungan sarana-prasarana makin dibutuhkan. Terutama perlunya pengelolaan Sumber daya alam dan lingkungan yang selaras dengan daya dukung dan daya tampung, mendesak hal yang mendesak untuk dilakukan.

g. Pangan dan Energi

Isu lahan pangan berkelanjutan mencuat, karena penggunaan lahan di Kabupaten Klaten setiap tahunnya selalu berkurang seiring dengan penambahan jumlah penduduk, aktifitas penduduk dan perluasan kegiatan perekonomian. Perubahan tata guna lahan dari tanah pertanian berubah ke non pertanian, mengingat Kabupaten Klaten dinyatakan sebagai daerah penyangga pangan, maka perlindungan lahan pangan berkelanjutan dan kebutuhan untuk mempertahankan posisi sawah lestari menjadi mendesak. Adapun sawah lestari ditetapkan seluas 32.451 Ha yang tersebar di wilayah Kabupaten Klaten.



2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan bagian penting dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena menjadi dasar pemikiran dalam penajaman dan penyelarasan antara visi, misi dan arah pembangunan daerah. Penyajian analisis dalam bagian permasalahan pembangunan yang mengawali bagian analisis isu-isu strategis, diharapkan akan dapat menjelaskan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2016-2021.

2.1.1 Visi dan Misi

Visi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya dalam Pasal 1, angka 12

disebutkankan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Sehingga rumusan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 adalah: *"Indonesia yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur"*.

Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, dengan Visi: *"Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestari"*.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 adalah: *"Terwujudnya Masyarakat Klaten Sejahtera Yang Berketuhanan, Cerdas, Mandiri dan Berbudaya"*.

Belajar dari sejarah, dan berangkat dari potensi dan peluang yang dimiliki, serta untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar

BAB II PERENCANAAN KINERJA, berisi :
2.1 Rencana Strategis
2.2 Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2019
2.3 Pentahapan dan Program Prioritas Tahun 2019



Dasar Filosofi Misi RPJMD Kab. Klaten Tahun 2016–2021, yakni:

- Pertama* : **Redi - tinamping**, artinya seorang pemimpin harus bisa aju-ajer dengan masyarakat.
- Kedua* : **Jiwan - danarta**, artinya seorang pemimpin harus mampu membaca tanda-tanda zaman. Rumusan RPJM yang kita susun, tak lebih sebagai aktualisasi diri membaca tanda-tanda zaman.
- Ketiga* : **Lit - ginelar**, artinya dalam mengambil keputusan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Itulah mengapa perlunya Musrenbangda RPJM.
- Keempat* : **Pitraya - inyika**, artinya jiwa pengabdian seorang pemimpin harus dilandasi adanya semangat untuk melayani. Itulah maknanya semangat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten diwajibkan fokus pada urusan pelayanan dasar.
- Kelima* : **Andaya - wilang**, artinya seorang pemimpin jangan mengumbar janji, dan memelihara rasa "ewuh pakewuh" tetapih fokus pada tujuan semula, dalam bahasa Permendagri: aspek kesejahteraan, pelayanan publik, dan daya saing daerah harus tetap sebagai arah kebijakan pembangunan daerah.
- Keenam* : **Surya - sribhawanti**, artinya kehadiran negara harus menjadi pelindung peradapan.
- Ketujuh* : **Rohartaya**, artinya selalu harus insaf dan tawakal.
- Kedelapan* : **Traju - tresna**, artinya arif dan bijaksana

14

dokumen perencanaan, maka visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 adalah:

MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING

Adapun beberapa penjelasan terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Klaten**, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. **Maju**, yang dimaksud maju adalah kondisi bahwa masyarakat Kabupaten Klaten dapat tercukupi kebutuhan hidupnya secara adil dan merata, baik *kebutuhan lahiriah* yang meliputi: sandang, pangan, papan, dan kesehatan, maupun *kebutuhan batiniah* yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai.
3. **Mandiri**, yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten mampu bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerjasama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan.
4. **Berdaya saing**, yang dimaksud berdaya saing adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten yang ingin dituju adalah masyarakat yang tidak tergantung pada pihak lain dan memiliki keunggulan komparatif.

Misi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan visi.

Sedangkan Misi Pembangunan Daerah sebagai implementasi Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016-2021 yang dirumuskan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya;

- Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
- Misi 3 : Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal;
- Misi 4 : Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat;
- Misi 5 : Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah;
- Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian;
- Misi 7 : Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak; dan
- Misi 8 : Meningkatkan kapasitas pelayanan publik.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sementara sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran memuat penjabaran visi dan misi yang lebih terukur dalam jangka waktu perencanaan, serta memuat besaran-besaran kuantitatif yang menterjemahkan rumusan tujuan. Sehingga adanya rumusan sasaran diharapkan dapat membantu dan memandu dalam mempermudah perumusan indikator kinerja.

Guna mewujudkan visi dan misi pembangunan tersebut, maka pembangunan jangka menengah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 memiliki tujuan, sasaran, dan arah kebijakan yang dijabarkan sebagai berikut:

Misi 1

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berbudaya

Misi ini didukung dengan 6 (enam) tujuan, yaitu:

- Tujuan 1 : Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat.
 - Sasaran 1 : Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal.



- Tujuan 2 : Mewujudkan kualitas derajat kesehatan masyarakat.
 Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian, angka kesakitan dan kecacatan.
 Sasaran 2 : Menurunnya angka kelahiran (Total Fertility Rate)
 Sasaran 3 : Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitkan oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit.
- Tujuan 3 : Menurunkan tingkat kemiskinan.
 Sasaran 1 : Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM.
- Tujuan 4 : Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk.
 Sasaran 1 : Menurunnya angka kelahiran (*Total Fertility Rate*).
- Tujuan 5 : Meningkatkan Peran Serta, Kesadaran dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Hidup Sehat, Berprestasi dan Berbudaya.
 Sasaran 1 : Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.
 Sasaran 2 : Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya.
- Tujuan 6 : Meningkatkan minat baca masyarakat.
 Sasaran 1 : Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan.

Misi 2

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Misi ini didukung dengan 4 (empat) tujuan, yaitu:

- Tujuan 1 : Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.
 Sasaran 1 : Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah.
 Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah.
 Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD.
 Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.
- Tujuan 2 : Meningkatkan pengelolaan dan penataan arsip daerah
 Sasaran 1 : Meningkatnya tata kelola arsip SKPD.
- Tujuan 3 : Meningkatkan tata kelola kelembagaan desa dan pembinaan administrasi pemerintahan desa
 Sasaran 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel
- Tujuan 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
 Sasaran 1 : Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.



- Sasaran 2 : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah.
- Sasaran 3 : Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM .
- Sasaran 4 : Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan.
- Sasaran 5 : Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel.
- Sasaran 6 : Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan.
- Sasaran 7 : Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang perekonomian.
- Sasaran 8 : Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat.

Misi 3

Meningkatkan dan Mengembangkan Ekonomi Daerah yang Lebih Produktif, Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Potensi Lokal;

Misi ini didukung dengan 5 (lima) tujuan, yaitu:

- Tujuan 1 : Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya saing untuk kesejahteraan Masyarakat.
 - Sasaran 1 : Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
- Tujuan 2 : Meningkatkan pemberdayaan dan perekonomian yang produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing serta mengoptimalkan jaringan penanggulangan kemiskinan di desa.
 - Sasaran 1 : Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan.
- Tujuan 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat.
 - Sasaran 1 : Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata.
 - Sasaran 2 : Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM.
 - Sasaran 3 : Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah.
 - Sasaran 4 : Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal.
- Tujuan 4 : Menurunkan tingkat pengangguran terbuka
 - Sasaran 1 : Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor Ketenagakerjaan.
 - Sasaran 2 : Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan.
- Tujuan 5 : Meningkatkan daya saing produk industri daerah.
 - Sasaran 1 : Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian.



Misi 4

Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Publik dan Penyediaan Kebutuhan Sarana Prasarana Dasar Sosial Masyarakat;

Misi ini didukung dengan 1 (satu) tujuan, yaitu:

- Tujuan 1 : Meningkatkan pemenuhan infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat.
 - Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat.
 - Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan.
 - Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman.

Misi 5

Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan dan Kelestarian Sumber Daya Alam yang Selaras dengan Tata Ruang Wilayah;

Misi ini didukung dengan 2 (dua) tujuan, yaitu:

- Tujuan 1 : Meningkatkan kelestarian sumber daya alam.
 - Sasaran 1 : Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang.
 - Sasaran 2 : Terjaganya kualitas lingkungan hidup.
- Tujuan 2 : Mewujudkan pengurangan resiko bencana.
 - Sasaran 1 : Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana.

Misi 6

Mewujudkan Tatahidupan Masyarakat yang Berakhlak dan Berkepribadian;

Misi ini didukung dengan 3 (tiga) tujuan, yaitu:

- Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang mempunyai jati diri dan berwawasan kebangsaan.
 - Sasaran 1 : Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi.
- Tujuan 2 : Meningkatkan pengembangan sosial budaya dan lembaga kemasyarakatan.
 - Sasaran 1 : Meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya.
- Tujuan 3 : Menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
 - Sasaran 1 : Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.



Misi 7

Meningkatkan Kapasitas Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak;

Misi ini didukung dengan 1 (satu) tujuan, yaitu:

- Tujuan 1 : Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan dan kualitas pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus anak.
Sasaran 1 : Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak.

Misi 8

Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Publik;

Misi ini didukung dengan 2 (dua) tujuan, yaitu:

- Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas layanan masyarakat.
Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas layanan perhubungan.
Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.
Sasaran 3 : Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas.
- Tujuan 2 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi.
Sasaran 1 : Pengembangan ketransmigrasian.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, selanjutnya dirumuskan IKU (indikator kinerja utama) Kabupaten Klaten sebagai ukuran keberhasilan untuk mencapai tujuan, dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) dari berbagai program prioritas sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah.

Perumusan IKU Kabupaten Klaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021. Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Adapun sasaran strategis Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana Tabel 2.1



Tabel 2.1
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	
(1)	(2)	(3)	
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	1.1	Prosentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan
		1.2	Prosentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian , Angka Kesakitan dan Kecacatan	2.1	Kasus kematian Ibu
		2.2	Angka Kematian Bayi
		2.3	Angka kematian Balita
		2.4	Prevalensi Gizi Buruk (BB/U)
3	Menurunnya Angka Kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)	3.1	Angka Kelahiran (Total Fertility Rate) / TFR
4	Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitkan oleh Masyarakat Dan Menurunnya Angka Kematian di Rumah Sakit.	4.1	Usia Harapan Hidup
5	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	5.1	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
		5.2	Persentase Penguatan Kapasitas PSKS
		5.3	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
6	Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.	6.1	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda
		6.2	Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga
7	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya.	7.1	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya
		7.2	Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan
8	Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	8.1	Prosentase Kenaikan Kunjungan Masyarakat
9	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah	9.1	Indeks Profesionalitas ASN
10	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	10.1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
11	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	11.1	Persentase Raperda yang Disahkan Tepat Waktu
12	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	12.1	Tingkat Konsistensi dan Ketepatan Waktu Perencanaan
13	Meningkatnya Tata Kelola Arsip SKPD	13.1	Prosentase kenaikan SKPD Mengelola Arsip Secara Baku
14	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Profesional, Transparan dan Akuntabel	14.1	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel
15	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	15.1	Level Maturitas SPIP
		15.2	Level Kapabilitas APIP
		15.3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
16	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan	16.1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	
(1)	(2)	(3)	
	Pemerintahan Umum dan otonomi daerah		Pemerintahan Daerah (EKPPD)
17	Meningkatnya Koordinasi Penataan Peraturan Perundang Undangan Serta Bantuan Hukum dan HAM	17.1	Persentase Tercapainya Penyusunan
		17.2	Produk Hukum dan Penanganan Perkara
18	Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	18.1	Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)
19	Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Kredibel	19.1	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik yang Sesuai Regulasi
20	Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi Bidang Kehumasan dan Keprotokolan	20.1	Persentase Publikasi Kebijakan dan Kegiatan Kepala Daerah
		20.2	Persentase Dokumentasi Kegiatan Kepala Daerah
		20.3	Persentase Pelayanan Keprotokolan Kegiatan Kepala Daerah
21	Meningkatnya Fasilitasi dan Pengawasan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian	21.1	Tingkat Inflasi YoY
22	Meningkatnya Koordinasi Kesejahteraan Rakyat	22.1	Persentase Keterlibatan Stakeholder Dalam Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesra
23	Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	23.1	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
24	Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	24.1	Prosentase Desa yang Memiliki LEM, LED dan Posyantek
25	Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata	25.1	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata
26	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	26.1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
		26.2	Persentase UMKM yang Memiliki Daya Saing
27	Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah	27.1	Prosentase Inovasi yang Diterapkan
28	Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Penanaman Modal	28.1	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (PMDN/PMA)
		28.2	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi (PMDN/PMA)
29	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor Ketenagakerjaan	29.1	Rasio Penduduk yang Bekerja
		29.2	Angka Partisipasi Angkatan Kerja
30	Meningkatnya Perlindungan Sektor Ketenagakerjaan	30.1	Besaran Pekerja/ Buruh Yang Menjadi Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan
31	Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas, dan Daya Saing Sektor Perindustrian	31.1	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB
		31.2	Persentase IKM yang Memiliki Daya Saing
32	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	32.1	Indeks Layanan Infrastruktur
33	Meningkatnya kualitas manajemen	33.1	Tingkat Pelayanan Infrastuktur Perhubungan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	
(1)	(2)	(3)	
	rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan		
34	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	34.1	Indeks Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman
35	Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Konsep Tata Ruang	35.1	Ketaatan Terhadap RTRW
36	Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup	36.1	Indeks Kualitas Air
		36.2	Indeks Kualitas Udara
		36.3	Indeks Tutupan Vegetasi (lahan)
37	Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Resiko Bencana	37.1	Kelas Indeks Kapasitas Bencana
38	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	38.1	Indeks Demokrasi
39	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	39.1	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)
40	Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.	40.1	Indeks ketertiban masyarakat
41	Meningkatnya Kapasitas Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak	41.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
		41.2	Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)
42	Meningkanya Kualitas Layanan Perhubungan	42.1	Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan
43	Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	43.1	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat
44	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas	44.1	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
45	Pengembangan Ketransmigrasian	45.1	Persentase Besaran Peningkatan Minat Transmigrasi

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Klaten 2016-2021.

2.1.3 Pentahapan dan Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk mewujudkan visi bupati terpilih pada periode Tahun 2016-2021 yakni *Mewujudkan Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing* dengan menetapkan 8 (delapan) butir misi sebagai penjabaran atas visi dalam rangka perwujudan *ultimate goal*. Maka agar *ultimate goal* ini jelas sasarannya, dan dapat diimplementasikan perlu disusun pentahapan pembangunan daerah sebagai *milestone* (sasaran antara) dalam mewujudkan visi.

Gambaran tema/agenda pembangunan dari tahun 2017-2021 dapat disajikan dalam Diagram 2.1.



TEMA/AGENDA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017-2020

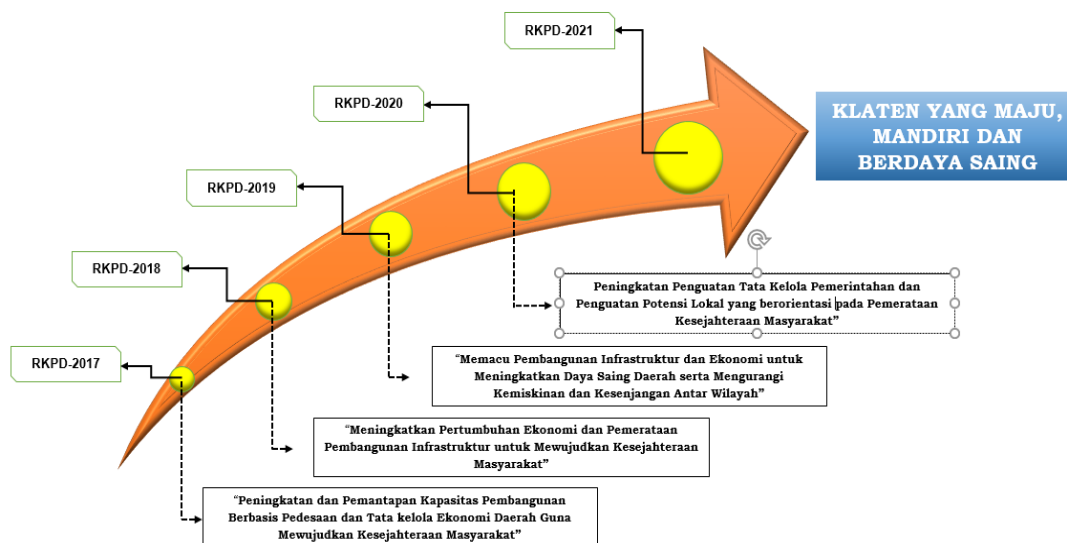
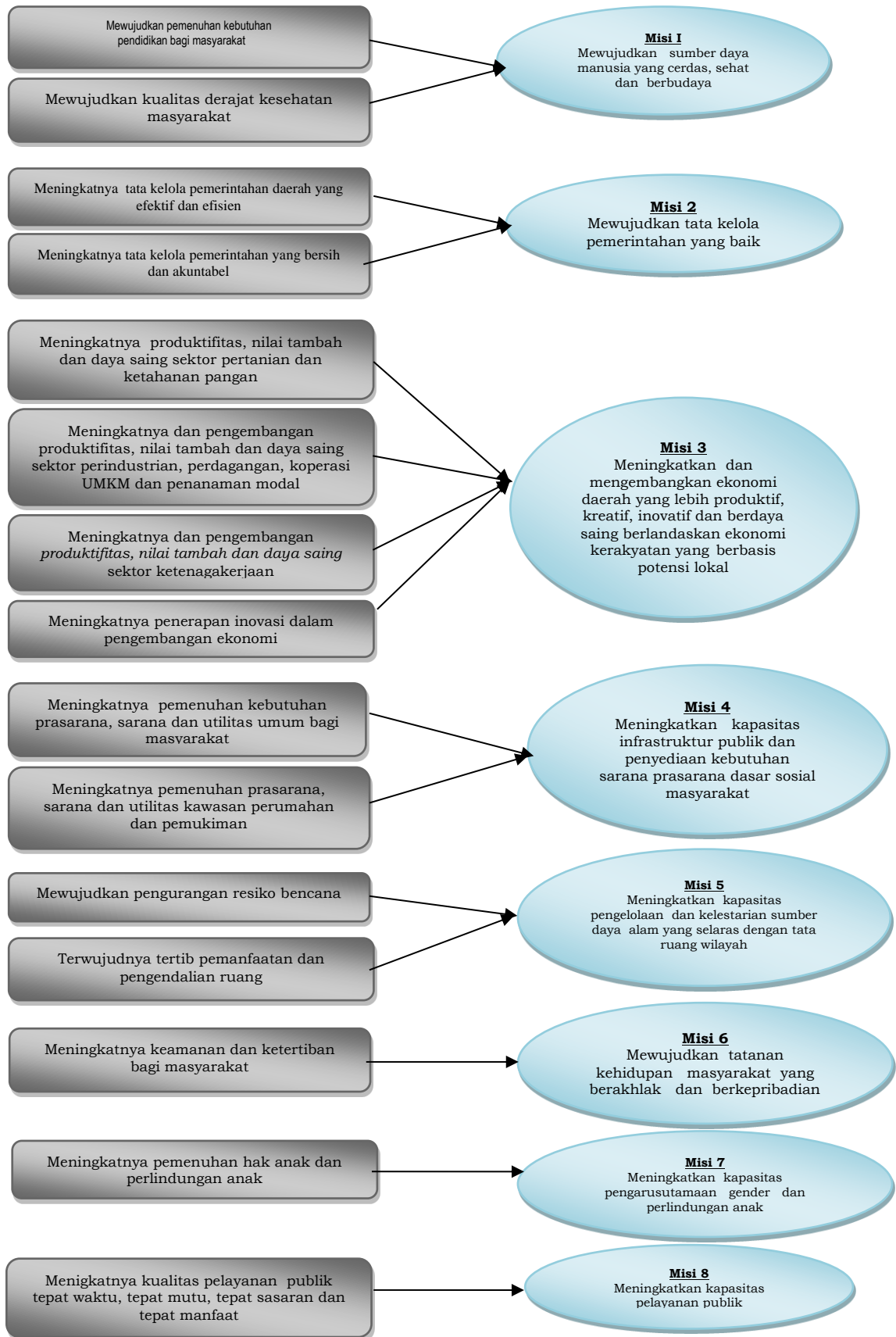


Diagram 2.1. Tema/Agenda Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

Mendasarkan pada arah tema/agenda pembangunan tersebut, perlu dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan daerah yang disusun dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Klaten untuk setiap tahunnya. Sedangkan korelasi antara Tujuan dan Misi Pembangunan Daerah disajikan pada Diagram 2.2.

Diagran 2.2 Korelasi antara Tujuan dan Misi Pembangunan Daerah



2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019

Program Prioritas sebagaimana tersebut di atas, untuk memberi gambaran yang lebih sistematis dan terukur ditentukanlah target kinerja pencapaian sasaran dalam jangka menengah. Hal ini dimaknai, bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis.

Berangkat dari pengertian ini, maka Perjanjian Kinerja dimaknai sebagai lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program prioritas yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja diharapkan tercipta sinergisitas antara pemberi mandat dan penerima amanah untuk sama-sama mewujudkan target kinerja yang telah disepakati.

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ditetapkan mengacu pada RPJMD, RKPD 2019, IKU dan APBD. Adapun Perjanjian Kinerja Kabupaten Klaten Tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.2.

Tabel 2.2.

Perjanjian Kinerja Kabupaten Klaten Tahun 2019

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja Utama (3)		Satuan (4)	Target (5)
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	1.1	Prosentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	50
		1.2	Prosentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	85
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan	2.1	Kasus kematian Ibu	Kasus	16
		2.2	Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	10,11
		2.3	Angka kematian Balita	per 1000 KH	1,65
		2.4	Prevalensi gizi buruk (BB/U)	%	0,72
3	Menurunnya angka kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)	3.1	Angka Kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)/TFR	Indeks	2,14
4	Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitkan oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit.	4.1	Usia Harapan Hidup	Tahun	76,22
5	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	5.1	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	85
		5.2	Persentase penguatan kapasitas PSKS	%	97
		5.3	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	13,1
6	Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.	6.1	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda	%	10
		6.2	Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga	%	5

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
7	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya.	7.1	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	%	6
		7.2	Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	10
8	Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	8.1	Prosentase kenaikan kunjungan masyarakat	%	5
9	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	9.1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	84,07
10	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	10.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WDP
11	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	11.1	Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu	%	85
12	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	12.1	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan	%	100
13	Meningkatnya tata kelola arsip SKPD	13.1	Prosentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku	%	5
14	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	14.1	Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	%	72
15	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	15.1	Level Maturitas SPIP	Tingkat	3
		15.2	Level Kapabilitas APIP	Tingkat	3
		15.3	Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah	Angka	66 (B)
16	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah	16.1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Angka	3
17	Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	17.1	Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara	%	90
		17.2	Indeks kabupaten peduli HAM	%	80
18	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	18.1	Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)	%	90
19	Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	19.1	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi	%	100
20	Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan	20.1	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah	%	96
		20.2	Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah	%	96
		20.3	Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah	%	96
21	Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang perekonomian	21.1	Tingkat Inflasi YoY	%	3,5 (± 1)
22	Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat	22.1	Persentase keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra	%	95
23	Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan	23.1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	12,3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
	ekonomi daerah				
24	Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	24.1	Prosentase desa yang memiliki LEM, LED dan posyantek	%	42
25	Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata	25.1	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata	%	25
26	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	26.1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	19,12
		26.2	Persentase UMKM yang memiliki daya saing	%	11
27	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	27.1	Prosentase inovasi yang diterapkan	%	81,82
28	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	28.1	Rasio daya serap tenaga kerja (PMDN/PMA):		
			PMDN	%	438
			PMA	%	294
		28.2	Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA):		
			PMDN	%	2,2
PMA	%	2,5			
29	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor Ketenagakerjaan	29.1	Rasio penduduk yang bekerja	%	1,05
		29.2	Angka partisipasi angkatan kerja	%	69
30	Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan	30.1	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	87,9
31	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	31.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	34,98
		31.2	Persentase IKM yang memiliki daya saing	%	6,5
32	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	32.1	Indeks layanan infrastruktur	Indeks	37,19
33	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	33.1	Tingkat Pelayanan Infrastuktur Perhubungan	Tingkat	47,41
34	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	34.1	Indeks kualitas perumahan dan kawasan pemukiman	Indeks	73,75
35	Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang	35.1	Ketaatan terhadap RTRW	%	79,2
36	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	36.1	Indeks kualitas air	Indeks	35,57
		36.2	Indeks kualitas udara	Indeks	79,57
		36.3	Indeks tutupan vegetasi (lahan)	Indeks	53,71
37	Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana	37.1	Kelas Indeks kapasitas bencana	Indeks	Sedang
38	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	38.1	Indeks demokrasi	Indeks	77
39	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	39.1	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	Klpk	66

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
40	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	40.1	Indeks ketertiban masyarakat	Indeks	97
41	Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak	41.1	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	Indeks	60,23
		41.2	Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kelas	Nidya
42	Meningkanya kualitas layanan perhubungan	42.1	Indeks kepuasan layanan perhubungan	Indeks	80,05
43	Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	43.1	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Indeks	80
44	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	44.1	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Indeks	sdh
45	Pengembangan ketransmigrasian	45.1	Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi	%	41

2.3 Program Pendukung Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya untuk mencapainya kemudian dijabarkan kedalam program prioritas untuk mendukung tercapainya pembangunan jangka menengah Daerah. Adapun program prioritas untuk mendukung tercapainya sasaran, sebagaimana Tabel 2.3.

Tabel 2.3.

Program Pendukung Pencapaian Sasaran

No	Sasaran Strategis	Jumlah Program Pendukung
(1)	(2)	(3)
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	5
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian, angka kesakitan dan kecacatan	12
3	Menurunnya angka kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>).	9
4	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	4
5	Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakit oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit.	2
6	Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.	5
7	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar	4

No	Sasaran Strategis	Jumlah Program Pendukung
(1)	(2)	(3)
	Budaya.	
8	Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	1
9	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	2
10	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	1
11	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	1
12	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	5
13	Meningkatnya tata kelola arsip SKPD	3
14	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	3
15	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	5
16	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah	9
17	Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	2
18	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	1
19	Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	1
20	Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan	5
21	Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang perekonomian	0
22	Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat	3
23	Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	12
24	Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	2
25	Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata	3
26	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	6
27	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	1
28	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	2
29	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor Ketenagakerjaan	2
30	Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan	1
31	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	2



No	Sasaran Strategis	Jumlah Program Pendukung
(1)	(2)	(3)
32	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	5
33	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	4
34	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	8
35	Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang	3
36	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	6
37	Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana	4
38	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	2
39	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	3
40	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	5
41	Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak	4
42	Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	1
43	Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	0
44	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	1
45	Pengembangan ketrasmigrasian	2
Jumlah		162





Pembangunan berbasis kinerja menuntut adanya pencapaian target sasaran strategis jangka menengah Daerah yang telah ditetapkan. Sehingga pembangunan berbasis kinerja, sesungguhnya upaya untuk mencapai efisiensi pelaksanaan program/kegiatan dan sumber daya anggaran yang diukur dari keluaran, hasil maupun dampak.

Sehingga pendekatan pembangunan berbasis kinerja akan sejalan dengan upaya untuk mewujudkan prinsip *good governance* dengan mengedepankan akuntabilitas sejauh mana instansi Pemerintah telah memenuhi tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan publik.

Oleh karena itu pentingnya pengendalian dan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan untuk memastikan bahwa kinerja yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pembangunan, dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Salah satu dasar rujukan yang diacu adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pentunjuk Teknis Penyusunan Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja. Juga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, terutama terkait dengan penentuan skala nilai peringkat kinerja sebagai bahan penilaian dari masing-masing sasaran strategis. Adapun skala skala nilai peringkat kinerja sebagaimana dimaksud, dapat disajikan pada Tabel 3.1.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA,
berisi :
3.1 Capaian Kinerja Organisasi
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja
3.3 Akuntabilitas Anggaran



Tabel 3.1.

Skala Nilai Peringkat Kinerja Progresif

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,01\%$	Sangat Tinggi	
2	$75,01\% \leq 90,00\%$	Tinggi	
3	$65,01\% \leq 75,00\%$	Sedang	
4	$50,01\% \leq 65,00\%$	Rendah	
5	$\leq 50,00\%$	Sangat Rendah	

Sumber : Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten

Tabel 3.2.

Skala Nilai Peringkat Kinerja Regresif

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
	$\leq 99,99$	Tercapai	
2	≥ 100	Tidak Tercapai	

Sumber : Bagian Organisasi Kabupaten Klaten

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Mengacu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, capaian indikator kinerja organisasi yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2019 sebagaimana Tabel 3.3.



Tabel 3.3.

Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	1.1	Prosentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	50	98,28	196,56
		1.2	Prosentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	85	85,09	100,11
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan	2.1	Kasus kematian Ibu	Kasus	16	12	75,00
		2.2	Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	10,11	10,01	99,01
		2.3	Angka kematian Balita	per 1000 KH	1,65	1,59	96,36
		2.4	Prevalensi gizi buruk (BB/U)	%	0,72	0,71	98,61
3	Menurunnya angka kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)	3.1	Angka Kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)/TFR	Indeks	2,14	2,1	98,13
4	Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitkan oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit.	4.1	Usia Harapan Hidup	Tahun	76,22	76,67	100,59
5	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	5.1	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	85	62,26	72,75
		5.2	Persentase penguatan kapasitas PSKS	%	97	96	98,9
		5.3	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	13,1	13,09	99,92
6	Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.	6.1	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda	%	10	13	130
		6.2	Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga	%	5	22	440,00
7	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya.	7.1	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	%	6	3,13	52,17
		7.2	Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	10	14,3	143,00
8	Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	8.1	Prosentase kenaikan kunjungan masyarakat	%	5	22,19	443,8
9	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	9.1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	84,07	77,55	92,24
10	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	10.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WDP	WTP	150
11	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	11.1	Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu	%	85	91,31	108,60
12	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	12.1	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan	%	100	100	100
13	Meningkatnya tata kelola arsip SKPD	13.1	Prosentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku	%	5	12,56	251,2
14	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	14.1	Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	%	72	68	94,44



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
15	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	15.1	Level Maturitas SPIP	Tingkat	3	3	100
		15.2	Level Kapabilitas APIP	Tingkat	3	3	100
		15.3	Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah	Angka	66 (B)	61,32 (B)	92,91
16	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah	16.1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Angka	3	3,22	107,33
17	Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	17.1	Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara	%	90	83	92,22
		17.2	Indeks kabupaten peduli HAM	%	80	90	112,50
18	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	18.1	Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)	%	90	81	90,00
19	Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	19.1	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi	%	100	100	100
20	Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan	20.1	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah	%	96	98	102,08
		20.2	Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah	%	96	98	102,08
		20.3	Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah	%	96	98	102,08
21	Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang perekonomian	21.1	Tingkat Inflasi YoY	%	3,5 (± 1)	2,64	75,43
22	Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat	22.1	Persentase keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra	%	95	95	100
23	Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	23.1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	12,3	10,98	89,69
24	Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	24.1	Prosentase desa yang memiliki LEM, LED dan Posyantek	%	42	39	92,86
25	Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata	25.1	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata	%	25	31,96	127,84
26	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	26.1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	19,12	19,98	104,49
		26.2	Persentase UMKM yang memiliki daya saing	%	11	11,45	104,09
27	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	27.1	Prosentase inovasi yang diterapkan	%	81,82	105	128,33



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	
28	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	28.1	Rasio daya serap tenaga kerja (PMDN/PMA):					
			PMDN	%	438	19	4,34	
			PMA	%	294	139	47,28	
		28.2	Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA):					
			PMDN	%	2,2	733	33318,18	
PMA	%	2,5	272	10880,00				
29	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor Ketenagakerjaan	29.1	Rasio penduduk yang bekerja	%	1,05	1,00	95,24	
		29.2	Angka partisipasi angkatan kerja	%	69	81	117,39	
30	Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan	30.1	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	87,9	71,48	81,32	
31	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	31.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	34,98	37,00	105,77	
		31.2	Persentase IKM yang memiliki daya saing	%	6,5	7,6	116,92	
32	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	32.1	Indeks layanan infrastruktur	Indeks	37,19	60,87	163,67	
33	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	33.1	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan	Tingkat	47,41	45,87	96,75	
34	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	34.1	Indeks kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Indeks	73,75	53,76	72,89	
35	Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang	35.1	Ketaatan terhadap RTRW	%	79,2	78,98	100,28	
36	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	36.1	Indeks kualitas air	Indeks	35,57	28,46	80,01	
		36.2	Indeks kualitas udara	Indeks	79,57	82,29	103,42	
		36.3	Indeks tutupan vegetasi (lahan)	Indeks	53,71	83,3	155,09	
37	Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana	37.1	Kelas Indeks kapasitas bencana	Indeks	Sedang (119)	Sedang (123,20)	103,53	
38	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	38.1	Indeks demokrasi	Indeks	77	72,17	93,73	
39	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	39.1	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	Klpk	66	58	87,88	
40	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	40.1	Indeks ketertiban masyarakat	Indeks	97	96	98,97	
41	Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak	41.1	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	Indeks	60,23	60,25	100,03	
		41.2	Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kelas	Nindya (750)	Madya (650)	86,67	
42	Meningkanya kualitas layanan perhubungan	42.1	Indeks kepuasan layanan perhubungan	Indeks	80,05	79,02	98,71	



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
43	Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	43.1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	80	78,37	97,96
44	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	44.1	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Indeks	Sdh (92,70)	Sdh (91,77)	99,00
45	Pengembangan ketransmigrasian	45.1	Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi	%	41	5,2	12,68

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 45 (empat puluh lima) sasaran strategis dengan 67 (*enam puluh tujuh*) Indikator Kinerja Sasaran yang terdiri dari: 60 (*enam puluh*) indikator yang sifatnya progresif, dan 7 (*tujuh*) indikator yang sifatnya regresif. Dari masing-masing indikator diperoleh hasil:

A. Indikator Progresif, dengan hasil:

- a. Sebanyak 49 (empat puluh sembilan) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 81,67% dengan Kriteria ***Sangat Tinggi***;
- b. Sebanyak 5 (lima) atau sebanyak 8,33% dengan Kriteria ***Tinggi***;
- c. Sebanyak 2 (dua) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 3,33% dengan kriteria ***Sedang***;
- d. Sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 1,67% dengan Kriteria ***Rendah***; dan
- e. Sebanyak 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 5,00% dengan Kriteria ***Sangat Rendah***.

Adapun perincian atas hasil pengukuran kinerja, sebagai berikut:

- a) Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria ***Sangat Tinggi*** (atau interval nilai realisasi kinerja $\geq 90,01$) sebanyak 49 (*empat puluh sembilan*) indikator atau 81,67%, diantaranya:
 1. Prosentase Sekolah Dasar yang Memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
 2. Prosentase Sekolah Menengah Pertama yang Memenuhi Standar Nasional;
 3. Usia Harapan Hidup;
 4. Persentase Penguatan Kapasitas PSKS;
 5. Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda;
 6. Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga;
 7. Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan;
 8. Prosentase Kenaikan Kunjungan Masyarakat;
 9. Indeks Profesionalitas ASN;



10. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
11. Persentase Raperda yang Disahkan Tepat Waktu;
12. Tingkat Konsistensi dan Ketepatan Waktu Perencanaan;
13. Prosentase Kenaikan SKPD Mengelola Arsip Secara Baku;
14. Prosentase Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel;
15. Level Maturitas SPIP;
16. Level Kapabilitas APIP;
17. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
18. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD);
19. Persentase Tercapainya Penyusunan Produk Hukum dan Penanganan Perkara;
20. Indeks Kabupaten Peduli HAM;
21. Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik yang Sesuai Regulasi;
22. Persentase Publikasi Kebijakan dan Kegiatan Kepala Daerah;
23. Persentase Dokumentasi Kegiatan Kepala Daerah;
24. Persentase Pelayanan Keprotokolan Kegiatan Kepala Daerah;
25. Persentase Keterlibatan Stakeholder Dalam Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesra;
26. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB;
27. Prosentase Desa yang Memiliki LEM, LED dan Posyantek;
28. Persentase Peningkatan PAD dari Sektor Pariwisata;
29. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB;
30. Persentase UMKM yang Memiliki Daya Saing;
31. Prosentase Inovasi yang Diterapkan;
32. Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi PMDN;
33. Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi PMA;
34. Rasio Penduduk yang Bekerja;
35. Angka Partisipasi Angkatan Kerja;
36. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB;
37. Persentase IKM yang Memiliki Daya Saing;
38. Indeks Layanan Infrastruktur;
39. Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan;
40. Ketaatan Terhadap RTRW;
41. Indeks Kualitas Udara;
42. Indeks Tutupan Vegetasi (lahan);
43. Kelas Indeks Kapasitas Bencana;
44. Indeks Demokrasi;
45. Indeks Ketertiban Masyarakat;
46. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
47. Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan;



48. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat; dan
49. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat;
- b) Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria *tinggi*, atau interval nilai realisasi kinerja **75,01 - 90,00** sebanyak 5 (lima) indikator, diantaranya:
1. Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan;
 2. Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan);
 3. Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)
 4. Indeks Kualitas Air; dan
 5. Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA).
- c) Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria *sedang*, atau interval nilai realisasi kinerja 65,01 - 75,00 sebanyak 2 (dua) indikator, yaitu:
1. Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan
 2. Indeks Kualitas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman;
- d) Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria *rendah*, atau interval nilai realisasi kinerja **50,01 - 65,00** sebanyak 1 (satu) indikator, yaitu: Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya.
- e) Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria *sangat rendah*, atau interval nilai realisasi kinerja $\leq 50,00$ sebanyak 3 (tiga) indikator, diantara:
1. Rasio daya serap tenaga kerja PMDN;
 2. Rasio daya serap tenaga kerja PMA; dan
 3. Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi.

Berdasarkan [Capaian Kinerja Organisasi](#) Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2019 sebagaimana diuraikan di atas, apabila ditarik kesimpulan berdasarkan [Skala Nilai Peringkat Kinerja](#) sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten diperoleh hasil sebagaimana Diagram 3.1.



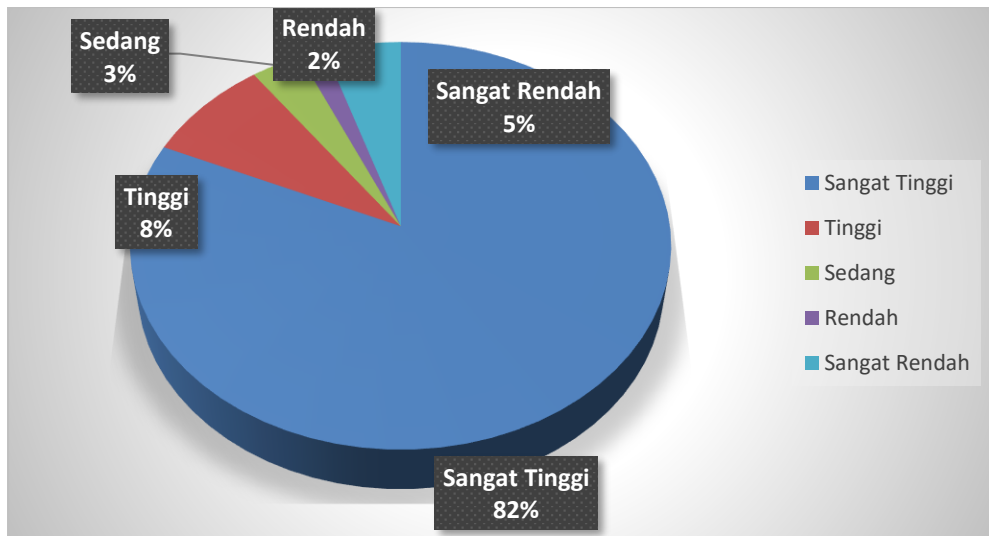


Diagram 3.1 Peringkat Kinerja Progresif

B. Indikator Regresif, dengan hasil:

Indikator regresif dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria **Tercapai (Berhasil Menekan)**, atau interval nilai realisasi kinerja skala $\leq 99,99$ sebanyak 7 (tujuh) indikator, diantaranya:

1. Kasus Kematian Ibu;
2. Angka Kematian Bayi;
3. Angka Kematian Balita; dan
4. Prevalensi Gizi Buruk (BB/U);
5. Tingkat Inflasi YoY;
6. Angka Kelahiran (Total Fertility Rate)/TFR; dan
7. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Berdasarkan Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2019 sebagaimana diuraikan di atas, apabila ditarik kesimpulan berdasarkan Skala Nilai Peringkat Kinerja Regresif maka diperoleh hasil sebagaimana Diagram 3.2.

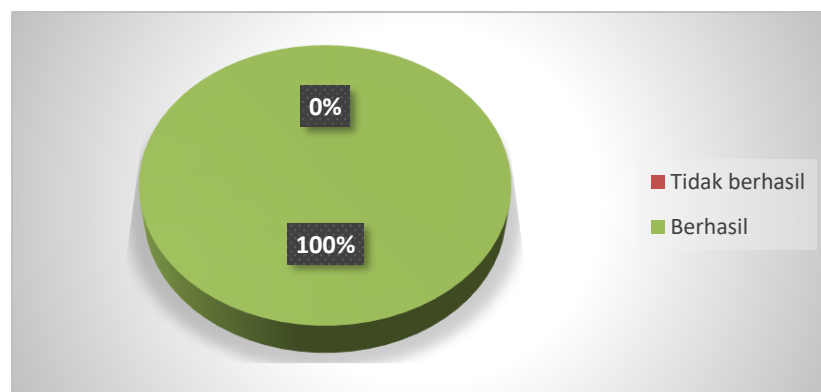


Diagram 3.2 Peringkat Kinerja Regresif

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal.



Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pendidikan menjadi pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten. Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta untuk mewujudkan sasaran pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat didukung dengan Pelaksanaan Pendidikan Sepanjang Hayat di Kabupaten Klaten Tahun 2019 didasarkan pada pencapaian pendekatan 6 (enam) pilar strategis, yakni: 1). Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 2). Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, 3). Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life-skill*), 4). Pendidikan Keaksaraan, 5). Pengarusutamaan Gender, dan 6). Peningkatan Kualitas Pendidikan. Sehingga capaian kinerja Pendidikan Sepanjang Hayat tahun 2019 merupakan gambaran keberhasilan capaian kinerja urusan pendidikan dalam mendukung pencapaian visi-misi pembangunan jangka menengah Daerah.

Adapun capaian sasaran: [Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal](#) sebagaimana Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJM	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Persentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	43	61,05	50	98,28	196,56	55	178,69
2	Persentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	65	82,00	85	85,09	100,11	95	89,57

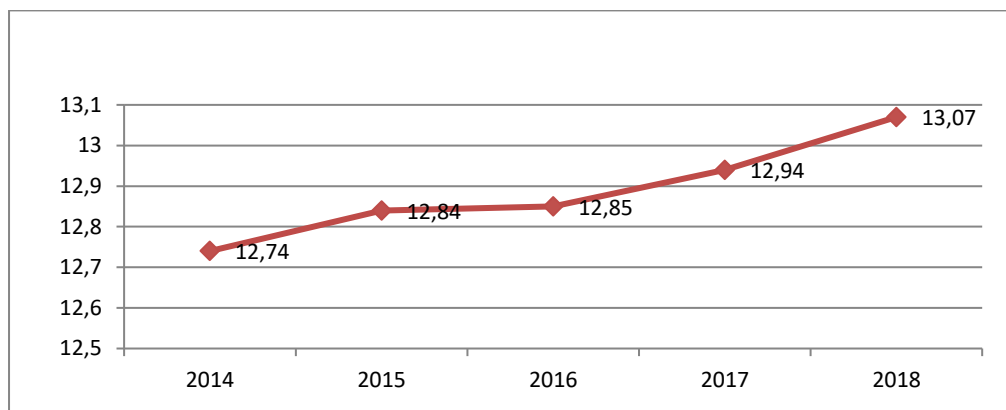
Sumber: Dinas Pendidikan, 2020.



Capaian sasaran kinerja: Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal, sebagaimana tersebut di atas ditunjang beberapa indikator kinerja urusan pendidikan, diantaranya:

1) Angka Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu 2014-2018, yaitu dari sebesar 12,74 pada tahun 2014 menjadi sebesar 13,07 pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan semakin baik pada setiap jenjang pendidikan. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Grafik 3.1.



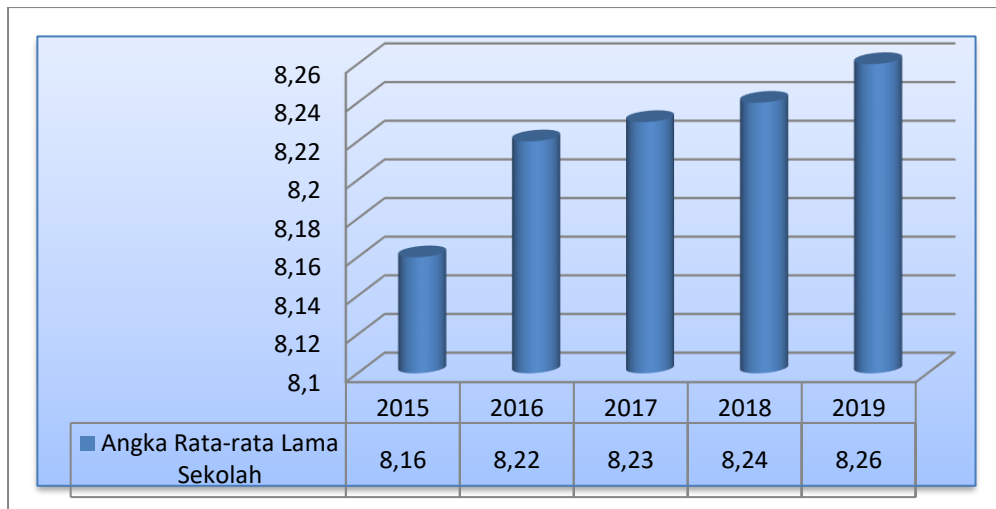
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2020.

Grafik 3.1. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 (Catatan: Angka 2019 belum dirilis)

2) Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu 2015-2019, yaitu dari sebesar 8,16 pada tahun 2015 menjadi sebesar 8,26 pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan untuk memasuki jenjang pendidikan pendidikan lebih tinggi semakin baik. Perkembangan Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klaten tahun 2015-2019 disajikan pada Grafik 3.2.





Sumber: Dinas Pendidikan Kab Klaten, 2020.

Grafik 3.2. Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019.

Perkembangan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2015-2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan khususnya di dua tahun terakhir terjadi kenaikan sebesar 0,02 % dari sebesar 8,16 pada tahun 2015 menjadi sebesar 8,26 pada tahun 2019, hal ini disebabkan intervensi kebijakan Pemerintah Daerah yang berfokus pada intervensi anak usia sekolah untuk mengikuti program wajib pendidikan dasar dengan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

3) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah selama tahun 2015-2019 mengalami perkembangan. Jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A tahun 2015 sudah mencapai 94,53%, seiring dengan perbaikan layanan pendidikan, dan pada tahun 2019 naik menjadi 98,66%. Adapun untuk jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B tumbuh dari 87,58% pada tahun 2015, dan pada Tahun 2019 menjadi 98,46%. Hal ini disebabkan karena keinginan anak usia sekolah pada jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B banyak yang bersekolah dari luar daerah serta ditunjang angka melanjutkan dan proporsi jumlah penduduk anak usia SMP/MTs/SMPLB/Paket B juga meningkat. Secara rinci, perkembangan APK di Kabupaten Klaten selama Tahun 2015-2019 untuk semua jenjang pendidikan disajikan pada Tabel 3.5.



Tabel 3.5.
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
di Kabupaten Klaten Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2015-2019

No	Tahun	SD/MI/SDLB/ Paket A	SMP/MTs/SMP LB/Paket B	SMA/SMK/MA/ SMALB/Paket C
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2015	94,53	87,58	93,06
2	2016	105,23	97,57	81,00
3	2017	97,45	90,93	-
4	2018	102,75	95,21	-
5	2019	98,66	98,46	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2020.

*Catatan: *) Mulai tahun 2017 Urusan Pendidikan Menengah menjadi kewenangan Provinsi.*

4) Angka Partisipasi Murni (APM)

APM untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah selama tahun 2015-2019 mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif. Jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A tahun 2015 sudah mencapai 81,60%, naik menjadi 88,37% pada tahun 2019. Jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B pada tahun 2015 sudah mencapai 63,96% menjadi 73,14% pada tahun 2019 hal ini dipicu adanya anak usia sekolah pada jenjang tertentu ingin sekolah di luar daerah, yang relatif lebih baik dalam layanan penyelenggaraan pendidikannya. Perkembangan APM di Kabupaten Klaten untuk semua jenjang pendidikan dasar disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6.
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
di Kabupaten Klaten Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2015-2019

No	Tahun	SD /MI /SDLB/Paket A	SMP/MTs/SMPLB/
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2015	81,60	63,96
2	2016	91,26	72,77
3	2017	86,84	68,22
4	2018	90,84	64,07
5	2019	88,37	73,14

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2020.

Berdasarkan Tabel 3.6. sebagaimana tersebut di atas, yang mendesak untuk dilakukan adalah perkembangan APM untuk semua jenjang pendidikan sangat dipengaruhi kondisi masyarakat dan layanan pendidikan pada saat-saat tertentu, mengingat Klaten diapit dua kota besar, Yogyakarta dan Solo.



5) Angka Putus Sekolah

Perkembangan angka putus sekolah (APS) selama tahun 2015-2019 untuk semua jenjang pendidikan bersifat fluktuatif. Perkembangan angka putus sekolah di Kabupaten Klaten tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7.

Perkembangan Persentase Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019

Uraian	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
Angka Putus Sekolah Tk. Pendidikan SD/MI	%	0,02	0,03	0,04	0,02	0,01
Angka Putus Sekolah Tk. Pendidikan SMP/MTS	%	0,10	0,08	0,23	0,06	0,05
Angka Putus Sekolah Tk. Pendidikan SMA/MA*)	%	0,73	0,69	Na	Na	Na

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2020.

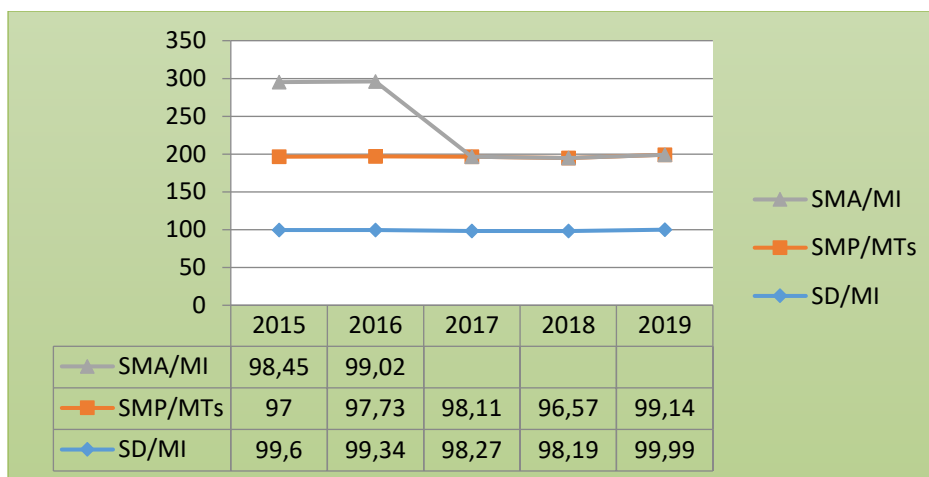
Catatan: *) Mulai tahun 2017 urusan pendidikan menengah menjadi kewenangan Provinsi.

Berdasarkan Tabel 3.7. sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat bahwa angka putus sekolah dua tahun terakhir mengalami penurunan baik untuk angka putus sekolah tingkat SD/MI dari tahun 2018 sebesar 0,02% menjadi 0,01% di tahun 2019, sedangkan untuk angka putus sekolah SMP/MTS dari 0,06% pada tahun 2018 menjadi 0,05% pada tahun 2019, hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan dasar bidang pendidikan dasar sudah terpenuhi dengan adanya program Pemerintah antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

6) Angka Kelulusan (AL)

Angka kelulusan (AL) menunjukkan bobot prestasi kelulusan untuk setiap jenjang penyelenggaraan pendidikan. Adapun kondisi Angka Kelulusan (AL) untuk setiap jenjang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Klaten pada Tahun 2015-2019 bersifat fluktuatif. Perkembangan angka kelulusan tahun 2015-2019 disajikan pada Grafik 3.3.





Sumber: Dinas Pendidikan, 2020.

Grafik 3.3 Angka Kelulusan (AL) Tahun 2015-2019

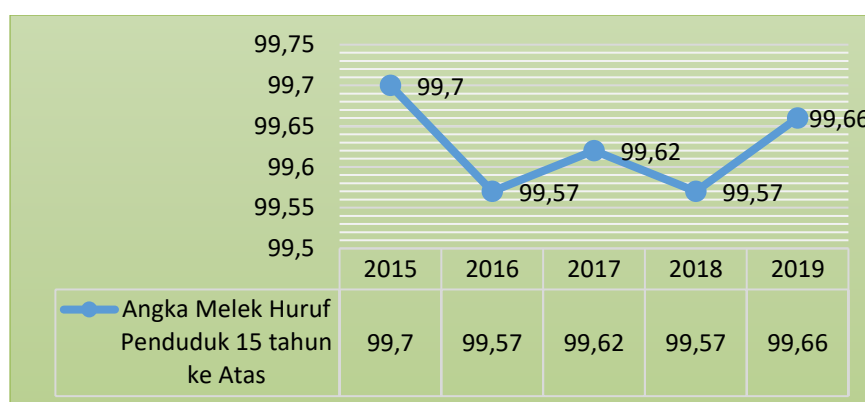
Catatan: *) Mulai tahun 2017 urusan pendidikan menengah menjadi kewenangan Provinsi.

Berdasarkan Grafik 3.3. sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat bahwa angka kelulusan jenjang SD/MI cenderung mengalami penurunan terakhir dari 99,6% pada tahun 2015 menjadi 99,99 % di tahun 2019. Sedangkan untuk jenjang SMP/MTS dari 97 % di tahun 2015 naik menjadi 99,14 % pada tahun 2019.

7) Angka Melek Huruf

Indikator keberhasilan pembangunan urusan pendidikan ditunjukkan dengan kemampuan mengatasi angka buta huruf penduduk usia >15 Tahun ke atas. Beberapa langkah nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten diantaranya dengan melakukan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan.

Angka melek huruf pada penduduk usia lebih dari 15 Tahun ke atas dirumuskan dengan pengertian persentase penduduk usia 15 Tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Adapun perkembangan angka melek huruf penduduk usia >15 Tahun ke atas di Kabupaten Klaten tahun 2014-2018 disajikan pada Grafik 3.4.



Sumber: Dinas Pendidikan, 2020.

Grafik 3.4. Angka Melek Huruf Penduduk Usia >15 Tahun ke atas di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019



Berdasarkan Grafik 3.4. sebagaimana tersebut di atas, angka melek huruf di Kabupaten Klaten pada tiga tahun terakhir mengalami kenaikan, dari 99,62 % di tahun 2017 menjadi 99,66 % di tahun 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa hampir seluruh penduduk Kabupaten Klaten sudah terbebas dari buta huruf.

8) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kurikulum Pendidikan Tahun 2013 mensyaratkan kualifikasi teknis yang semakin tinggi sehingga perlu dibarengi peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Sementara itu perkembangan Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D IV di Kabupaten Klaten tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8.
Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D IV Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019

Uraian	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jenjang Pendidikan SD/ MI	%	79,09	81,99	84,16	87,67	90,32
Jenjang Pendidikan SMP/ MTs	%	92,09	91,51	60,33	91,98	94,17
Jenjang Pendidikan SMA/ MA/ SMK*)	%	96,71	97,06	Na	Na	Na

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2020.

Catatan: *) Mulai tahun 2017 urusan pendidikan menengah menjadi kewenangan Provinsi.

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV selama lima tahun terakhir (Tahun 2015-2019) guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV semakin meningkat, hal ini tidak terlepas dari adanya dana tunjangan profesi guru yang sudah memiliki sertifikat profesi, dan bantuan keuangan dari Pemerintah provinsi untuk meningkatkan kapasitasnya.

Adapun data guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah di SD/MI/, SMP/MTS berkualifikasi S1/D.IV dan bersertifikat Kepala Sekolah tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 3.9.



Tabel 3.9.
Kepala Sekolah yang Memenuhi Kualifikasi SI/D IV/S2 dan Bersertifikat
Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2015-2019

Uraian	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jenjang Pendidikan SD/ MI	%	98,08	98,76	98,27	99,00	99,19
Jenjang Pendidikan SMP/ MTs	%	96,58	96,78	93,55	96,92	97,10
Jenjang Pendidikan SMA/ MA/ SMK*)	%	89,64	97,53	Na	Na	Na

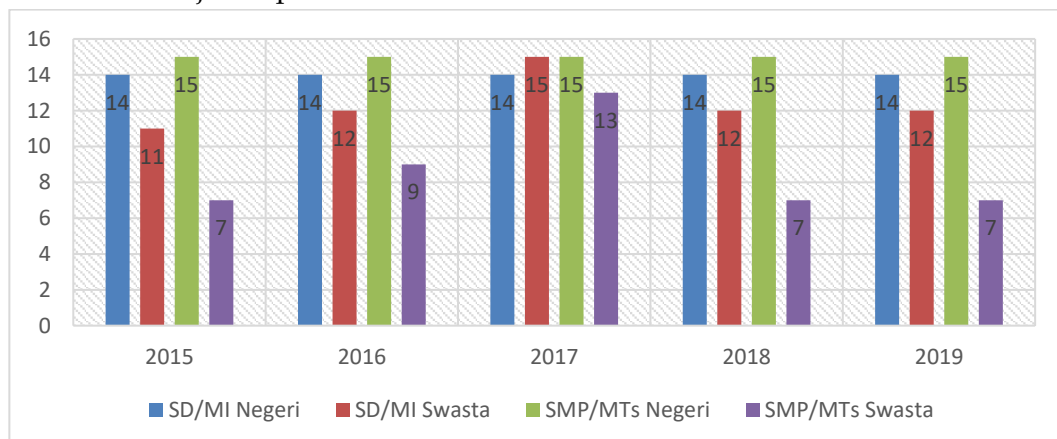
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2020.

Catatan: *) Mulai tahun 2017 urusan pendidikan menengah menjadi kewenangan Provinsi.

Berdasarkan Tabel 3.9. sebagaimana tersebut di atas, terdapat peningkatan jumlah Kepala Sekolah yang Memenuhi Kualifikasi D4/SI dan bersertifikat di jenjang pendidikan SD/MI dari 98,08% pada tahun 2015 menjadi 99,19% di tahun 2019, dan untuk jenjang pendidikan SMP/MTS dari 96,58% pada tahun 2015 menjadi 97,10% pada tahun 2019. Jabatan Kepala Sekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI/SMP/MTS telah memenuhi kualifikasi S1/D4 sesuai standar sistem Pendidikan Nasional. Kepala Sekolah masing-masing telah tercapai 100%. Hal ini menandakan bahwa tingkat mutu guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah yang dipersyaratkan telah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

9) Rasio Guru Terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid berdasarkan jenjang pendidikan pada tahun 2015-2019 disajikan pada Grafik 3.5



Sumber: Dinas Pendidikan, 2020.

Grafik 3.5. Rasio Guru Terhadap Murid untuk Jenjang SD/MI dan SMP/MTS Tahun 2015-2019.



Berdasarkan Grafik 3.5. sebagaimana di atas Rasio Guru Terhadap Murid untuk Jenjang Pendidikan SD/MI Negeri (*Rasionya 1:14*) dan SMP/MTs Negeri (*Rasionya 1:15*) Tahun 2015-2019 angkanya relatif stabil, sedangkan untuk jenjang Pendidikan SD/MI swasta dan SMP/MTs swasta bersifat fluktuatif, hal ini sangat tergantung kondisi sekolah dan akibat kebijakan zonasi sekolah sangat berpengaruh terhadap situasi pilihan siswa dan sikap orang tua/wali murid untuk memilih dan menentukan sekolah yang diminati.

10) Manajemen Pelayanan Pendidikan

Manajemen Pelayanan Pendidikan diukur dengan indikator Angka melanjutkan sekolah dari Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kabupaten Klaten di tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10.
Perkembangan Angka Melanjutkan Sekolah dari SMP/MTs Ke
SMA/MA/SMK Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Melanjutkan dari SD/ MI ke SMP/ MTs	100,37	98,87	99,26	99,30	96,70
Angka Melanjutkan dari SMP/ MTs ke SMA/ MA/ SMK	96,64	92,43	88,28	95,48	97,73

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Klaten, 2020.

Berdasarkan Tabel 3.10. sebagaimana tersebut di atas, peserta didik di jenjang pendidikan SD/MI yang melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/MTs pada tahun 2015-2019 perkembangannya bersifat fluktuatif, begitu pula untuk jenjang SMP/MTs. Hal ini mengkondisikan, bahwa angka melanjutkan sangat bersifat situasional.

11) Sarana dan Prasarana Sekolah

Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pendidikan sangat berpengaruh terhadap proses kegiatan belajar mengajar dan tentunya akan juga sangat berpengaruh terhadap capaian kualitas pendidikan di Kabupaten Klaten. Perkembangan kondisi sarana dan prasarana sekolah dalam kondisi baik selama tahun 2015–2019 disajikan pada Tabel 3.11.



Tabel 3.11.
 Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik
 Tahun 2015 - 2019

Uraian	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sekolah pendidikan SD/MI dalam kondisi baik	%	69,29	71,09	67,06	68,53	68,25
Sekolah pendidikan SMP/MTs	%	89,61	88,23	96,30	80,00	88,89

Sumber : Dinas Pendidikan, 2020.

Berdasarkan Tabel 3.11. sebagaimana tersebut di atas kondisi ruang kelas gedung sekolah masih terdapat ruang kelas dalam kondisi tidak layak meskipun persentasenya kecil, sehingga rehabilitasi ruang kelas menjadi hal mutlak yang harus dilaksanakan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait pemenuhan Pendidikan Sepanjang Hayat bagi masyarakat di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2019, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis: [Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal](#) terdiri dari 6 (enam) program, diantaranya:

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun;
3. Pendidikan Non Formal;
4. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
5. Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Permasalahan

Urusan Pendidikan dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

- a. Belum terpenuhinya aksesibilitas sarana dan prasarana layanan pendidikan sekolah dasar dalam kondisi baik;
- b. Masih rendahnya tenaga pendidik dan kependidikan yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
- c. Terjadinya kekosongan kepala sekolah jenjang pendidikan SD Negeri, per Desember 2019 sebanyak 194 Kepala Sekolah SD Negeri tidak mempunyai kepala sekolah;
- d. SD Negeri tidak mempunyai tenaga administrasi untuk mengelola administrasi Laporan Dana BOS dan Aset, sehingga guru terbebani dengan tugas administrasi pelaporan BOS dan Aset;



Solusi

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki layanan pendidikan, diantaranya:

- a. Pemenuhan sarana dan prasarana layanan pendidikan, meliputi: rehab sedang/berat ruang kelas, maupun gedung sekolah, pengadaan sapsras laboratorium, ruang praktikum dan komputer;
- b. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan pelaksanaan Diklat peningkatan kapasitas guru;
- c. Pengisian Kepala Sekolah dengan Diklat penguatan bagi calon Kepala Sekolah; dan
- d. Pengusulan pengangkatan tenaga harian Lepas (THL) Pengadministrasian Umum di SD Negeri.

2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian, Angka Kesakitan dan Kecacatan;



Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa azas penyelenggaraan kesehatan berdasarkan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif, norma-norma keagamaan. Serta memperhatikan ketentuan Pasal 3, dinyatakan bahwa tujuan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Mengingat kesehatan sebagai hak dasar manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang menyeluruh secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat. Bahwa untuk memenuhi hak, dan kebutuhan kesehatan setiap individu dan masyarakat dalam pelayanan kesehatan, serta memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada masyarakat, Pemerintah wajib menyiapkan dan/atau mengadakan kebutuhan upaya kesehatan masyarakat,



fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan pembiayaan kesehatan yang harus diwujudkan.

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya Urusan Kesehatan dengan parameter aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan yang diarahkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan indikator meningkatnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang ditandai dengan peningkatan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat, serta berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 urusan kewenangan daerah Kabupaten/Kota terkait dengan urusan kesehatan mencakup diantaranya: 1. Upaya kesehatan, 2. Sumber Daya Manusia Kesehatan, 3. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman, dan 4. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Adapun capaian sasaran terwujudnya Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian, angka kesakitan dan kecacatan sebagaimana Tabel 3.12.

Tabel 3.12.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Menurunnya Angka
Kematian, Angka Kesakitan dan Kecacatan

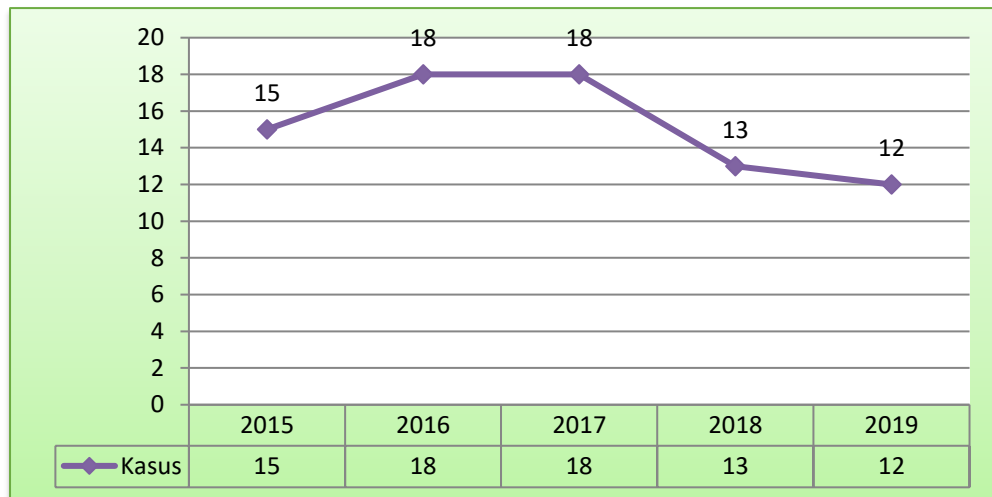
No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Kasus kematian Ibu	15	13	16	12	75,00	14	85,71
2	Angka Kematian Bayi	12,94	10,7	10,11	10,01	99,01	10,07	100,10
3	Angka Kematian Balita	2,99	1,9	1,65	1,59	96,36	1,61	93,17
4	Prevalensi Gizi Buruk (BB/U)	0,75	0,56	0,72	0,71	98,61	0,70	101,43

Sumber: Dinas Kesehatan, 2020.

Capaian sasaran kinerja: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian, Angka Kesakitan dan Kecacatan, sebagaimana tersebut di atas ditunjang beberapa indikator kinerja urusan kesehatan, diantaranya:

1. Kasus Kematian Ibu Melahirkan

Perkembangan kasus kematian ibu melahirkan di Kabupaten Klaten selama Tahun 2015-2019 dapat disajikan pada Grafik 3.6.



Sumber: Dinas Kesehatan, 2020.

Grafik 3.6. Perkembangan Kasus Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019

Berdasarkan Grafik 3.6. sebagaimana tersebut di atas, kasus Kematian Ibu di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2015-2019 cenderung bersifat fluktuatif. Penyebab kematian ibu, di samping akibat hipertensi dan pendarahan, juga disebabkan oleh faktor-faktor non medis. Kondisi ini menggambarkan derajat kesehatan masyarakat perlu di tingkatkan terutama di wilayah-wilayah kecamatan dengan kasus kematian ibu yang tinggi. Adapun kasus kematian ibu melahirkan selama tahun 2015–2019 menurut kecamatan dan Puskesmas disajikan pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13.
Jumlah Kasus Kematian Ibu Melahirkan Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019

No	Kecamatan	Puskesmas	Kematian Ibu Melahirkan				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Prambanan	Prambanan	2	0	0	2	0
		Kebondalem Lor	0	0	0	0	1
2	Gantiwarno	Gantiwarno	0	0	1	0	0
3	Wedi	Wedi	1	3	0	1	0
4	Bayat	Bayat	1	0	1	1	0
5	Cawas	Cawas I	0	0	2	1	0
		Cawas II	1	0	1	1	0
6	Trucuk	Trucuk I	1	1	1	0	0
		Trucuk II	0	0	1	0	1
7	Kalikotes	Kalikotes	0	1	0	0	0
8	Kebonarum	Kebonarum	0	0	0	0	0
9	Jogonalan	Jogonalan I	2	1	1	0	2
		Jogonalan II	0	0	0	0	0
10	Manisrenggo	Manisrenggo	0	1	0	1	0
11	Karangnongko	Karangnongko	0	0	1	0	0
12	Ngawen	Ngawen	0	0	0	0	1
		Ceper	0	0	2	0	1
13	Ceper	Jambukulon	0	1	0	0	0
		Pedan	1	0	0	1	1



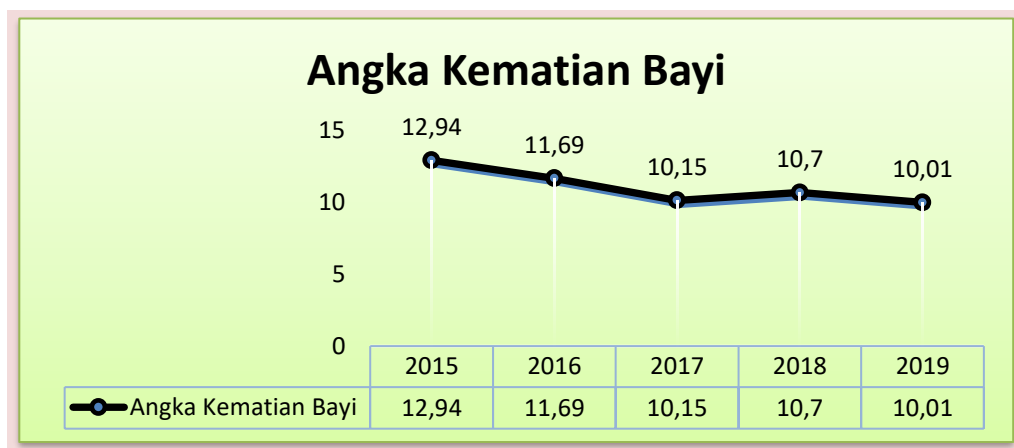
No	Kecamatan	Puskesmas	Kematian Ibu Melahirkan				
			2015	2016	2017	2018	2019
15	Karangdowo	Karangdowo	0	1	1	1	0
16	Juwiring	Juwiring	0	3	0	0	0
17	Wonosari	Wonosari I	0	0	1	1	0
		Wonosari II	0	1	0	0	2
18	Delanggu	Delanggu	0	1	1	0	0
19	Polanharjo	Polanharjo	1	0	0	1	1
20	Karanganom	Karanganom	1	0	2	1	0
21	Tulung	Tulung	0	0	0	0	0
		Majegan	0	1	0	0	0
22	Jatinom	Jatinom	0	0	0	1	1
		Kayumas	0	1	0	0	0
23	Kemalang	Kemalang	1	0	2	0	0
24	Klaten Selatan	Klaten Selatan	1	0	0	0	0
25	Klaten Tengah	Klaten Tengah	1	1	0	0	0
26	Klaten Utara	Klaten Utara	1	1	0	0	1
Jumlah			15	18	18	13	12

Sumber: Dinas Kesehatan, 2020.

Berdasarkan Tabel 3.13 sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat bahwa setiap tahun masih ada ibu mati karena melahirkan, hal ini disebabkan salah satunya karena hipertensi, faktor medis lainnya, dan non medis yang menyebabkan kasus kematian ibu melahirkan cukup tinggi.

2. Angka Kematian Bayi (AKB)

Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Klaten selama Tahun 2015-2019 disajikan pada Grafik 3.7.



Sumber: Dinas Kesehatan, 2020.

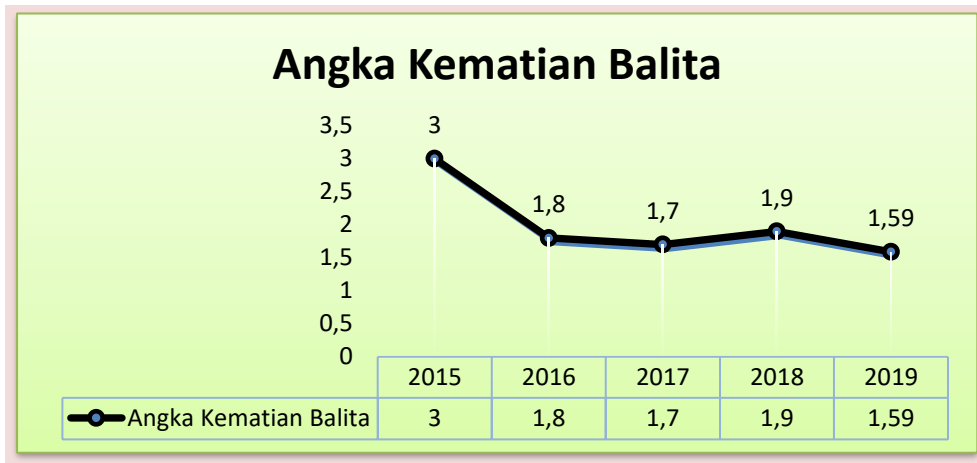
Grafik 3. 7. Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019

Berdasarkan Grafik 3.7. sebagaimana tersebut di atas angka kematian bayi dalam kurun waktu tahun 2015-2019 mengalami penurunan. Penyebab Kematian bayi terbanyak adalah BBLR, Asfiksia dan kelainan kongenital. Derajat kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan terutama di wilayah kecamatan dan Puskesmas dengan kasus kematian bayi yang tinggi.



3. Angka Kematian Balita

Perkembangan Angka Kematian Balita (AKABA) di Kabupaten Klaten selama Tahun 2015-2019 disajikan pada Grafik 3.8.



Sumber: Dinas Kesehatan, 2020.

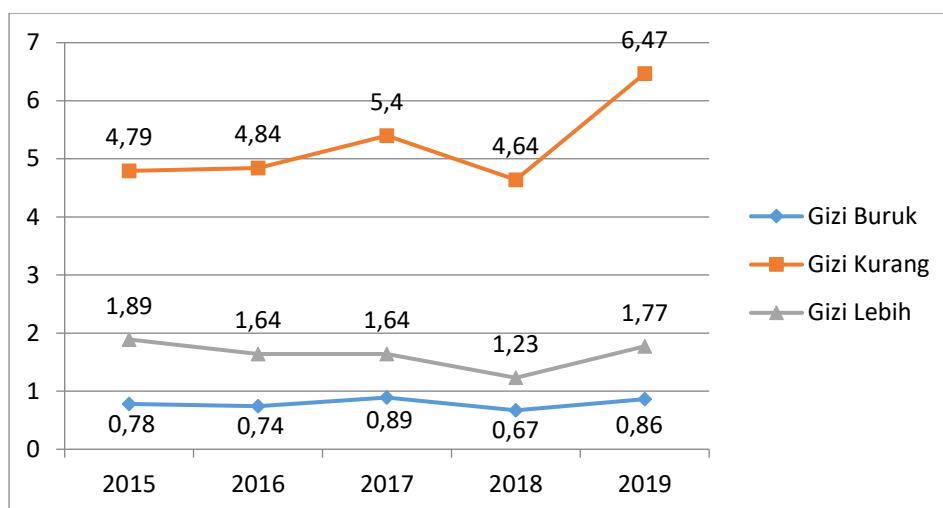
Grafik 3.8. Perkembangan Angka Kematian Balita di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019

Berdasarkan Grafik 3.8. sebagaimana tersebut di atas Angka Kematian Balita (AKABA) pada tahun 2015 sebanyak 3 per 1.000 KH (atau 51 kasus), tahun 2016 sebanyak 1,8 per 1.000 KH (atau 32 kasus), tahun 2017 sebanyak 1,7 per 1.000 KH (atau 27 kasus), tahun 2018 sebanyak 1,9 per 1.000 KH (atau 30 kasus), dan tahun 2019 menjadi sebanyak 1,59 per 1.000 KH (atau 25 kasus). Penyebab Kematian balita terbanyak diare, maka derajat kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan terutama di wilayah kecamatan dan Puskesmas dengan kasus kematian balita yang tinggi.

4. Prevalensi Gizi Buruk

Balita dengan status gizi buruk masih menjadi masalah karena berbagai penyebab. Penyebab balita mengalami gizi buruk karena: asupan makan yang kurang, pola jajanan makanan yang tidak memenuhi zat gizi, pola asuh orang tua yang tidak telaten memenuhi kebutuhan zat gizi anak asuhannya.

Kasus *underweight* (gizi buruk dan gizi kurang) dengan indikator berat badan menurut umur di Kabupaten Klaten selama Tahun 2015-2019 dari hasil pengukuran serentak dapat disajikan pada Grafik 3.9.



Sumber: Dinas Kesehatan, 2020.

Grafik 3.9. Perkembangan Persentase Gizi Buruk di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019

Berdasarkan Grafik 3.9. sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat perkembangan selama tahun 2015-2019 kasus gizi buruk murni tanpa penyakit penyerta bersifat fluktuatif, dan Kecamatan yang perlu mendapat perhatian (survalen) diantaranya: Delanggu, Jogonalan, Trucuk, Wonosari, Kalikotes, Prambanan, Jatinom, Gantiwarno.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2019, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis: Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat terdiri dari 13 (tiga belas) program, diantaranya:

1. Upaya Kesehatan Masyarakat;
2. Obat dan Perbekalan Kesehatan;
3. Pengawasan Obat dan Makanan;
4. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
5. Perbaikan Gizi Masyarakat;
6. Pengembangan Lingkungan Sehat;
7. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
8. Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
9. Pelayanan Kesehatan masyarakat Miskin;
10. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan prasarana sarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya;
11. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Prasarana dan Sarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata;
12. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia; dan
13. Pelayanan Kesehatan.

Permasalahan

Urusan Kesehatan dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

- a. Masih diketemukannya kasus kematian ibu dan bayi.
- b. Angka kesakitan demam berdarah masih ditemui, penemuan infeksi HIV dan AIDS tiap tahun cenderung meningkat, serta adanya ancaman pandemik flu burung, serta penyakit yang bersumber dari binatang diantaranya:
 - Demam berdarah *dengue*.
 - Malaria
 - Filariatis
- c. Untuk jenis penyakit menular / infeksi tertentu belum dapat diatasi, di sisi lain angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit tidak menular dan degeneratif seperti Diabetes Militus (DM), kardiovaskuler dan keganasan (kanker). Serta beberapa penyakit yang perlu kewaspadaan dini, diantaranya:
 - Penyakit menular Tuberculosis paru
 - Kusta penderita PB
 - Diare
 - Infeksi Saluran Pernapasan Atas
 - HIV
 - Kejadian luar biasa KIPI
- d. Keadaan gizi : Berat Badan (BB) naik, BB di bawah garis merah dan gizi buruk
- e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang penyehatan lingkungan.
- f. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat masih rendah, diantaranya: kebiasaan cuci tangan dengan sabun, sebelum makan dan sesudah buang air besar, serta kebiasaan merokok di masyarakat masih tinggi, dan
- g. Pelaksanaan Pembiayaan Jaminan Pelayanan Kesehatan belum optimal.

Solusi:

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki layanan kesehatan, diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi ibu hamil di setiap Puskesmas dan layanan kesehatan masyarakat; dan
- b. Pemetaan kasus dan faktor risiko serta skrining penyakit ibu sebelum kehamilan. Peningkatan *Antenatal Care* (ANC) terpadu, didukung kelas ibu hamil untuk menjaga kontinuitas konseling, edukasi dan informasi bagi ibu hamil.



3. Sasaran Menurunnya Angka Kelahiran (*Total Fertility Rate*);



Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menekan angka kelahiran diupayakan dengan pelayanan keluarga berencana. Adapun capaian sasaran: Menurunnya Angka Kelahiran (*Total Fertility Rate*) sebagaimana Tabel 3.14.

Tabel 3.14.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Menurunnya Angka Kelahiran (*Total Fertility Rate*)

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Angka Kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>) /TFR	2,2	1,91	2,14	2,1	98,13	2,1	100

Sumber: Dinsos P3A dan KB, 2020.

Jumlah kelahiran hidup pada tahun 2018 sebanyak 15.786 KH, dan pada tahun 2019 sebanyak 15.681 KH. (atau turun 0,66 % dibanding tahun 2018). Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menurunkan angka kelahiran dengan melaksanakan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan indikator:

1. Jumlah Peserta KB dan KB Aktif

Jumlah peserta KB baru dalam kurun waktu Tahun 2015-2019 perkembangannya bersifat fluktuatif. Peserta KB baru pada tahun 2015 sebanyak 23.559 peserta KB baru, dan pada tahun 2019 turun menjadi 12.503 peserta KB baru. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya kesadaran pasangan usia subur dalam menyiapkan keluarga dan kondisi sosial masyarakat. Gambaran peserta KB dan KB Aktif di Kabupaten Klaten tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 3.15.



Tabel 3.15.
Peserta KB dan KB Aktif di
Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019

Tahun	Pasangan Usia Subur	Peserta KB Baru	Peserta KB Aktif
2015	203.448	23.559	154.422
2016	201.950	26.461	158.943
2017	211.577	23.783	169.626
2018	196.717	15.565	137.109
2019	197.949	12.503	141.315

Sumber : Dinas Sosial, P3A dan KB Kab. Klaten, 2020.

Berdasarkan Tabel 3.15. sebagaimana tersebut di atas, perkembangan persentase KB Baru terhadap terhadap pasangan usia subur pada tahun 2019 sebesar 6,32%, dan rasio peserta KB baru terhadap Peserta KB Aktif sebesar 8,85%, sedangkan rasio peserta KB Aktif terhadap pasangan usia subur sebesar 71,39%.

2. Jumlah Keluarga Sejahtera

Perkembangan jumlah keluarga sejahtera tahun 2015-2019 mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2019 jumlah keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I (KS I), dan jumlah Keluarga Sejahtera (KS) sebanyak 372.281 jiwa. Data tersebut mengindikasikan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Klaten dalam melaksanakan program pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat mencapai hasil yang optimal. Jumlah Pra Sejahtera, KS I, dan keluarga sejahtera tahun 2015–2019 disajikan pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16.
Jumlah Pentahapan Keluarga Sejahtera Menurut Jenisnya
di Kabupaten Klaten Tahun 2015–2019

Kecamatan	Pra Sejahtera	KS-I	KS	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Prambanan	1.425	3.103	9.233	13.761
02 Gantiwarno	2.110	2.275	8.356	12.741
03 Wedi	1.635	3.322	11.096	16.053
04 Bayat	5.643	3.183	8.412	17.238
05 Cawas	2.689	4.004	12.150	18.843
06 Trucuk	4.724	4.303	13.410	22.437
07 Kalikotes	894	2.402	6.806	10.102
08 Kebonarum	369	1.203	3.946	5.518
09 Jogonalan	1.812	3.519	10.835	16.166



Kecamatan	Pra Sejahtera	KS-I	KS	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10 Manisrenggo	1.754	3.452	7.972	13.178
11 Karangnongko	2.002	2.116	7.311	11.429
12 Ngawen	1.168	4.163	9.239	14.570
13 Ceper	1.222	5.268	14.078	20.568
14 Pedan	1.394	3.433	9.534	14.361
15 Karangdowo	3.135	2.603	9.060	14.798
16 Juwiring	1.740	3.777	10.020	15.537
17 Wonosari	2.956	3.682	10.206	16.844
18 Delanggu	475	2.811	7.938	11.224
19 Polanharjo	1.142	2.774	8.421	12.337
20 Karanganom	1.343	3.305	9.444	14.092
21 Tulung	2.588	2.987	9.628	15.203
22 Jatinom	4.128	3.171	8.631	15.930
23 Kemalang	3.239	2.468	6.341	12.048
24 Klaten Selatan	1.016	3.165	8.998	13.179
25 Klaten Tengah	941	2.369	8.318	11.628
26 Klaten Utara	1.142	2.889	8.445	12.476
2019	52.682	81.747	237.828	372.261
2018	52.688	81.688	238.374	372.750
2017	80.935	114.736	192.994	388.665
2016	67.400	83.239	239.583	390.222
2015	68.814	80.446	236.200	385.460

Sumber : Dinas Sosial, P3AKB Kab. Klaten, 2020.

Berdasarkan Tabel 3.16. sebagaimana tersebut di atas, pada tahun 2019 jumlah keluarga Pra Sejahtera sebanyak 52.682 jiwa, jumlah Keluarga Sejahtera I (KS I) sebanyak 81.747 jiwa, dan jumlah Keluarga Sejahtera (KS) sebanyak 237.8828 jiwa.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat untuk menurunkan angka kelahiran. Pada tahun 2019, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis: *Menurunnya Angka Kelahiran (Total Fertility Rate)* diantaranya:

1. Keluarga Berencana;
2. Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja;
3. Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri;
4. Promosi Kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat;
5. Pelayanan Kontrasepsi;



6. Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak;
7. Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR;
8. Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; dan
9. Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.

Permasalahan

Urusan keluarga berencana untuk menekan angka melahirkan dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

1. Tingginya angka *drop out* KB; dan
2. Banyak Pasangan usia subur.

Solusi

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki layanan keluarga berencana, diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi masyarakat, terutama pasangan usia subur; dan
- b. Pemetaan kasus dan faktor risiko serta skrining sosial untuk menjaga kontinuitas konseling, edukasi dan penanganan keluarga berencana.

4. Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Pelayanan Kerumahsakitian oleh Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian di Rumah Sakit;



Kesehatan sebagai hak dasar manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang menyeluruh secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat. Bahwa untuk memenuhi hak, dan kebutuhan kesehatan setiap individu dan masyarakat dalam pelayanan kesehatan, serta memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada masyarakat, Pemerintah wajib menyiapkan dan/atau mengadakan kebutuhan upaya kesehatan masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan pembiayaan kesehatan yang harus diwujudkan.



Oleh karena itu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitkan oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit didorong dengan mengutamakan dan mengoptimalkan pelayanan Rumah Sakit Daerah (RSD) didukung dengan kinerja Puskesmas untuk menekan angka kematian.

Adapun capaian sasaran: Meningkatnya Pemanfaatan Pelayanan Kerumahsakitkan oleh Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian di Rumah Sakit sebagaimana Tabel 3.17.

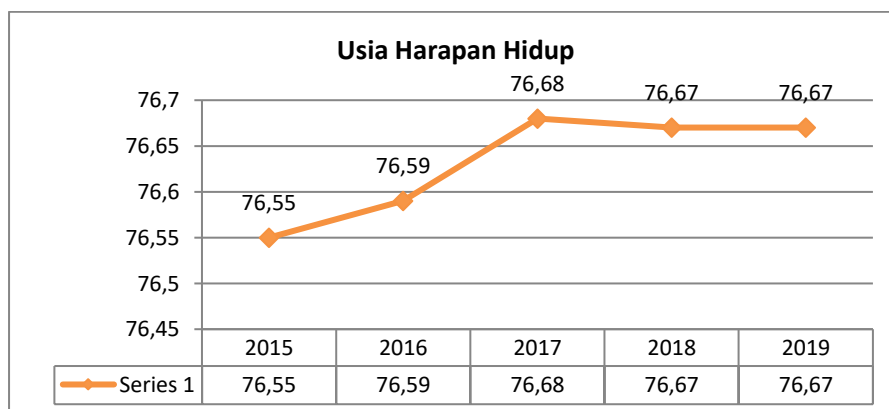
Tabel 3.17.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Pemanfaatan Pelayanan Kerumahsakitkan oleh Masyarakat
dan Menurunnya Angka Kematian di Rumah Sakit

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Usia Harapan Hidup	76,59	76,77	76,62	76,67	100,07	76,62	99,93

Sumber: BPS, 2020 (diolah).

Usia Harapan Hidup (UHH) dalam arti usia hidup panjang dan sehat, di samping sebagai cerminan terhadap ukuran peningkatan kesejahteraan penduduk, juga menjadi indikator meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Selama kurun waktu 2015-2019 UHH cenderung mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan antara lain oleh semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap budaya hidup bersih dan sehat, termasuk upaya pemberian asupan yang semakin berkualitas terhadap anak usia dini. Perkembangan UHH di Kabupaten Klaten tahun 2015–2019 disajikan pada Grafik 3.10.



Sumber : BPS, (2020) diolah.

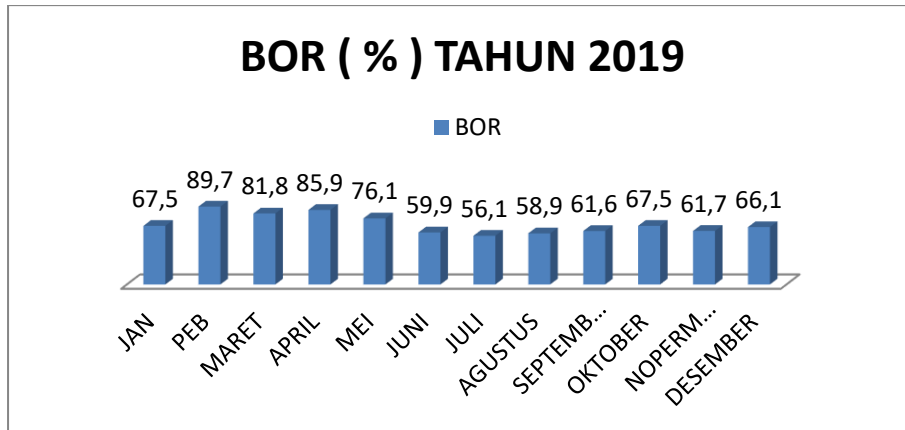
Catatan: tahun 2019 angka sementara

Grafik 3.10. Perkembangan Usia Harapan Hidup Masyarakat di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019



1. Cakupan Pelayanan RSUD Bagas Waras

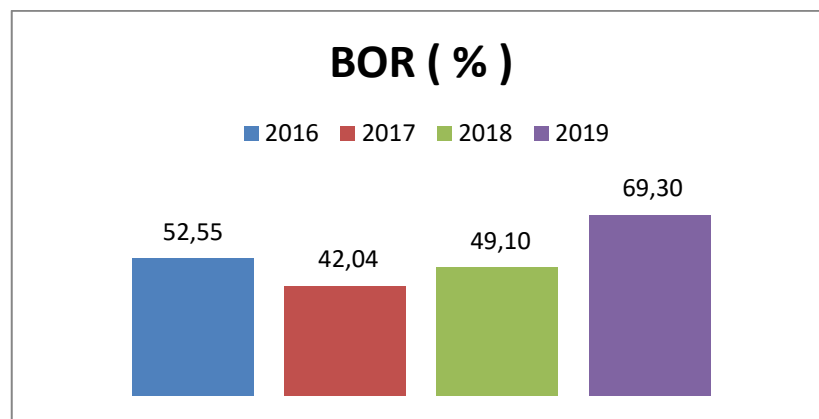
Kinerja pelayanan RSD Bagas Waras diukur dari indikator BOR (Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu). BOR Tahun 2019 adalah 69,3 % dengan jumlah per bulan disajikan pada Grafik 3.11.



Sumber : RSD Bagas Waras Kab. Klaten, 2020

Grafik 3.11. Perkembangan Indikator BOR Bulanan (Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu).

Di samping itu, pada Tahun 2019, jumlah kunjungan pasien sebanyak 118.011 jiwa dengan perincian: 1). Rata-rata kunjungan rawat inap sebanyak 10.185 orang/Tahun (atau rata-rata 28 orang/hari), 2). Rata-rata kunjungan rawat jalan sebanyak 92.574 orang/Tahun (atau rata-rata 349 orang/hari), dan 3). Rata-rata kunjungan IGD sebanyak 15.252 orang/Tahun (atau rata-rata 42 orang/hari). Adapun kinerja pelayanan RSD Bagas Waras dapat dilihat pada Grafik 3.12.



Sumber : RSUD Bagaswaras, 2020.

Grafik 3.12. Perkembangan Indikator BOR Tahunan (Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu)

Berdasar pada Grafik 3.10. dan Grafik 3.12. indikator BOR di atas terlihat bahwa pada Tahun 2019 terjadi kenaikan persentase pemakaian tempat tidur dibanding Tahun 2018 sebesar 20,2.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2019, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis: *Meningkatnya Pemanfaatan Pelayanan Kerumahsakitannya Oleh Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian di Rumah Sakit* dengan program utama Pelayanan Kesehatan, dengan didukung beberapa program, diantaranya:

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan; dan
2. Manajemen, informasi dan regulasi kesehatan.

Permasalahan

Urusan Kesehatan dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

1. Angka kesakitan demam berdarah masih ditemui, penemuan infeksi HIV dan AIDS tiap tahun cenderung meningkat, serta adanya ancaman penyakit yang bersumber dari binatang diantaranya:
 - a. Demam berdarah dengue .
 - b. Malaria
2. Untuk jenis penyakit menular/infeksi tertentu belum dapat diatasi, di sisi lain angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit tidak menular dan degeneratif seperti *Diabetes Militus* (DM), kardiovaskuler dan keganasan (kanker). Serta beberapa penyakit yang perlu kewaspadaan dini, diantaranya:
 - a. Penyakit menular Tuberculosis paru
 - b. Kusta penderita PB
 - c. Diare
 - d. Infeksi Saluran Pernapasan Atas
 - e. HIV
 - f. Kejadian luar biasa KIPI
 - g. Pencegahan Stunting
 - h. Pelaksanaan Pembiayaan Jaminan Pelayanan Kesehatan belum optimal.

Solusi

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki layanan kesehatan, diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi ibu hamil di setiap Puskesmas dan layanan kesehatan masyarakat;
- b. Pemetaan kasus dan faktor resiko serta skrining penyakit ibu sebelum kehamilan. Peningkatan *Antenatal Care* (ANC) terpadu, didukung kelas ibu hamil untuk menjaga kontinuitas konseling, edukasi dan informasi bagi ibu hamil.



5. Sasaran Meningkatnya Upaya Pencegahan Permasalahan Sosial dan Aksesibilitas PMKS dalam Memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi yang Berperspektif HAM;



Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien biasanya dicerminkan ke dalam 3 (tiga) pilar yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sehingga kelihatan, sejauh mana faktor kontribusi masyarakat turut andil menyelesaikan masalah agar ruang demokrasi tumbuh dan berkembang. Ukuran Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien diukur pada upaya pencegahan permasalahan dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM, sehingga sasaran strategis yang hendak dicapai dapat diukur.

Adapun capaian sasaran: Meningkatnya Upaya Pencegahan Permasalahan Sosial dan Aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM sebagaimana Tabel 3.18.

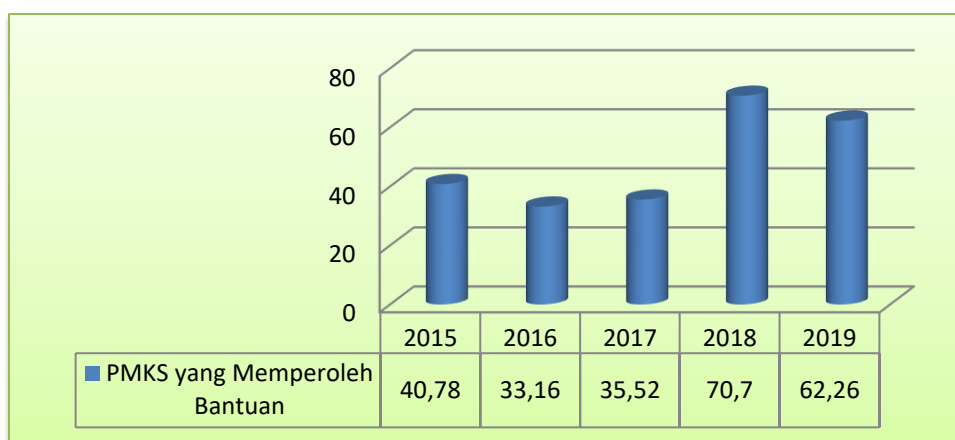
Tabel 3.18.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Upaya Pencegahan Permasalahan Sosial dan Aksesibilitas PMKS
dalam Memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi yang Berperspektif HAM

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	35,52	70,66	85	62,26	72,25	89	69,96
2	Persentase penguatan kapasitas PSKS	90	96	97	96	98,9	100	96
3	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	13,9	14,32	13,1	13,09	99,92	12,9	101,47

Sumber: Dinas Sosial, P3A dan KB, 2020. (diolah).

1. Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan salah satu fokus pembangunan daerah di Kabupaten Klaten hingga saat ini. Program-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan perlindungan sosial belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan PMKS secara keseluruhan, namun telah menunjukkan perkembangan ke arah yang positif. Hal ini ditunjukkan kinerja layanan penanganan PMKS yang memperoleh bantuan, dan persentase PMKS skala Kabupaten yang menerima bantuan program pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok ekonomi Sejenis Lainnya. Perkembangan PMKS yang memperoleh bantuan dapat tahun 2015–2019 disajikan pada Grafik 3.13.



Sumber: Dinas Sosial P3A dan KB, 2020.

Grafik 3.13. PMKS yang Memperoleh Bantuan Tahun 2015–2019

Berdasarkan Grafik 3.13. sebagaimana tersebut di atas, karena dukungan dan kepedulian dari berbagai pihak untuk mengurangi angka PMKS, khususnya peran Pemerintah Daerah, keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat dapat membuahkan hasil yang maksimal, terutama bagi keluarga rawan sosial yang jumlahnya relatif sudah semakin berkurang, namun demikian tetap harus mendapatkan perhatian yang memadai dari semua pihak.

2. Persentase Penguatan Kapasitas PSKS

Sumber daya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam turut serta penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) selama ini telah memberikan kontribusi positif. Tercatat sebanyak 11 (sebelas) PSKS yang telah turut andil dalam penanganan 25 (dua puluh lima) Jenis PMKS di Klaten. 11 (sebelas) PSKS tersebut, diantaranya: 1) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 2) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), 3) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), 4) Karangtaruna, 5) IPSM, 6) PLKSAI, 7) Lembaga Konsultasi



Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (LKKKS), 8) PPDK, 9) Tim Advokasi Disabilitas, 10) Taruna Siaga Bencana (Tagana), dan 11) Komda Lansia.

Dari sebanyak 11 (sebelas) PSKS yang telah diberdayakan sebanyak 96% telah mampu secara mandiri mengembangkan kapasitasnya dalam membantu penanganan PMKS.

3. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Dari 26 (dua puluh enam) jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang termonitor selama tahun 2018 tercatat sebanyak 225.287 PMKS. Terbesar fakir miskin sebanyak 194.827 orang, lanjut usia terlantar sebanyak 12.224 orang, dan perempuan rawan sosial ekonomi sebanyak 5.561 orang. Pada tahun 2019 jumlah berkurang menjadi sebanyak 172.857 PMKS. Terbesar fakir miskin sebanyak 144.440 orang, lanjut usia terlantar sebanyak 11.481 orang, dan perempuan rawan sosial ekonomi sebanyak 4.561 orang.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2019, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis: *Meningkatnya Upaya Pencegahan Permasalahan Sosial dan Aksesibilitas PMKS dalam Memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi yang Berperspektif HAM*, diantaranya:

1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
2. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
3. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komonitas Adat terpencil (KAT) dan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; dan
4. Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba, Penyakit lainnya);

Permasalahan

Urusan Sosial dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

1. Masih banyaknya masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum terselesaikan;
2. Minimnya sarana dan prasarana Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
3. Meningkatnya kasus pengguna Narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS; dan
4. Banyaknya Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Gepeng) yang dibuang/dilepas dari daerah lain.

Solusi:

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki layanan sosial, diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi petugas sosial dan layanan sosial masyarakat;



- b. Pemetaan kasus dan faktor risiko serta skrining sosial untuk menjaga kontinuitas konseling, edukasi dan penanganan Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Eks. Penyandang Penyakit Sosial.
- c. Penguatan Posyandu Remaja untuk mencegah penggunaan Narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS.

6. Sasaran Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga;



Lembaga atau organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Klaten meliputi: (a) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI); (b) Organisasi Kemasyarakatan Pemuda; (c) Lembaga Sosial Pemuda, Lembaga kepemudaan yang umumnya berbentuk Yayasan; (d) Organisasi Pemuda Partai Politik; (e) Organisasi Kemahasiswaan; (f) Praja Muda Karana (Pramuka); (g) Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) tingkat SLTA; (h) Karang Taruna; (i) Organisasi Pemuda Kedaerahan; (j) Lembaga Pemuda Profesi; (k) Perkumpulan Pemuda di bidang Seni; (l) Klub Ilmuwan Muda; dan (m) Lembaga Pemuda Pencinta Alam (n) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Lembaga-lembaga tersebut sebagian besar secara organisasi 37 berjalan namun kualitas dan kapasitasnya masih rendah, sehingga masih perlu adanya pembinaan secara simultan oleh pihak-pihak yang terkait.

Adapun capaian sasaran: Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga sebagaimana Tabel 3.19.

Tabel 3.19.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda	5	12	10	12	120	60	20,00
2	Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga	5	5	5	5	100	30	16,67

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2020.

Perkembangan jumlah organisasi kepemudaan dan jumlah organisasi olahraga selama lima tahun terakhir (tahun 2015-2019) jumlahnya relatif stabil, hanya saja kegiatan keolahragaan yang khusus diperuntukkan bagi penyandang disabilitas masih sangat rendah. Jumlah klub/cabang olahraga mengalami penurunan, hal ini menunjukkan pembinaan terhadap klub/cabang olahraga masih kurang. Sedangkan jumlah gedung olah raga sudah cukup merata disetiap kecamatan, namun yang memenuhi standar sarana dan prasarana gedung olahraga baru ada dua yaitu GOR Gelar Sena dan Stadion Trikoyo.

Perkembangannya kepemudaan dan olahraga dapat dilihat pada Tabel 3.20.

Tabel 3.20.
Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga
di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jml klub/cabang olahraga	Cabang	31	31	31	31	31
2.	Jml gedung Olahraga Tk. Kecamatan	Gedung	26	26	26	26	26
3.	Jml Organisasi Pemuda	Organisasi	26	29	29	29	29
4.	Jml Organisasi Olahraga	Organisasi	8	35	35	35	35

Sumber : Disparbudpora Kabupaten Klaten, 2020.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan kualitas pemuda dan olahraga. Pada tahun 2019, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis: [Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga](#), diantaranya:

1. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;
2. Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda;
3. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba;
4. Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga; dan
5. Pembinaan pemuda dan olahraga.

Permasalahan

Peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

1. Usia produktif memiliki kepekaan psikologis sesuai dengan pilihannya sendiri, kadang program kepemudaan Pemerintah kurang menyentuh kebutuhan pemuda secara umum; dan
2. Rendahnya prestasi olahraga, karena minimnya pembinaan dan penghargaan bagi atlet berprestasi.



Solusi:

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga, diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi pemuda, sesuai dengan dinamika yang berkembang; dan
- b. Pemberian penghargaan yang sepadan bagi atlet dan pemuda yang berprestasi.

7. Sasaran Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya.



Upaya Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya dengan melakukan berbagai event dan baluran budaya daerah. Langkah ini diharapkan akan memperkuat daya saing daerah melalui seni dan budaya.

Adapun capaian sasaran: Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya sebagaimana Tabel 3.21.

Tabel 3.21.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	5	3,2	6	3,13	52,17	6	52,17
2	Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	7	14,3	10	14,3	143	10	143

Sumber : Disparbudpora Kabupaten Klaten, 2020.

1. Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Perkembangan jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya serta sarana penyelenggaraan seni dan budaya selama tahun 2015-2019 dapat disajikan pada Tabel 3.22.

Tabel 3.22.
Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya
di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan Budaya	kegiatan	52	52	52	52	28
2	Jumlah sarana Penyelenggaraan seni dan Budaya	Tempat	12	12	12	12	12

Sumber : Disparbudpora Kab. Klaten, 2020.

Promosi, pengembangan dan pembinaan seni budaya daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dengan pengiriman Tim kesenian Kabupaten ke TMII, ke Provinsi Jawa Tengah dan beberapa kabupaten lain. Begitu juga dengan pemberian bantuan keuangan kepada sanggar-sanggar kesenian yang ada di Kabupaten Klaten semakin intensif.

Upaya untuk perlindungan dan pelestarian seni budaya daerah akan didaftarkan melalui HAKI (Hak Atas Kepemilikan Intelektual), diantaranya: a) Lurik ATBM; b) Tari Lurik Payung; dan c) Tari Lurik Asri. Begitu juga dengan pelestarian dan penggunaan bahasa Jawa dialek Yogyakarta-Surakarta yang diimplementasikan dalam bentuk lomba dongeng Bahasa Jawa, Lomba Dalang Muda, dan mewajibkan penggunaan bahasa Jawa halus setiap hari Kamis di semua OPD Kabupaten Klaten belum efektif dilaksanakan.

2. Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan.

Selama tahun 2015-2019 perkembangan jumlah cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Klaten tidak ada perubahan. Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan di Kabupaten Klaten pada Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 3.23.



Tabel 3.23.
Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan
di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Candi Purbakala	Jumlah	8	8	8	8	8
2	Jumlah Makam	Jumlah	4	4	4	4	4
3	Pemandangan Alam	buah	2	2	2	2	2
4	Museum	buah	1	1	1	1	1

Sumber : Disparbudpora Kabupaten Klaten, 2020.

Berdasarkan Tabel 3.23. sebagaimana tersebut di atas, jumlah cagar budaya yang dilestarikan selama tahun 2015-2019 tidak mengalami perkembangan, sebab penambahan maupun pengurangan cagar budaya memerlukan verifikasi dari Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Budaya dan Pariwisata serta UNESCO.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya. Pada tahun 2019, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya, diantaranya:

1. Pengelolaan Kekayaan Budaya;
2. Pengembangan Nilai Budaya;
3. Pengelolaan Keragaman Budaya: dan
4. Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.

Permasalahan:

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

1. Kekayaan, nilai dan keberagaman budaya yang berkembang apabila tidak dirawat dan dipelihara akan mengakibatkan *culture lag (kemandegan budaya)*, dan menjadi ancaman desintegrasi bangsa; dan
2. Kurangnya pembinaan yang kontinu bagi pengelolaan kekayaan budaya, nilai budaya, dan keberagaman budaya.

Solusi:

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya, diantaranya:



- a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi pamong budaya, sesuai dengan dinamika yang berkembang; dan
- b. Pemetaan kasus dan faktor resiko serta skrining sosial untuk menjaga kontinuitas konseling, edukasi untuk pengembangan dan pengelolaan budaya; dan
- c. Pemberian penghargaan yang sepadan bagi pelaku seni dan budaya yang berprestasi.

8. Sasaran Meningkatnya Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan;



Upaya Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan kunjungan masyarakat ke perpustakaan dengan melakukan berbagai event daerah. Langkah ini diharapkan akan meningkatkan budaya baca masyarakat. Adapun capaian sasaran: [Meningkatnya Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan](#) disajikan pada Tabel 3.24.

Tabel 3.24.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Persentase Kenaikan kunjungan masyarakat	4	65,79	5	22,19	443,8	5	443,8

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip, 2020.

Pada Tahun 2019 jumlah perpustakaan desa sebanyak 43 unit dan perpustakaan kelurahan sebanya 2 unit. Layanan perpustakaan keliling sebanyak 5 unit yang melayani 26 kecamatan di Kabupaten Klaten, secara bergilir sesuai jadwal yang ditetapkan. Terdapat juga layanan perpustakaan keliling dengan 5 unit sepeda motor untuk merolling buku pada daerah yang tidak terjangkau bus keliling. Upaya ini dilakukan untuk mendukung pencapaian peningkatan minat baca



masyarakat. Adapun perkembangan pengelolaan perpustakaan di Kabupaten Klaten tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 3.25.

Tabel 3.25.
Perkembangan Jumlah Pengunjung Perpustakaan
di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah koleksi perpustakaan	Judul	41.464	43.979	44.687	45.362	49.786
2	Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	7.673	40.003	41.225	68.346	83.511

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Klaten, 2020.

Berdasarkan Tabel 3.25. sebagaimana tersebut di atas, jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2018 sebanyak 68.346 orang, dan pada tahun 2019 menjadi sebanyak 83.511 orang (atau naik 22,19%). Perkembangan jumlah perpustakaan desa selama tahun 2015–2019 disajikan pada Tabel 3.26.

Tabel 3.26.
Perkembangan Jumlah Perpustakaan Desa
di Kabupaten Klaten Tahun 2015 - 2019

NO	Tahun	Jumlah Perpustakaan
(1)	(2)	(3)
1	2015	44
2	2016	44
3	2017	45
4	2018	45
5	2019	45

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Klaten, 2020.

Berdasarkan Tabel 3.26. sebagaimana tersebut di atas, perkembangan lima tahun terakhir (tahun 2015-2019) bahwa terdapat peningkatan jumlah perpustakaan yang didirikan di desa-desa setiap tahunnya. Namun demikian jumlah perpustakaan desa sampai dengan tahun terakhir hanya sejumlah 45 desa dari 391 desa (atau baru 11,50% dari jumlah desa).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait upaya peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan. Pada tahun 2019, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis: *Meningkatnya Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan* dengan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.



Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi untuk meningkatkan kunjungan masyarakat ke Perpustakaan, diantaranya:

1. Terbatasnya buku literatur yang diminati/dibutuhkan pengunjung; dan
2. Kurang representatifnya ruang baca, sarana dan prasarana perpustakaan.

Solusi:

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki peningkatan pengunjung perpustakaan, diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas pengelola perpustakaan, sesuai dengan dinamika yang berkembang;
- b. Menciptakan lingkungan perpustakaan yang representatif; dan
- c. Menghimpun buku-buku masyarakat yang memiliki nilai untuk dikelola sebagai museum buku.

9. Sasaran Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah;

Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien biasanya dicerminkan ke dalam 3 (tiga) pilar yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sehingga kelihatan, sejauh mana faktor kontribusi masyarakat turut andil menyelesaikan masalah agar ruang demokrasi tumbuh dan berkembang. Ukuran Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien diukur dari tingkat profesionalisme aparatur Pemerintah daerah, sejauh mana data dan informasi dipakai sebagai *Road Map* Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Adapun capaian sasaran: [Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah](#) sebagaimana Tabel 3.27.

Tabel 3.27.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Indeks Profesionalitas ASN	-	74	84,07	77,55	92,24	87,36	88,77

Sumber: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, 2020.

*) Catatan: Kondisi awal belum terisi karena pengisian Indeks Profesionalitas ASN dimulai tahun 2017.

Tuntutan profesionalitas aparatur sipil negara merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja Pemerintah sebagai kewajiban Pemerintah yang harus bisa diwujudkan untuk mempertanggung-jawaban mandat yang telah diberikan dalam mengelola urusan penyelenggaraan Pemerintah. Capaian Indeks Profesionalitas ASN tahun 2019 merupakan cerminan sejauh mana integritas ASN dalam menjalankan mandat. Capaian Indeks Profesionalitas ASN dapat disajikan pada Tabel 5.28.

Tabel 5.28.
Capaian Indeks Profesionalitas ASN

IPP	Unsur				Jumlah Nilai IPP
	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai	12	35,5	25	5	77,5

Sumber: BKPPD Kabupaten Klaten, 2020.

Capaian kinerja sebagaimana Tabel 5.28. di atas merupakan hasil dari penilaian berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) diperoleh hasil, bahwa pada tahun 2019 nilai IPP mencapai 77,55 dengan (kategori sangat sedang). Keberhasilan ini ditunjang dari unsur:

a. Kualifikasi

Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah, dan diperhitungkan sebesar 25% dari keseluruhan Pengukuran. Pada tahun 2019 jumlah ASN sebanyak 9.877 orang, dengan perincian yang berpendidikan: a) Jenjang SD/MI sebanyak 63 orang (atau 0,64%), b) Jenjang SMP/MTS sebanyak 226 orang (atau 2,29%), c) Jenjang SMA/MA/SMK sebanyak 1.531 orang (atau 15,50%), d) Jenjang D3 sebanyak



1.610 orang (atau 16,30%), e) Jenjang S1 sebanyak 5.884 orang (atau 59,57%), dan f) Jenjang S2 sebanyak 563 orang (atau 5,70%).

b. Kompetensi

Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, dan diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran. Indikator yang digunakan yaitu riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas: a. Diklat Kepemimpinan; b. Diklat Fungsional; c. Diklat Teknis; dan d. Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya.

Kondisi jumlah pegawai Kabupaten Klaten yang berjumlah 9.877 ASN pada tahun 2019 yang mengikuti: Diklat Teknis sesuai Tupoksi sebanyak 353 orang, Diklat Teknis Fungsional sebanyak 63 orang dan Bimbingan Teknis sebanyak 56 orang. Atau dengan kata lain, jumlah ASN yang Diklat dan BinteK hanya berkisar 4,78%. Hal ini menandakan masih diperlukan peningkatan sumber daya aparatur agar kinerja ASN meningkat.

c. Kinerja

Dimensi Kinerja, menurut Peraturan ini digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS, dan diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran.

d. Disiplin

Hukuman disiplin yang sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (5) Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8 Tahun 2019 yaitu yang telah mempunyai keputusan final dan dihitung dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2019 jumlah ASN yang melanggar disiplin sebanyak 10 ASN.

Program yang dilaksanakan pada tahun 2019 untuk sasaran strategis: *Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah* terdiri dari 2 (dua) program, diantaranya:

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; dan
2. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

Permasalahan :

- a. Belum meratanya penyebaran ASN yang berkualitas untuk menempati jabatan strategis di perangkat daerah tertentu; dan
- b. Masih terbatasnya kemampuan SDM perencana dan pelaporan di jajaran OPD untuk mempercepat terwujudnya Pemerintahan yang kredibel.



Solusi :

- a. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas ASN; dan
- b. Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat terwujudnya ASN yang berintegritas dan kompetitif.

10. Sasaran Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah;



Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur Opini BPK terhadap LKPD. Opini BPK terhadap LKPD merupakan penilaian atas kinerja keuangan daerah yang dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk menilai sejauh mana akuntabilitas dan kinerja keuangan Pemerintah daerah telah dilaksanakan dengan baik. Dasar penilaian BPK berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa keuangan, berdasarkan ketentuan ini pemeriksaan dilakukan secara periodik setiap tahun, dan pemeriksaan ini mencakup neraca, laporan realisasi anggaran, laporan kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan yang dihasilkan atas pemeriksaan ini secara bertingkat, terdiri atas: Tidak Wajar (TD), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar dengan Pengecualian (WDP), dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Adapun capaian sasaran: [Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah](#) sebagaimana Tabel 3.29.

Tabel 3.29.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Opini BPK terhadap LKPD	WDP (3)	WTP (4)	WDP (3)	WTP (4)	133,33	WTP (4)	100

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2020.

Catatan: Tidak Wajar (TD) Skor 1, Tidak Memberikan Pendapat (TMP) Skor 2, Wajar dengan Pengecualian (WDP) Skor 3, dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Skor 4.



Realisasi atas target kinerja keuangan menunjukkan hasil kinerja sangat tinggi, atau menghasilkan opini penilaian *WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)*, kinerja ini merupakan komitmen bersama di semua jajaran Pemerintah Kabupaten Klaten untuk mewujudkan aspek akuntabilitas pelaksanaan program/kegiatan, transparansi penggunaan anggaran, dan tertib administrasi sebagai bagian dari fakta integritas yang telah dibangun dan diciptakan penyelenggara negara. Adapun Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2013–2018 disajikan pada Tabel 3.30.

Tabel 3.30.
Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten
Tahun 2015–2018

Tahun	Opini BPK	Keterangan
(1)	(2)	(3)
2015	WTP	<i>Paragraf penjelas berupa:</i> berlarutnya pekerjaan pembangunan menara Masjid Agung, belum memadainya data rincian aset peralatan dan aset tetap lainnya pada sekolah-sekolah, kelebihan pembayaran perjalanan dinas, serta program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian pegawai ASN.
2016	WDP	<i>Paragraf penjelas berupa:</i> belum memadainya data rincian aset peralatan dan aset tetap lainnya pada sekolah-sekolah, kelebihan pembayaran perjalanan dinas, serta program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian pegawai ASN.
2017	WDP	<i>Paragraf penjelas berupa:</i> belum memadainya data rincian aset peralatan dan aset tetap lainnya Perangkat Daerah dan pengelolaan dana BOS.
2018	WTP	<i>Paragraf penjelas berupa:</i> pengendalian rekening pengelolaan KAS dan mekanisme pembayaran langsung masih lemah. Pengelolaan piutang PBB perdesaan dan perkotaan tidak tertib.

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2020.

*) Catatan: Opini BPK tahun 2019 In Proses.

Hasil penilaian sebagaimana tersebut pada Tabel 3.30. di atas, berdasarkan atas Proses pemeriksaan ini meliputi eksaminasi atas dasar pengujian bukti–bukti yang mendukung jumlah pengungkapan laporan keuangan, serta penilaian atas prinsip akuntabilitas yang digunakan dan estimasi yang signifikan, serta penyajian laporan keuangan secara menyeluruh yang dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2019, dengan penguatan program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.



Permasalahan :

- a. Belum meratanya penyebaran ASN yang berkualitas untuk menempati jabatan strategis di perangkat daerah tertentu; dan
- b. Masih terbatasnya kemampuan SDM perencana dan pelaporan di jajaran OPD untuk mempercepat terwujudnya Pemerintahan yang kredibel.

Solusi :

- a. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas ASN yang mengelola barang dan jasa daerah; dan
- b. Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat terwujudnya ASN yang berintegritas dan kompetitif untuk melaksanakan program dan kegiatan berbasis kinerja.

11. Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD;



Salah satu tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD adalah mendukung tugas pokok DPRD, dan membuat laporan administrasi dan keuangan. Adapun capaian sasaran: Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD tahun 2019 sebagaimana Tabel 3.31.

Tabel 3.31.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu	70	93,10	85	91,31	108,60	85	127,76

Sumber: Sekretariat DPRD, 2020.

Berdasarkan Tabel 3.31. sebagaimana tersebut di atas, pada tahun 2019 jumlah Raperda yang disahkan tepat waktu sebanyak 12 Raperda, dari 13 Raperda yang direncanakan.

Mengacu pada pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, serta Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD tahun 2019 capaian kinerja organisasi yang telah dilaksanakan Sekretariat DPRD sampai dengan Tahun 2019 sebagaimana Tabel 3.32.

Tabel 3.32.
Capaian Kinerja Organisasi
Berdasarkan Pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021
Sampai dengan Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (n-1)	Tahun 2019			Target Renstra	
				Target	Realisasi	% Capaian	Target Akhir Renstra	% capaian thd target akhir Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=[(4)+(6)]/(8)*100
1	Menyempurnakan 50system dan prosedur pelayanan kepada DPRD	Jumlah Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD yang ditetapkan	181	56	43	76,79	347	64,55
2	Meningkatnya kualitas layanan legislasi DPRD	Jumlah produk legislasi DPRD	63	28	12	42,86	140	53,57
		Jumlah produk pengawasan DPRD	28	14	13	92,86	84	48,81
		Jumlah produk penganggaran yang dihasilkan	12	4	4	100	18	88,89

Sumber: Sekretariat DPRD, 2020.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang sifatnya progresif, diperoleh hasil :

- a. Jumlah Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD yang ditetapkan
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Jumlah Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD yang ditetapkan pada tahun 2019 capaian kinerjanya sebesar 76,79% (atau dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja **Baik**). Jumlah Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD sampai dengan tahun 2019 sebanyak 224 produk Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD atau Persentase capaian terhadap target akhir Renstra sudah mencapai 64,55%.
- b. Jumlah Produk Legislasi DPRD.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Jumlah produk legislasi DPRD pada tahun 2019 capaian kinerjanya hanya sebesar 42,86% (dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja **Sangat Rendah**). Jumlah produk legislasi DPRD sampai dengan tahun 2019 sebanyak 75 produk legislasi DPRD (Perda) atau Persentase capaian terhadap target akhir Renstra sudah mencapai 53,57%.
- c. Jumlah Produk Pengawasan DPRD.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Jumlah produk pengawasan DPRD pada tahun 2019 capaian kinerjanya sebesar 92,86% (dengan



Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja *Sangat Baik*). Jumlah produk pengawasan DPRD sampai dengan tahun 2019 sebanyak 41 Obyek pengawasan (Obrik) atau Persentase capaian terhadap target akhir Renstra sudah mencapai 48,81%.

d. Jumlah Produk Penganggaran Yang Dihasilkan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Jumlah Produk Penganggaran yang dihasilkan pada tahun 2019 capaian kinerjanya sebesar 100% (dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja *Sangat Baik*). Jumlah produk penganggaran yang dihasilkan sampai dengan tahun 2019 sebanyak 13 produk penganggaran atau persentase capaian terhadap target akhir Renstra sudah mencapai 88,89%.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait: *Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD* pada tahun 2019, dengan penguatan program peningkatan kapasitas DPRD.

Permasalahan:

- a. Belum meratanya penyebaran ASN yang berkualitas untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD; dan
- b. Tingginya mobilitas DPRD yang tidak diimbangi kecepatan pengadministrasian kegiatan terkadang belum bisa diukur sebagai capaian kinerjanya.

Solusi :

- a. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas ASN yang mengelola barang dan jasa daerah; dan
- b. Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat terwujudnya ASN yang berintegritas dan kompetitif untuk melaksanakan program dan kegiatan berbasis kinerja.

12. Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah;



Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien dicerminkan ke dalam 3 (tiga) pilar yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sehingga kelihatan, sejauh mana faktor kontribusi masyarakat turut andil menyelesaikan



masalah agar ruang demokrasi tumbuh dan berkembang. Ukuran Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien diukur pada saat rencana disusun, sejauh mana data dan informasi dipakai sebagai *road map* untuk menyusun sasaran strategis yang hendak dicapai, juga sejauh mana konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran dapat terlaksana dengan tepat waktu dan manfaat.

Adapun capaian sasaran: [Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah](#) sebagaimana Tabel 3.33.

Tabel 3.33.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan	Na	71	100	100	100	90	111,11

Sumber: Bappeda, 2020.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait: [Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah](#) pada tahun 2019, yang didukung perlunya [perencanaan pembangunan Daerah](#) yang wajib berbasis data dan informasi pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga sesuai dengan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dijelaskan bahwa RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dari sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat harus didukung [data dan informasi pelaksanaan pembangunan](#).

Permasalahan:

- a. Belum meratanya penyebaran ASN yang berkualitas untuk mendukung tugas dan fungsi perencana; dan
- b. Tidak tersedianya data dan informasi pelaksanaan yang mudah diakses sebagai bahan penyusunan rencana, dan evaluasi kinerja.

Solusi:

- a. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas ASN perencana;



- b. Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat terwujudnya pembangunan daerah yang berintegritas dan kompetitif untuk melaksanakan program dan kegiatan berbasis kinerja; dan
- c. Perencanaan pembangunan daerah harus didukung *base line data dan informasi pembangunan* yang akurat, dan tepat manfaat. Dukungan semua pihak untuk mewujudkan perencanaan yang tepat waktu dan manfaat, serta untuk menjaga konsistensi antar dokumen rencana sangat dibutuhkan sekaligus sebagai upaya kita mendukung: *Terwujudnya Masyarakat Klaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing.*

13. Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Arsip SKPD;



Upaya Pemerintah kabupaten dalam meningkatkan tata kelola Arsip SKPD dengan melakukan berbagai perbaikan sarana dan prasarana kearsipan, dan peningkatan pengelolaan arsip secara terpadu. Langkah ini diharapkan akan meningkatkan tata kelola Arsip. Adapun capaian sasaran: *Meningkatnya Tata Kelola Arsip SKPD* disajikan pada Tabel 3.34.

Tabel 3.34.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Tata Kelola Arsip SKPD

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Persentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku	5	11,72	5	12,56	251,2	25	50,24

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan, 2020.

Pengelolaan kearsipan sebagai bagian dari aset Pemerintah daerah dilihat dari jumlah arsip yang tercatat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada

Tahun 2015 sebanyak 68.700 arsip, dan pada Tahun 2019 sudah mencapai 98.635 arsip. Gambaran pengelolaan kearsipan di Kabupaten Klaten pada Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 3.35.

Tabel 3.35.
Pengelolaan Kearsipan di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Arsip	Jumlah	68.700	74.700	78.434	87.625	98.635

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Klaten, 2020.

Berdasarkan Tabel 3.35. sebagaimana tersebut di atas, Pelayanan arsip untuk OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten diharapkan dapat berkembang kearah arsip digital, sehingga akan lebih memudahkan dalam pencarian arsip. Dengan semakin meningkatnya jumlah koleksi arsip dan semakin mutakhirnya pengelolaan kearsipan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung perpustakaan, sehingga bisa meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan Daerah.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait: [*Meningkatnya Tata Kelola Arsip SKPD*](#) dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk turut serta memanfaatkan *data dan informasi pelaksanaan pembangunan* yang terdokumentasikan/tersiapkan.

Permasalahan:

- a. Belum meratanya penyebaran ASN yang berkualitas untuk mendukung pengembangan dan pengelolaan arsip Daerah; dan
- b. Terbatasnya ruang untuk penyimpan arsip, dan sebagian besar arsip belum terdigitalisasi.

Solusi:

- a. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas ASN pengelola arsip; dan
- b. Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat terwujudnya pembangunan daerah yang berintegritas dan kompetitif untuk melaksanakan program dan kegiatan berbasis kinerja.



14. Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel;



Pemerintahan Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan terdepan memerlukan peningkatan standar pelayanan dalam hal: pemberdayaan masyarakat, menjaga adat-istiadat, serta melayani kebutuhan administrasi penduduk. Upaya Pemerintah kabupaten dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel dengan melakukan berbagai peningkatan partisipasi, dan penyempurnaan regulasi tentang desa. Langkah ini diharapkan akan meningkatkan tata kelola Pemerintahan Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel. Adapun capaian sasaran: [Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel](#) disajikan pada Tabel 3.36.

Tabel 3.36.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Persentase penyelenggaraan Pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	15	48	72	68	94,44	100	94,44

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2020.

Program pemberdayaan masyarakat untuk mendorong kemandirian desa dan menanggulangi kemiskinan dilaksanakan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pasar Desa.

Jumlah BUMDes dalam kurun waktu belum adanya dukungan dana desa dan komitmen Pemerintah Desa, jumlahnya masih relatif sedikit. Namun ketika Dana Desa mulai digunakan untuk penguatan BUMDes jumlahnya mulai meningkat. Sekarang berjumlah 215 BUMDes yang ada di Kabupaten Klaten saat ini, diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kategori berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan BUMDesa Provinsi Jawa Tengah yaitu: 1. BUMDes Dasar sejumlah 85; 2. BUMDes Tumbuh



sejumlah 112; 3. BUMDes Berkembang sejumlah 24; dan 4. BUMDes Maju sejumlah 5.

Guna pengembangan dan optimalisasi pengelolaan BUMDes maka, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melakukan pendampingan kepada pengelola BUMDes dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Perkembangan lembaga ekonomi Pedesaan tahun 2015–2019 disajikan pada Tabel 3.37.

Tabel 3.37.
Lembaga Ekonomi Perdesaan

Tahun	Jumlah BUMDes	Jumlah Pasar Desa	Pasar Desa Dikelola oleh Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	63	40	5
2016	141	40	5
2017	217	40	5
2018	224	40	5
2019	224	40	5

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2020.

Berdasarkan Tabel 3.37. sebagaimana tersebut di atas, Lembaga ekonomi perdesaan lainnya (Pasar Desa) juga dituntut dapat memberikan kontribusi positif di dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Peran pasar desa belum maksimal karena otoritas manajemen pengelolaan pasar desa belum diberikan sepenuhnya kepada Desa dan masih dikelola oleh Pemerintah Daerah. Hal ini perlu adanya komunikasi dari pihak terkait dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut, lebih lanjut diharapkan adanya keberpihakan terhadap APBDes dalam rangka pengembangan Pasar Desa.

Pelatihan teknologi tepat guna di perdesaan dari kurun waktu tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 3.38.

Tabel. 3.38.
Pelatihan Teknologi Tepat Guna Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jenis Pelatihan TTG yang telah diberikan	1. Pelatihan Ternak Lele dengan metode Bioflock Pemanfaatan TTG di Desa Drono peserta dari Desa Drono, Tempursari, Desa Ngawen Kec. Ngawen Desa Wiro Kec. Bayat Desa Ngawonggo Kec. Ceper	1. Pelatihan Pembuatan Aneka Kripik bahan Singkong Pemanfaatan TTG di Desa Bono peserta dari Desa Bono, Pucangmili ran dan Wunut Kec. Tulung	1. Pelatihan Hidroponik Pemanfaatan TTG di Desa Bawukan peserta dari Desa Bawukan dan Desa Panggang Kecamatan Kemalang 2. Pelatihan Ternak Lele dengan metode Bioflock Pemanfaatan TTG di Desa	1. Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah organik di desa Solodiran, Kec Manisrenggo 2. Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah organik di desa Kranggan, Kec Manisrenggo 3. Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah organik	1. Pelatihan pembuatan briket arang dengan bahan sampah organik di desa Jurangjero, Kec. Karangnom 2. Pelatihan pembuatan briket arang dengan bahan sampah organik di desa Karang, Kec. Karangnom 3. Pelatihan pembuatan briket arang dengan bahan sampah organik



No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
				Gunung Gajah peserta dari Desa Kebondan dan Desa Gununggajah, Bayat 3 Pelatihan Hidroponik Pemanfaatan TTG di Desa Sidowayah peserta dari Desa Sidowayah dan Desa Kebonharjo Kecamatan Polanharjo	di desa Taskombang, Kec Manisrenggo 4. Pelatihan pembuatan briket orang dengan bahan sampah organik di desa Nangsri, Kec Manisrenggo	di desa Karanganom, Kec. Karanganom 4. Pelatihan pembuatan briket arang dengan bahan sampah organik di desa Jungkare, Kec. Karanganom 5. Pelatihan pertanian hidroponik di desa Kahuman, Kec. Ngawen
2.	Data Perkembangan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dipedesaan	1. Posyantek Kec. Ngawen	1. Posyantek Kec. Kemalang 2. Posyantek Kec. Tulung	1. Posyantek Kec. Karanganom (Keputusan Bupati Klaten No. 414.4/213 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola POSYANTEK Kec. Karanganom Kab. Klaten) 2. Posyantek Kec. Polanharjo (Keputusan Bupati Klaten No. 414.4/214 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola POSYANTEK Kec. Polanharjo Kab. Klaten)	1. Posyantek antar desa TA 2018 di Kec. Cawas, Kec. Wedi	1. Posyantek antar desa Kec. Manisrenggo 2. Posyantek antar desa Kec. Trucuk

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2019.

Berdasarkan Tabel 3.38. sebagaimana tersebut di atas, mekanisme penerapan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Kabupaten Klaten, diawali dengan sosialisasi kepada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Klaten (26 Kecamatan), kemudian proses pembentukan Teknologi Tepat Guna (TTG) dipilih pada kecamatan yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

Data yang tersaji dalam pengembangan kawasan perdesaan hanya ada pada Tahun 2016 dan 2017, dikarenakan kegiatan pengembangan kawasan perdesaan ini



baru dimulai pada Tahun 2016. Pada Tahun 2016 hanya ada 1 data pengembangan kawasan pedesaan yaitu pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Mandiri Pangan di Desa Kaligayam, Desa Kadilanggon, dan Desa Melikan di Kecamatan Wedi. Pengembangan kawasan pedesaan tersebut sudah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa, Penempatan lokasi tersebut di dasarkan pada hasil penelitian Universitas Tidar Kabupaten Magelang. Sedangkan pada Tahun 2017 pengembangan kawasan desa ada 5 data pengembangan kawasan pedesaan dan masih dalam proses penyusunan RPKP, yaitu:

- 1). Pengembangan kawasan desa sentra batik di Desa Jarum, Banyuripan, Beluk dan Kebon di Kecamatan Bayat. Pengembangan kawasan desa batik tersebut telah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa-desa tersebut sebagai sentra penghasil batik di Kabupaten Klaten.
- 2). Pengembangan kawasan desa industri lurik dan pertanian organik di Desa Tlingsing, Mlese, Balak dan Baran di Kecamatan Cawas. Pengembangan kawasan desa industri lurik dan pertanian organik tersebut sudah sesuai dengan potensi yang dimiliki desa.
- 3). Pengembangan kawasan desa wisata budaya berbasis ekonomi di Desa Taskombang, Solodiran, Kranggan, dan Nagsri di Kecamatan Manisrenggo. Pengembangan kawasan desa wisata budaya berbasis ekonomi tersebut sudah sesuai dengan potensi yang dimiliki desa.
- 4). Pengembangan kawasan desa wisata alam lereng merapi di Desa Balerante, Sidorejo, dan Bumiharjo di Kecamatan Kemalang. Pengembangan kawasan desa wisata alam lereng merapi tersebut sudah sesuai dengan potensi desa yang terletak di lereng gunung merapi. Rician pengembangan lokasi desa wisata disajikan pada Tabel 3.39.

Tabel 3.39.
Lokasi Pengembangan Desa Wisata

Tahun	Nama / Tema Kawasan	Lokasi	Tahap Kegiatan	Keterangan
2016	Kawasan Perdesaan Berbasis Mandiri Pangan	Kecamatan Wedi : Ds. Kaligayam, Ds. Kadilanggon, Ds. Melikan	Sudah menyusun RPKP	SK Bupati No. 050/221 Tahun 2016 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Mandiri Pangan di Kabupaten Klaten
2017	Kawasan Sentra Batik	Kecamatan Bayat : Ds. Jarum, Ds. Banyuripan, Ds. Beluk, Ds. Kebon	Proses penyusunan RPKP	SK Bupati No. 050/467 Tahun 2017 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Klaten
	Kawasan Sentra Industri Lurik dan Pertanian Organik	Kecamatan Cawas : Ds. Tlingsing, Ds. Mlese, Ds. Balak, Baran	Proses penyusunan RPKP	SK Bupati No. 050/467 Tahun 2017 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Klaten



Tahun	Nama / Tema Kawasan	Lokasi	Tahap Kegiatan	Keterangan
	Kawasan Wisata Budaya Berbasis Ekonomi	Kecamatan Manisrenggo : Ds. Taskombang, Ds. Solodiran, Ds. Kranggan, Ds. Nangsri	Proses penyusunan RPKP	SK Bupati No. 050/467 Tahun 2017 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Klaten
	Kawasan Wisata Alam Lereng Merapi	Kecamatan Kemalang : Ds. Balerante, Ds. Sidorejo, Ds. Bumiharjo	Proses penyusunan RPKP	SK Bupati No. 050/467 Tahun 2017 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Klaten
2018	Kawasan Wisata Budaya	Kecamatan Prambanan : Ds. Tlogo, Ds. Bugisan, Ds. Kemuda	Proses penyusunan RPKP	SK Bupati No. 050/312 Tahun 2018 tentang Lokasi Pembangunan Perdesaan di Kab. Klaten
	Kawasan Pertanian Organik	Kecamatan Karangnom : Ds. Gempol, Ds. Jeblog, Ds. Ngabeyan, Ds. Pondok	Proses penyusunan RPKP	SK Bupati No. 050/312 Tahun 2018 tentang Lokasi Pembangunan Perdesaan di Kabupaten Klaten
	Kawasan Wisata Terpadu	Kecamatan Kebonarum : Ds. Gondang, Ds. Basin, Ds. Pluneng, Ds. Malangjiwan, Ds. Karangduren, Ds. Ngrundul, dan Ds. Menden	Proses penyusunan RPKP	SK Bupati No. 050/312 Tahun 2018 tentang Lokasi Pembangunan Perdesaan di Kabupaten Klaten
	Kawasan IRT dan Pangan Lestari	Kecamatan Polanharjo : Ds. Kranggan, Ds. Keprabon, Ds. Kebonharjo	Proses penyusunan RPKP	SK Bupati No. 050/312 Tahun 2018 tentang Lokasi Pembangunan Perdesaan di Kabupaten Klaten
	Kawasan Wisata Air dan Pertanian	Kecamatan Polanharjo : Ds. Janti, Ds. Sidowayah, Ds. Sidoharjo	Proses penyusunan RPKP	SK Bupati No. 050/312 Tahun 2018 tentang Lokasi Pembangunan Perdesaan di Kabupaten Klaten
2019	Kawasan Peternakan Kambing	Kecamatan Ngawen: Ds. Gatak, Ds. Duwet, Ds. Manjung	Proses SK Bupati	
	Kawasan Wisata Air dan Perikanan	Kecamatan Tulung: Ds. Wunut, Ds. Cokro, Ds. Daleman, Ds. Dalangan	Proses Persetujuan Kerjasama antar Desa	
	Kawasan Pertanian Terpadu	Kecamatan Delanggu: Ds. Dukuh, Ds. Jetis, Ds. Butuhan, Ds. Banaran, Ds. Bowan, Ds. Sribit, Ds.	Proses Persetujuan Kerjasama antar Desa	



Tahun	Nama / Tema Kawasan	Lokasi	Tahap Kegiatan	Keterangan
		Mendak, Ds. Krecek, Ds. Karang, Ds. Sabrang, Ds. Tlobong, Ds. Gatak, Ds. Delanggu, Ds. Kepanjen, Ds. Segaran, Ds. Sidomulyo.		

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2019.

Berdasarkan Tabel 3.39. sebagaimana tersebut di atas, ada 5 (lima) kawasan dengan desa sebanyak 17 (tujuh belas) desa pengembangan desa wisata masing-masing ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

15. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;



Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien biasanya dicerminkan ke dalam 3 (tiga) pilar yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sehingga kelihatan, sejauh mana faktor kontribusi masyarakat turut andil menyelesaikan masalah agar ruang demokrasi tumbuh dan berkembang. Ukuran Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien diukur pada saat rencana disusun, sejauh mana data dan informasi dipakai sebagai *Road Map* untuk menyusun sasaran strategis yang hendak dicapai, juga sejauh mana konsistensi antar dokumen perencanaan saling menguatkan, sehingga *output*, *outcome* dan *benefite* akan kelihatan progres capaiannya.

Adapun capaian sasaran: [Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah](#) sebagaimana Tabel 3.40.

Tabel 3.40.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Level Maturitas SPIP	1	2	3	3	100	3	100
2	Level Kapabilitas APIP	2	2	3	3	100	3	100
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	47,89(C)	60,33 (B)	66 (B)	61,32 (B)	92,91	70 (B)	87,60 (B)

Sumber: Inspektorat dan Setda Bagian Organisasi, 2020.

1. Level Maturitas Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) dan Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Kapabilitas APIP ditingkatkan untuk memastikan dan mengurangi terjadinya penyimpangan/penyelewengan atas tujuan yang akan dicapai melalui Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP). Level Maturitas SPIP Kabupaten Klaten berada di level 3 berdasarkan hasil Penjaminan Kualitas atas pelaksanaan penilaian maturitas level SPIP di Kabupaten Klaten tanggal 26 November 2019 oleh Tim Penjamin Kualitas dari Badan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat. Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor LHR-586/D3.04/2/2019 Tanggal 21 Juni 2018, Inspektorat Kabupaten Klaten disimpulkan bahwa Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Klaten berada pada level 3.

2. Level Maturitas SPIP

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah. Maturitas SPIP terdiri dari 5 tingkatan yaitu:

1. Level 0 (belum ada), Belum memiliki kebijakan dan prosedur;
2. Level 1 (Rintisan), Ada praktik pengendalian intern - ada kebijakan dan prosedur tertulis, namun masih bersifat *ad-hoc* dan tidak terorganisasi dengan baik. Tanpa komunikasi dan pemantauan;
3. Level 2 (Berkembang), Ada praktik pengendalian intern tapi tidak terdokumentasi dengan baik. Pelaksanaan tergantung pada individu dan



belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi.

4. Level 3 (Terdefinisi), Ada praktik pengendalian intern yang terdokumentasi dengan baik. Evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.
5. Level 4 (Terkelola & Terukur), Ada praktik pengendalian internal yang efektif. Evaluasi formal dan terdokumentasi.
6. Level 5 (Optimum), Menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan. Pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer.

Kabupaten Klaten menetapkan target pada tahun 2019 mencapai tingkat maturitas SPIP level 3 (tiga). Target tersebut telah tercapai dengan baik pada tahun 2019 karena berdasarkan penilaian telah terdapat pengendalian intern walaupun belum terdokumentasi dengan baik. Penilaian Maturitas SPIP dilakukan dua tahap yaitu penilaian mandiri oleh Inspektorat dan kemudian dilakukan *Quality Assurance* (kendali mutu) oleh tim dari Badan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY. Penilaian mandiri telah dilakukan pada akhir tahun 2017 dan kemudian dilakukan kendali mutu oleh BPKP DIY pada awal tahun 2018 dengan nilai akhir 2,29. Penilaian mandiri dilakukan kembali pada akhir tahun 2018 dengan nilai 3,35 kemudian direviu oleh BPKP DIY dengan nilai 3,15. Akhirnya berdasarkan hasil *Quality Assurance* dari BPKP Pusat tertanggal 26 November 2019, Kabupaten Klaten dinyatakan telah mencapai Level 3 Maturitas SPIP.

3. Level Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP ditargetkan pada tahun 2018 mencapai level 3 (tiga), namun demikian realisasinya baru mencapai level 2. Sama dengan Penilaian Maturitas SPIP, Penilaian tingkat kapabilitas APIP dilakukan dua tahap yaitu penilaian mandiri oleh Inspektorat dan kemudian dilakukan *Quality Assurance* (kendali mutu) oleh tim dari Badan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY. Penilaian Mandiri atas kapabilitas APIP di Kabupaten Klaten telah dilakukan sebanyak dua kali. Penilaian mandiri pertama dilakukan pada bulan April 2018 dan penilaian mandiri kedua dilakukan pada Bulan November 2018. Atas penilaian mandiri pertama telah dievaluasi oleh BPKP DIY dengan hasil penilaian Inspektorat Kabupaten Klaten mencapai level 2 (dua). Penilaian Mandiri tingkat Kapabilitas APIP yang diselesaikan tanggal 13 November 2018 telah menunjukkan bahwa Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Klaten telah mencapai level 3 (tiga), namun demikian hasil evaluasi (*quality Assurance*) dari BPKP Pusat baru mencapai Level 2+, dengan penjelasan sebagaimana Tabel 3.41.



Tabel 3.41.
 Penjaminan Kualitas Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP
 Inspektorat Kabupaten

No	Elemen	Level
(1)	(2)	(3)
1	Peran dan Layanan	3
2	Manajemen Sumber Daya Manusia	2
3	Praktik Profesional	2
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3
5	Budaya dan Hubungan	3
6	Struktur Tata Kelola	3

Sumber: Inspektorat Kabupaten Klaten, 2020.

Peningkatan Level Kapabilitas APIP ini dilakukan dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh *Institute of Internal Auditor (IIA) Research Foundation* yaitu *Internal Audit Capability Model (IA-CM)*. Model Kapabilitas Pengawasan Intern atau Internal Audit Capability Model (IA-CM) adalah suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik. IA-CM dimaksudkan sebagai model universal dengan perbandingan sekitar prinsip, praktik, dan proses yang dapat diterapkan secara global untuk meningkatkan efektivitas pengawasan intern. Terdapat 6 (enam) elemen yang dinilai dari model tersebut yaitu Peran dan Layanan; Pengelolaan Sumber Daya Manusia; Praktik Profesional; Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja; Budaya dan Hubungan Organisasi; serta Struktur Tata Kelola.

Berdasarkan Tabel 3.41. sebagaimana tersebut di atas, penyebab belum tercapainya Level 3, diantaranya:

- a. Inspektorat belum mempunyai SDM yang berkualifikasi sebagai Perencana Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) disebabkan Inspektorat belum menginternalisasi peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kerangka kompetensi (KPA tersedianya Staf APIP yang berkualifikasi profesional pada elemen 2);
- b. Inspektorat belum menilai keakuratan hasil penilaian risiko (*risk register*) OPD dan menggunakannya sebagai dasar untuk penyusunan PPBR.

Selanjutnya berdasarkan nilai Penjaminan Kualitas Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP yang masih pada level 2, Inspektorat Kabupaten Klaten melakukan penilaian mandiri ke BPKP DIY untuk mendapatkan QA, dan diajukan ke BPKP Pusat untuk direviu. Selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil reviu (LHR) dari Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Direktorat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah (BPKP) Nomor LHR-



586/D3.04/2/2019, tertanggal 26 Desember 2019 dinyatakan Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Klaten telah berada pada level 3, sebagaimana Tabel 3.42.

Tabel 3.42.
Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Klaten

No	Elemen	Hasil SA	Hasil QA	Hasil Reviu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peran dan Layanan	3	3	3
2	Manajemen Sumber Daya Manusia	3	3	3
3	Praktik Profesional	3	3	3
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	3	3
5	Budaya dan Hubungan	3	3	3
6	Struktur Tata Kelola	3	3	3

Sumber: Inspektorat Kabupaten Klaten, 2020.

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Tuntutan akuntabilitas kinerja Pemerintah merupakan kewajiban Pemerintah yang harus bisa diwujudkan untuk mempertanggung-jawaban mandat yang telah diberikan dalam mengelola urusan penyelenggaraan Pemerintah. Sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016–2021 mengupayakan pentingnya *Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih* yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan pembangunan daerah dengan *Meningkatkan efektivitas organisasi Pemerintah Daerah yang peka terhadap permasalahan dan perubahan lingkungan internal maupun eksternal, dan Mewujudkan tata Pemerintahan yang efektif dan efisien.*

Capaian kinerja telah menunjukkan hasil yang meningkat. Target yang ditetapkan pada tahun 2019 dengan nilai 66, namun terealisasi 61,32 (dengan Kategori B). Perolehan skor 61,32 dengan kriteria sedang.

Berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdapat beberapa ikhtisar penting terkait penilaian kinerja instansi Pemerintah di Kabupaten Klaten, diantaranya:

1. Pemerintah Kabupaten Klaten memperoleh nilai 61,32 atau dengan predikat B. Secara rinci hasil penilaian tersebut, sebagai berikut:
 - Perencanaan kinerja nilai 20,79
 - Pengukuran kinerja nilai 15,16
 - Pelaporan kinerja nilai 10,21
 - Evaluasi kinerja nilai 5,03
 - Capaian kinerja nilai 10,14
2. Nilai ini merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten.



3. Pemerintah Kabupaten Klaten telah membangun akuntabilitas kinerja di semua jenjang Pemerintahan dengan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang mencakup: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.
4. Secara umum atas kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten adalah baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan ke depan, agar kinerja pada instansi Pemerintah terus mengalami peningkatan.

Langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan guna meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja, adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan, dengan langkah-langkah;
 - a). Mereviu dokumen perencanaan untuk melihat ketepatan dan sinkronisasi antara tujuan, sasaran, indikator kinerja untuk mencapai target pembangunan jangka menengah dan panjang daerah.
 - b). Memperbaiki dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja sesuai dengan hasil reviu sebagai acuan penyusunan anggaran dengan menyusun agenda aksi daerah.
- b. Memperbaiki kualitas pengukuran kinerja melalui langkah-langkah;
 - a). Menerapkan sistem pengukuran kinerja secara konsisten, dan sebagai bahan penilaian kinerja lembaga/pejabat, sekaligus sebagai pengendalian rencana.
 - b). Memastikan penerapan dan penetapan Perjanjian Kinerja secara berjenjang mulai eselon II, III sampai pada tingkatan eselon IV.
- c. Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja terhadap OPD, serta kualitas evaluasi program; dan
- d. Melakukan pengendalian dan evaluasi secara berjenjang terhadap capaian kinerja baik di tingkat kabupaten maupun OPD sebagai dasar penerapan pemberian *reward and punishment* dalam rangka semakin mendorong terciptanya manajemen berbasis kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah terdiri dari 3 (tiga) program, diantaranya:

1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Tata Laksana Perangkat Daerah; dan
3. Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan.



Permasalahan :

1. Tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal dari Audit yang belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi atas LHP yang telah diterbitkan dalam menindaklanjuti hasil temuan.
2. Terbatasnya jumlah sumber daya aparatur pengawas/auditor.
3. Masih adanya ketidaktertiban pengelolaan barang daerah oleh OPD pengelola.

Solusi :

1. Penguatan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal dengan pembuatan regulasi, sosialisasi, koordinasi intensif, serta penguatan komitmen auditor dalam melaksanakan penyelesaian tindak lanjut pengawasan.
2. Mengajukan formasi auditor dan mengirimkan diklat fungsional/substantif ke lembaga diklat yang berkompeten.
3. Penguatan komitmen seluruh kepala OPD dalam penerapan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kedepan akan terus diupayakan langkah-langkah guna mempertahankan opini WTP, dengan penguatan komitmen semua sepihak, baik pimpinan maupun pejabat fungsional umum Kabupaten Klaten untuk mempertahankan opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten.

16. Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;



Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien biasanya dicerminkan ke dalam 3 (tiga) pilar yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sehingga kelihatan, sejauh mana faktor kontribusi masyarakat turut andil menyelesaikan masalah agar ruang demokrasi tumbuh dan berkembang. Ukuran Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien diukur pada saat rencana disusun, sejauh mana data dan informasi dipakai sebagai *road map* untuk menyusun sasaran strategis yang hendak dicapai, juga sejauh mana konsistensi antar dokumen perencanaan saling menguatkan, sehingga *output*, *outcome* dan *benefit* akan kelihatan progres capaiannya.

Adapun capaian sasaran: [Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah](#) sebagaimana Tabel 3.43.

Tabel 3.43.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi
Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	2,6	3,09	3	3,22	107,33	3,1	3,22

Sumber: Setda Bagian Pemerintahan, 2020.

Catatan: Kondisi capaian 2019 baru penilaian dari Provinsi, dari Depdagri belum keluar.

Dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016–2021 telah ditetapkan adanya kebijakan daerah untuk : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan pembangunan daerah dengan Meningkatkan efektivitas organisasi Pemerintah Daerah yang peka terhadap permasalahan dan perubahan lingkungan internal maupun eksternal, dan mewujudkan tata Pemerintahan yang efektif dan efisien.

Capaian EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah) Kabupaten Klaten tahun 2019 dengan skor 3,22 tergolong sangat tinggi, dan perolehan skor ini apabila dirangking untuk tingkat Provinsi Jawa Tengah menduduki posisi 23 (dua puluh tiga) dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Ke depan untuk memperbaiki peringkat EKPPD diperlukan langkah–langkah sebagai berikut:

- a. Peningkatan koordinasi secara lebih intensif dengan sesama OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
- b. Melakukan pendampingan/desk dengan OPD dalam mengisi format EKPPD.
- c. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Daerah (BPKP dan Inspektorat).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien, dan program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah terdiri dari 6 (enam) program, diantaranya:

1. Peningkatan Kinerja Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
2. Peningkatan Kerjasama Daerah;
3. Pengembangan Wilayah Perbatasan;
4. Peningkatan koordinasi pembinaan fasilitasi administrasi Tata Kelola Kecamatan;
5. Pengembangan Komunikasi Informatika Mass Media;



6. Peningkatan Koordinasi Pembinaan Fasilitas Pemberdayaan Desa/Kelurahan di kecamatan;
7. Peningkatan Koordinasi Pembinaan Fasilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan;
8. Peningkatan Koordinasi Pembinaan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan; dan
9. Kerjasama informasi dengan Mass Media.

Permasalahan :

- a. Masih adanya kendala pengumpulan data dan pengukuran data kinerja secara akurat dan cepat; dan
- b. Masih terbatasnya kemampuan SDM perencana dan pelaporan di jajaran OPD untuk mempercepat terwujudnya Pemerintahan yang kredibel.

Solusi :

- a. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas OPD;
- b. Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat pengukuran kinerja dan mengambil tindakan/intervensi tepat waktu apabila diperlukan.

17. Sasaran Meningkatnya Koordinasi Penataan Peraturan Perundang-Undangan serta Bantuan Hukum dan HAM;



Untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur dengan indikator persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara, dan Indeks Kabupaten Peduli HAM.

Adapun capaian sasaran: *Meningkatnya Koordinasi Penataan Peraturan Perundang-Undangan serta Bantuan Hukum dan HAM* sebagaimana Tabel 3.44.

Tabel 3.44.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Koordinasi Penataan Peraturan Perundang-Undangan serta
Bantuan Hukum dan HAM

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara	80	90	90	83	92,22	90	83
2	Indeks Kabupaten Peduli HAM	0	234	80	90	112,50	80	90

Sumber: Setda Bagian Hukum, 2020.

1. Persentase Tercapainya Penyusunan Produk Hukum dan Penanganan Perkara

Pada tahun 2019 direncanakan sebanyak 63 Produk Hukum Daerah, dengan perincian: sebanyak 13 Peraturan Daerah, dan 50 Peraturan Bupati. dibahas tepat waktu, terealisasi sebanyak (12 Perda + 96 Perbup). Jumlah perkara yang ditangani sebanyak 6 perkara, dan terselesaikan sebanyak 6 perkara.

2. Indeks Kabupaten Peduli HAM

Penghargaan atas martabat manusia adalah hak setiap warga negara yang wajib diberikan negara. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menjamin hak setiap warga negara diukur dari Indeks Kabupaten Peduli HAM.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: Persentase Tercapainya Penyusunan Produk Hukum dan Penanganan Perkara di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2019, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis sasaran dengan program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.

Permasalahan:

1. Banyaknya produk hukum nasional yang belum ditindaklanjuti dengan peraturan daerah, begitu pula sebaliknya banyak peraturan daerah yang perlu ditinjau ulang.
2. Supremasi hukum belum sepenuhnya dapat diimplementasikan sebagai penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan yang muncul.
3. Pembangunan berbasis isu, sepenuhnya belum dianalisis secara tata naskah akademis baik menyangkut aspek: yuridis, sosial dan filosofinya.

Solusi:

1. Pemerintah wajib hadir memberi perlindungan HAM terhadap warga negara yang mengalami ancaman.



2. Pemerintah wajib memenuhi hak-hak politik, memberi peluang berkembangnya aspek kebebasan sipil, memeperkuat aspek kelembagaan demokrasi agar Kabupaten Peduli HAM dapat diwujudkan.
3. Memperkuat Sekretariat Komisi HAM Kabupaten.

18. Sasaran Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan;



Untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur dengan indikator persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana). Adapun capaian sasaran: Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana Tabel 3.45.

Tabel 3.45.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)	80	87,78	90	81	90,00	90	90

Sumber: Setda Bagian Pembangunan, 2020.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam meningkatkan kinerja pembangunan dilakukan dengan melakukan Rapat Koordinasi “*Senenan*” dan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan secara rutin, hal ini sebagai bentuk agenda aksi untuk pengendalian kegiatan yang diharapkan menjaga konsistensi capaian pelaksanaan pembangunan dengan target rencana. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 169 program dengan 2.918 kegiatan. Realisasi fisik tercapai 95% dari target rencana. Dukungan dana untuk melaksanakan pembangunan dianggarkan sebanyak Rp.1.012.713.701.277,52 dan terserap sebesar Rp.857.012.047.026,68 (atau 84,63%).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatkan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan. Pada tahun 2019, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis: Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan, dengan program Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan.

Permasalahan:

1. Ada beberapa kegiatan fisik yang tidak bisa diselesaikan tepat waktu, karena terbatasnya masa kontrak pekerjaan tidak mencukupi waktunya untuk menyelesaikan pekerjaan, misalnya Pembangunan Gedung Pemda II.

Solusi:

1. Mengefektifkan Pengendalian kegiatan agar semua pekerjaan fisik dapat diselesaikan tepat waktu dan tepat manfaat.

19. Sasaran Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang Kredibel



Untuk mewujudkan sasaran Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur dengan indikator Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi. Adapun capaian sasaran: Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang Kredibel sebagaimana Tabel 3.46.

Tabel 3.46.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Kredibel

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi)	0	100	100	100	100	100	

Sumber: Setda Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, 2020.



Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam meningkatkan kinerja pembangunan: Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang Kredibel dilakukan secara transparan, dan terbuka untuk publik. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 198 usulan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, dari sebanyak 198 usulan yang lolos seleksi secara elektronik sebanyak 198, gagal lelang sebanyak 2, 1 jasa pengadaan barang dan jasa dikembalikan ke OPD, dan 5 penunjukan langsung oleh OPD terkait.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Kredibel dilakukan secara transparan, dengan dukungan program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (Pelayanan Pemilihan penyedia barang dan jasa).

Permasalahan:

Karena semua sistem sudah dijalankan secara *online*, tertutup kemungkinan adanya praktek penyimpangan.

Solusi:

Mengefektifkan Pengendalian kegiatan agar semua pekerjaan fisik dapat diselesaikan tepat waktu.

20. Sasaran Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi Bidang Kehumasan dan Keprotokolan;



Untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur dengan indikator kinerja, diantaranya: Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah, Persentase dokumentasi kegiatan kepala Daerah, dan Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah. Adapun capaian sasaran: Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi Bidang Kehumasan dan Keprotokolan sebagaimana Tabel 3.47.

Tabel 3.47.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi Bidang Kehumasan dan Keprotokolan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah	90	88,14	96	98	102,08	90	108,89
2	Persentase dokumentasi kegiatan kepala Daerah	90	98,08	96	98	102,08	90	108,89
3	Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan Kepala Daerah	100	95	96	98	102,08	100	98

Sumber: Setda Bagian Humas, 2020.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam Meningkatkan Fasilitasi Koordinasi Bidang Kehumasan dan Keprotokolan, pada tahun 2019, diantaranya:

1. Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah
Jumlah publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah yang direncanakan pada tahun 2019 sebanyak 1720, dan terealisasi sebanyak 1.687 (atau 98%).
2. Persentase Dokumentasi Kegiatan Kepala Daerah
Jumlah dokumentasi kegiatan Kepala Daerah yang direncanakan sebanyak 2400 dan terealisasi sebanyak 2.352 (98%).
3. Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan Kepala Daerah
Jumlah pelayanan keprotokolan kegiatan Kepala Daerah yang direncanakan sebanyak 240 dan terealisasi sebanyak 235 (atau 98%).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi Bidang Kehumasan dan Keprotokolan untuk mendukung kegiatan Kepala Daerah dilakukan dengan program Kerjasama dengan Mass Media.

Permasalahan:

Liputan kegiatan Kepala Daerah, belum menjadi dokumen cerita historis ke Pemerintahan baru sebatas berita/informasi.

Solusi:

Menyusun sekapur sirih setiap event Kepala Daerah yang memiliki nilai historis menjadi cerita sukses perjalanan Pemerintah.



21. Sasaran Meningkatnya Fasilitasi dan Pengawasan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian;



Untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Fasilitasi dan Pengawasan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur dengan indikator kinerja Tingkat Inflasi YoY. Adapun capaian sasaran: [Meningkatnya Fasilitasi dan Pengawasan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian](#) sebagaimana Tabel 3.48.

Tabel 3.48.

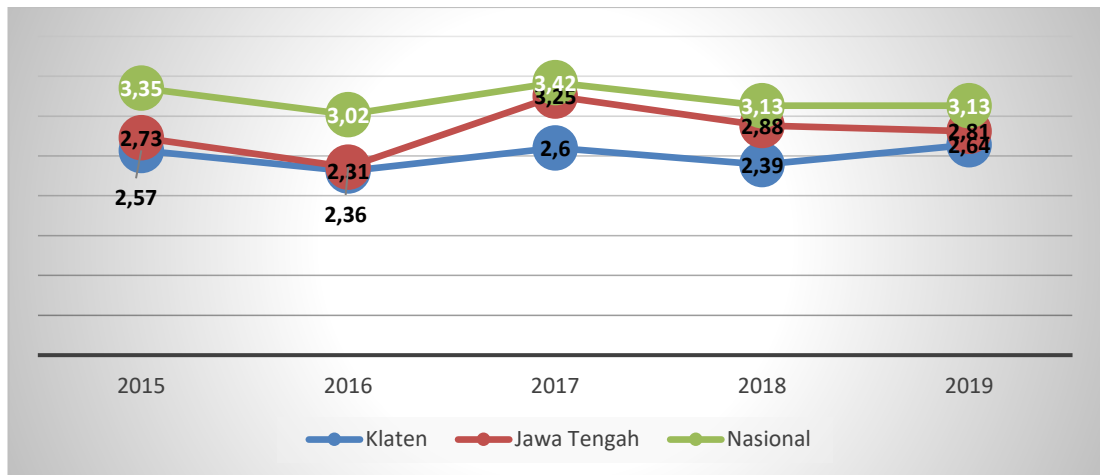
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Fasilitasi dan Pengawasan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Tingkat Inflasi YoY	4(± 1)	2,39	3,5 (± 1)	2,64	75,43	3,5 (± 1)	2,64

Sumber: Setda Bagian Perekonomian, 2020.

Perkembangan inflasi di Kabupaten Klaten selama tahun 2015-2019 sangat fluktuatif. Inflasi di Kabupaten Klaten pada Tahun 2015 sebesar 7,55%, atau lebih tinggi dibanding Tahun 2019 sebesar 2,64%. Penurunan nilai inflasi disebabkan adanya pelaksanaan program pembangunan yang sinergis dan harga komoditas yang stabil. Perkembangan laju inflasi di Kabupaten Klaten selama Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Grafik 3.14.





Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Klaten, 2020.

Grafik 3.14. Laju Inflasi di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019

Berdasarkan Grafik 3.14. di atas, laju inflasi selama tahun 2015-2019 mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif, namun berdasarkan penggolongannya, inflasi di Kabupaten Klaten apabila dilihat termasuk ringan, karena masih dibawah 10% pertahunnya, dan juga di bawah inflasi nasional maupun provinsi. Sedangkan untuk Tahun 2019 inflasi di Kabupaten Klaten sebesar 2,64% disebabkan oleh terkendalinya harga beberapa komoditas pangan utama dan berfungsinya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Klaten.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: Meningkatnya Fasilitas dan Pengawasan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dalam menjaga stabilitas harga dengan menjaga inflasi daerah, agenda aksi ini dilakukan melalui program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.

Permasalahan:

Fluktuatifnya harga kebutuhan pokok, seringkali bergerak lebih cepat dari upaya Pemerintah untuk melakukan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan. Karena kegiatannya Pemerintahan bersifat "linier" tidak "given" atau menunggu waktu.

Solusi:

1. Perlunya stok kebutuhan bahan pokok yang aman dan tersedia; dan
2. Menggerakkan kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Klaten untuk bergerak cepat mengatasi gejolak harga yang dimungkinkan terjadi.



22. Sasaran Meningkatnya Koordinasi Kesejahteraan Rakyat;



Untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Koordinasi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur dengan indikator kinerja Persentase keterlibatan *stakeholder* dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra. Adapun capaian sasaran: [Meningkatnya Koordinasi Kesejahteraan Rakyat](#) sebagaimana Tabel 3.49.

Tabel 3.49.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Koordinasi Kesejahteraan Rakyat

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Persentase keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan pembangunan bidang Kesra	90	90	95	95	100	95	100

Sumber: Setda Bagian Kesra, 2020.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam Meningkatkan Koordinasi Kesejahteraan Rakyat, pada tahun 2019 jumlah keterlibatan *stakeholder* dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra yang direncanakan sebanyak 300 pemangku kepentingan, dan terealisasi sebanyak 285 (atau 95%). Kegiatan yang dilakukan diantaranya: penyaluran bantuan bagi PMKS, penguatan Pokja Lansia, dan fasilitasi bantuan sosial lainnya.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: [Meningkatnya Koordinasi Kesejahteraan Rakyat](#) untuk mendukung kegiatan Perangkat Daerah dilakukan dengan program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

Permasalahan:

Kompleksitas permasalahan sosial belum disusun rencana Aksi Daerah untuk mengatasi isu daerah yang berkembang terkait dengan bidang Kesra.

Solusi:

Perlu disusun Renaksi Daerah Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dengan Perangkat Daerah terkait.

23. Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah;



Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak azasi setiap warga negara, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996. Ketentuan peraturan perundangan ini telah ditindak-lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, ditegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pembangunan nasional dan membentuk manusia Indonesia yang berkualitas, mandiri dan sejahtera melalui perwujudan persediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Pada kenyataannya peta penduduk rawan pangan yang dilansir BPS masih menunjukkan situasi yang sangat memprihatinkan. Rendahnya aksesibilitas pangan, dengan indikator kemampuan rumah tangga untuk selalu memenuhi kebutuhan pangan anggotanya akan mendorong penurunan konsumsi makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman di tingkat rumah tangga. Pada akhirnya akan mengancam dan berdampak pada kekurangan gizi masyarakat, terutama pada kelompok rentan yaitu ibu, bayi dan anak.

Adapun capaian sasaran: [Meningkatnya Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah](#) sebagaimana Tabel 3.50.

Tabel 3.50.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	12,5	10,98	12,3	10,98	89,27	12,6	87,14

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2020.

Luas wilayah Kabupaten Klaten sebesar 655,56 Km². Pada Tahun 2018 berdasarkan pemakaian di lahan pertanian untuk penggunaan lahan sawah 32.959,2 Ha dan untuk lahan bukan sawah sebesar 6.579,5 Ha. Sedangkan untuk lahan bukan pertanian seluas 26.017 Ha. Menurut sistem penggunaan air di Kabupaten Klaten, menunjukkan bahwa sawah dengan sistem pengairan teknis seluas 19.012 Ha, sistem pengairan setengah teknis seluas 10.314 Ha; sistem pengairan sederhana seluas 2.202 Ha, serta sistem tadah hujan seluas 1.631 Ha.

Penggunaan lahan di Kabupaten Klaten setiap tahunnya selalu berubah dan cenderung mengikuti pertambahan jumlah penduduk, dan perluasan kegiatan perekonomian. Perubahan tata guna lahan berhubungan dengan lahan sawah dan lahan kering. Adapun Luas Lahan Pertanian dan Bukan Lahan Pertanian di Kabupaten Klaten tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 3.51.

Tabel 3.51.

Luas Lahan Pertanian dan Bukan Lahan Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun 2015–2019

No.	Kecamatan	Lahan Pertanian Sawah	Lahan Pertanian Bukan Sawah	Lahan Bukan Pertanian	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Prambanan	1,235	13.0	1,195	2,443
2	Gantiwarno	1,608	155.0	801	2,564
3	Wedi	1,543	18.0	8777	2,438
4	Bayat	810	785.0	2,348	3,943
5	Cawas	2,139	46.0	1.262	3,447
6	Trucuk	1.873	2.0	1.506	3,381
7	Kalikotes	710	8.0	580	1,298
8	Kebonarum	704	2.0	261	967
9	Jogonalan	1.474	1.0	1.126	2,670
10	Manisrenggo	1.431	139.0	1.099	2,696
11	Karangnongko	724	851.0	666	2,674
12	Ngawen	1.023	8.0	1.009	1,697
13	Ceper	1.429	7.0	634	2,445



No.	Kecamatan	Lahan Pertanian Sawah	Lahan Pertanian Bukan Sawah	Lahan Bukan Pertanian	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	Pedan	839	444.3	809	1,917
15	Karangdowo	2.045	69.0	1.026	2,923
16	Juwiring	1.941	12.0	964	2,979
17	Wonosari	2.136	14.0	614	3,114
18	Delanggu	1.263	1.0	556	1,878
19	Polanharjo	1.736	92.0	762	2,384
20	Karanganom	1.633	11.0	1.064	2,406
21	Tulung	1.669	466.5	1.435	3,200
22	Jatinom	576	1,542.8	3.2	3,553
23	Kemalang	51	1,847.8	67	5,166
24	Klaten Selatan	781	3.0	659	1,443
25	Klaten Tengah	285	1.0	606	892
26	Klaten Utara	285	40.0	713	1,038
	Jumlah 2019	31.943,0	6,579.5	27.034	65,556,0
	2018	32,959.2	6,579.5	27.034	65,556,0
	2017	33,021.0	6,581.0	25,954.0	65,556.0
	2016	33,066.0	6,581.0	25,909.0	65,556.0
	2015	33,111.0	6,581.0	25,684.0	65,556.0

Sumber: DPKPP Kab. Klaten, 2020.

Sedangkan LP2PB (Lahan Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan) seluas 32.451 Ha sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), khususnya peruntukan sawah lestari Daerah. Dengan adanya LP2PB tersebut, alih fungsi lahan pertanian dapat dikendalikan dengan rata-rata perubahan lahan pertanian 56 Ha di luar LP2PB.

Untuk mengatasi perubahan lahan, dan mengganti produksi pertanian yang hilang akibat perubahan lahan pertanian dikembangkan pola pertanian terpadu, yang merupakan integrasi antara bidang tanaman pangan, bidang peternakan, dan bidang perikanan yang diharapkan kedepan bisa menjadi Kawasan Agropolitan. Perkembangan luas tanam dan luas panen tanaman pangan Tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 3.52.



Tabel 3.52.
Perkembangan Luas Tanam dan Luas Panen Tanaman Pangan
Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019

No	Jenis Komoditas	2015		2016		2017		2018		2019	
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)
1	Padi	69.158	68.661	76.029	73.627	74.964	73.962	70,421	73,810	68,039	69,962
2	Jagung	11.784	11.484	9.682	9.549	11.713	11.085	10510.6	10292.2	12.284	11.344
3	Kedelai	2.820	2.816	1.935	1.523	2.562	2.234	3744.8	3554.7	1.509	1.572
4	Kacang Tanah	2.074	2.073	1.224	1.067	955	909	1346.3	1296.3	843,8	1.037
5	Kacang Hijau	116	115	350	299	240	228	18.4	4	371,3	369,3
6	Ubi Kayu	707	707	822	685	435	395	304.9	357.9	561	724
7	Ubi Jalar	32	28	24	20	26	21	31	29	37,3	43,2

Sumber: DPKPP Kab. Klaten, 2020.

Sedangkan Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 3.53.

Tabel 3.53.
Perkembangan Produksi dan Produktivitas
Tanaman Pangan Tahun 2015-2019

No	Jenis Komoditas	2015		2016		2017		2018		2019	
		Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)
1	Padi	437.623	63,29	426.028	57,87	380.268	51,41	458,992	61.80	474.216	67,32
2	Jagung	94.416	82,22	72.583	74,97	90.343	81,50	81,981	79.65	105.893	93,35
3	Kedelai	5.656	20,06	2.759	18,12	4.440	19,87	7,026	19.77	2.573	16,37
4	Kacang Tanah	3.151	15,20	1.784	14,58	1.527	16,79	1,816	14.01	1.489	14,36
5	Kacang Hijau	134,634	11,61	260	8,72	285	12,50	81	11.31	538	14,56
6	Ubi Kayu	20.370	288,12	32.224	392,11	9.778	224,99	9,370	261.80	19.598	270,69
7	Ubi Jalar	369,15	131,84	356	143,55	251	119,28	297	103.67	555	128,52

Sumber: DPKPP Kab. Klaten, 2020.

Berdasarkan Tabel 3.52 dan Tabel 3.53 sebagaimana di atas, terlihat bahwa rata-rata luas panen dibawah luas tanam. Hal ini disebabkan karena adanya puso dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), terutama Wereng Batang Coklat (WBC), Tikus, Penggerek Batang dan Sundep. Sehingga hal ini juga berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas tanaman pangan terutama padi.

Produksi dan produktivitas padi pada Tahun 2019 meningkat dibandingkan dengan Tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh implementasi intensifikasi pertanian yang cukup baik dan penerapan teknologi di bidang pertanian. Sedangkan Produksi Perkebunan Tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 3.54.



Tabel 3.54.
Produksi Perkebunan Tahun 2015-2019

No.	Jenis Komoditas	Produksi (Ton)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Tembakau Rajangan	2,191.360	2,193.575	1,233.527	1.147,27	1.750,30
2	Tembakau Asepan	1,164.270	1,038.530	1,070.724	1.037,05	2.595,30
3	Tembakau Vorstenland	453.740	303.930	239.455	135.535	55.144
4	Kelapa Dalam	5,384.477	4,097.630	4,697.582	3.976,64	4.048.189
5	Kelapa Hibrida	43.556	45.510	45.600	49.073	29.340
6	Kelapa Deres	82.861	99.470	98.740	87.149	87,15
7	Kopi Arabica	101.940	105.250	81.320	43,32	43.320
8	Kopi Robusta	4.856	9.830	9.990	9,82	9,82
9	Cengkeh	46.378	44.220	45.630	36,5	36,5
10	Lada	9.717	13.150	12.110	9,78	11,4
11	Tebu	4,184.222	6,289.000	3,258.940	3.258,9	3.316.970

Sumber: DPKPP Kab. Klaten, 2020.

Berdasarkan Tabel 3.54. sebagaimana tersebut di atas, komoditas andalan dan unggulan adalah Tembakau Rajangan produksi tertinggi dicapai pada Tahun 2016 sebesar 2.193,575 Ton dan Tembakau Asepan produksi tertinggi dicapai pada Tahun 2019 sebesar 2.595,30 ton. Sedangkan populasi ternak pada tahun 2014–2018 disajikan pada Tabel 3.55.

Tabel 3.55.
Populasi Ternak Tahun 2015-2019

No	Jenis Ternak	Populasi Ternak (ekor)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Sapi Potong	99,438	88,343	88,850	100,259	102.431
2	Sapi Perah	5,486	5,795	6,098	6,284	6.433
3	Kambing	92,014	88,343	88,957	9,596	101.402
4	Domba	43,982	38,489	38,570	45,204	46.963
5	Ayam Bukan Ras	1,446,963	2,801,581	3,256,177	2,245,443	2.532.676
6	Ayam Pedaging	1,936,862	2,898,344	3,385,400	2,475,187	3.896.788
6	Ayam Petelur	1,045,869	867,822	930,234	746,422	832.764
7	Itik	292,929	395,436	575,100	425,473	430.329
8	Burung Puyuh	454,596	451,193	452,332	519,566	535.244

Sumber: DPKPP Kab. Klaten, 2020.

Berdasarkan Tabel 3.55. sebagaimana tersebut di atas, terlihat pada tahun 2018 populasi sapi potong mengalami kenaikan sebesar 100,259 ekor jika dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebesar 88.850 ekor. Hal ini dipengaruhi oleh intensifnya penyuluhan tentang kesehatan hewan dan penggunaan bibit ternak yang baik. Sedangkan produksi peternakan tahun 2015–2019 disajikan pada Tabel 3.56.



Tabel 3.56.
Produksi Susu, Daging, dan Telur Tahun 2015-2019

No	Jenis	Produksi (Lt/Kg/Butir)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Susu (Liter)	4,030,895	4,878,662	5,903,181	4,266,718	4.978.442
2	Daging (Kg)	2,549,885	2,749,351	2,963,800	584,220	2.010.393
3	Telur (Butir)	246,585,003	375,376,131	570,571,719	130.992.000	154.784.416

Sumber: DPKPP Kab. Klaten, 2020.

Berdasarkan Tabel 3.56. sebagaimana tersebut di atas perkembangan produksi susu, daging dan telur pada Tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dari Tahun 2014-2017 yang selalu meningkat setiap tahunnya, hal ini dipengaruhi oleh tingginya harga pakan ternak dan menurunnya populasi hewan ternak.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatkan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah pada tahun 2019 dilaksanakan dengan program, diantaranya:

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan);
2. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat;
3. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;
4. Pengembangan perikanan tangkap;
5. Pengembangan budidaya perikanan;
6. Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
7. Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan;
8. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
9. Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan;
10. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
11. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; dan
12. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan;

Permasalahan:

- a. Belum optimalnya penerapan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian yang berakibat belum terwujudnya upaya penanganan terpadu di bidang pertanian sebagai pilar penyangga ketahanan pangan.
- b. Belum optimalnya penerapan teknologi, rekayasa genetik, varietas - varietas baru yang memiliki keunggulan absolut dan komparatif, dan belum optimalnya intensifikasi dan diversifikasi hasil - hasil pangan.
- c. Tingginya tingkat penggunaan bahan kimia yang berakibat menurunnya tingkat kesuburan tanah dan kekebalan hama penyakit tanaman sehingga perlu gerakan bersama untuk kembali ke alam (*back to nature*).
- d. Belum optimalnya kepastian hukum dalam rangka memberikan proteksi dan advokasi terhadap petani, demikian pula legalisasi kepemilikan hak kekayaan



intelektual (*intellectual property right*) terhadap produk - produk pangan unggulan Kabupaten Klaten.

- e. Belum berkembangnya diversifikasi pangan.
- f. Belum optimalnya pemanfaatan lahan dan pekarangan rumah menuju kawasan rumah pangan lestari.
- g. Belum tercapainya kemandirian dan kedaulatan pangan.
- h. Belum optimalnya sinergitas antara program - program Pemerintah dengan kebutuhan riil dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan, dan belum optimalnya kemampuan dan keterampilan para penyuluh dalam mengoptimalkan kesadaran dan keterampilan petani, dan
- i. Belum terciptanya sinergitas antar Satker dalam melakukan koordinasi terpadu dalam upaya mengoptimalkan urusan ketahanan pangan.

Solusi :

- a. Peningkatan penerapan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian untuk mewujudkan penanganan terpadu di bidang pertanian sebagai pilar penyangga ketahanan pangan;
- b. Peningkatan penerapan teknologi, rekayasa genetik, varietas - varietas baru yang memiliki keunggulan absolut dan komparatif, dan peningkatan intensifikasi dan diversifikasi hasil - hasil pangan;
- c. Menekan penggunaan bahan kimia yang berakibat menurunnya tingkat kesuburan tanah dan kekebalan hama penyakit tanaman sehingga perlu gerakan bersama untuk kembali ke alam (*back to nature*);
- d. Penguatan kepastian hukum dalam rangka memberikan proteksi dan advokasi terhadap petani, demikian pula legalisasi kepemilikan hak kekayaan intelektual (*intellectual property right*) terhadap produk - produk pangan unggulan Kabupaten Klaten; dan
- e. Penciptaan sinergitas antara program - program Pemerintah dengan kebutuhan riil dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan, dan belum optimalnya kemampuan dan keterampilan para penyuluh dalam mengoptimalkan kesadaran dan keterampilan petani.



24 Sasaran Meningkatnya Peran LEM, LED dan Pengembangan Potensi TTG di Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan;



Pemerintahan Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan terdepan memerlukan peningkatan standar pelayanan dalam hal: pemberdayaan masyarakat, menjaga adat-istiadat, serta melayani kebutuhan administrasi penduduk. Upaya Pemerintah Kabupaten dalam meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam Penanggulangan Kemiskinan dengan melakukan peningkatan partisipasi, dan penyempurnaan regulasi tentang desa. Langkah ini diharapkan akan meningkatkan tata kelola Pemerintahan Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel. Adapun capaian sasaran: Meningkatnya Peran LEM, LED dan Pengembangan Potensi TTG di Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan disajikan pada Tabel 3.57.

Tabel 3.57.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Peran LEM, LED dan Pengembangan Potensi TTG di Desa dalam
Penanggulangan Kemiskinan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Persentase desa yang memiliki LEM, LED dan Posyantek	12	35	42	39	92,86	58	67,24

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2020.

Program pemberdayaan masyarakat untuk mendorong kemandirian desa dan menanggulangi kemiskinan dilaksanakan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pasar Desa. Jumlah BUMDes dalam kurun waktu tahun 2013-2014 relatif masih rendah karena belum adanya dukungan dana desa dan komitmen Pemerintah Desa, peningkatan mulai terlihat pada tahun 2015 ketika dana desa mulai diberikan kepada Pemerintah Desa serta ditunjang dengan adanya komitmen dari Pemerintah Desa yang tinggi. Dari 215 BUMDes yang ada di Kabupaten Klaten saat ini, diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kategori berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan BUMDesa Provinsi Jawa Tengah yaitu: 1. BUMDes Dasar sejumlah 85; 2. BUMDes



Tumbuh sejumlah 112; 3. BUMDes Berkembang sejumlah 24; dan 4. BUMDes Maju sejumlah 5.

Guna pengembangan dan optimalisasi pengelolaan BUMDes maka, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melakukan pendampingan kepada pengelola BUMDes dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Perkembangan lembaga ekonomi Pedesaan tahun 2015–2019 disajikan pada Tabel 3.58.

Tabel 3.58.
Lembaga Ekonomi Perdesaan

Tahun	Jumlah BUMDes	Jumlah Pasar Desa	Pasar Desa Dikelola Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	63	40	5
2016	141	40	5
2017	217	40	5
2018	224	40	5
2019	224	40	5

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2020.

Berdasarkan Tabel 3.58. sebagaimana tersebut di atas, Lembaga ekonomi perdesaan lainnya (Pasar Desa) juga dituntut dapat memberikan kontribusi positif di dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Peran pasar desa belum maksimal karena otoritas manajemen pengelolaan pasar desa belum diberikan sepenuhnya kepada Desa dan masih dikelola oleh Pemerintah Daerah. Hal ini perlu adanya komunikasi dari pihak terkait dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut, lebih lanjut diharapkan adanya keberpihakan terhadap APBDes dalam rangka pengembangan Pasar Desa.

Pelatihan teknologi tepat guna di perdesaan dari kurun waktu tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 3.59.

Tabel. 3.59.
Pelatihan Teknologi Tepat Guna Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jenis Pelatihan TTG yang telah diberikan	1. Pelatihan Ternak Lele dengan metode Bioflock Pemanfaatan TTG di Desa Drono peserta dari Desa Drono, Tempursari, Desa Ngawen	1. Pelatihan Pembuatan Aneka Kripik bahan Singkong Pemanfaatan TTG di Desa Bono peserta dari Desa Bono,	1. Pelatihan Hidroponik Pemanfaatan TTG di Desa Bawukan peserta dari Desa Bawukan dan Desa Panggang Kecamatan Kemalang	1. Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah organik di desa Solodiran, Kec Manisrenggo 2. Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan	1. Pelatihan pembuatan briket arang dengan bahan sampah organik di desa Jurangjero, Kec. Karanganom 2. Pelatihan pembuatan



No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Kec. Ngawen Desa Wiro Kec. Bayat Desa Ngawonggo Kec. Ceper		Pucangmili ran dan Wunut Kec. Tulung	2. Pelatihan Ternak Lele dengan metode Bioflock Pemanfaata n TTG di Desa Gunung Gajah peserta dari Desa Kebon dan Desa Gununggaja h, Bayat 3 Pelatihan Hidroponik Pemanfaatan TTG di Desa Sidowayah peserta dari Desa Sidowayah dan Desa Kebonharjo Kecamatan Polanharjo	sampah organik di desa Kranggan, Kec Manisrenggo 3. Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah organik di desa Taskombang, Kec Manisrenggo 4. Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah organik di desa Nangsri, Kec Manisrenggo	briket arang dengan bahan sampah organik di desa Karangan, Kec. Karanganom 3. Pelatihan pembuatan briket arang dengan bahan sampah organik di desa Karanganom, K ec. Karanganom 4. Pelatihan pembuatan briket arang dengan bahan sampah organik di desa Jungkare, Kec. Karanganom 5. Pelatihan pertanian hidroponik di desa Kahaman, Kec. Ngawen
2.	Data Perkem bangan Pemanf ataan Teknolo gi Tepat Guna (TTG) dipedes aan	1. Posyantek Kec. Ngawen	1. Posyantek Kec. Kemalang 2. Posyantek Kec. Tulung	1. Posyantek Kec. Karangano m (Keputusan Bupati Klaten No. 414.4/213 Tahun 2017 tentang Pembentuka n Tim Pengelola POSYANTEK Kec. Karangano m Kab. Klaten) 2. Posyantek Kec. Polanharjo (Keputusan Bupati Klaten No. 414.4/214 Tahun 2017 tentang Pembentuka n Tim Pengelola POSYANTEK	1. Posyantek antar desa TA 2018 di Kec. Cawas, Kec. Wedi	1. Posyantek antar desa Kec. Manisrenggo 2. Posyantek antar desa Kec. Trucuk



No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
				Kec. Polanharjo Kab. Klaten)		

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2020.

Berdasarkan Tabel 3.59. sebagaimana tersebut di atas, mekanisme penerapan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Kabupaten Klaten diawali dengan sosialisasi kepada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Klaten (26 Kecamatan), kemudian proses pembentukan Teknologi Tepat Guna (TTG) dipilih pada kecamatan yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait Meningkatkan Peran LEM, LED dan Pengembangan Potensi TTG di Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan dengan program, diantaranya:

1. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan; dan
2. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.

Permasalahan:

1. Masih rendah desa yang memanfaatkan peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG; dan
2. Terbatasnya kualitas sumber daya aparatur desa, untuk memanfaatkan peluang pengembangan teknologi informasi.

Solusi :

1. Percepatan penggunaan Dana Desa yang berorientasi untuk pengembangan LEM, LED dan pengembangan potensi TTG; dan
2. Peningkatan kapasitas SD aparatur desa untuk memanfaatkan era digital bagi pengembangan desa.

25. Sasaran Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisataan;



Sektor pariwisata merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya sebagai penggerak utama perekonomian

di daerah, untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dengan mendorong sektor pariwisata untuk mengembangkan produktifitas, dan nilai tambah untuk meningkatkan daya saing daerah.

Adapun capaian Sasaran: [Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata](#) sebagaimana Tabel 3.60.

Tabel 3.60.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata	5	47,50	25	31,96	127,84	100	31,96

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2020.

Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata, selama ini upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dengan mendorong partisipasi masyarakat di bidang pariwisata dan memperbaiki regulasi kebijakan pengembangan kepariwisataan Daerah. Salah satu upaya peningkatan yang dilakukan dengan perbaikan obyek wisata dan menarik sebanyak mungkin pengunjung.

Perkembangan jumlah obyek wisata dan pengunjung di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2015-2019 menunjukkan peningkatan, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.61.

Tabel 3.61.

Jumlah Obyek Wisata, Pengunjung, Lama Tinggal dan Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Obyek Wisata (obyek)	Pengunjung (orang)		Lama Tinggal (hari)		Rata-rata Pengeluaran (Rp.000)	
		Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman
2015	82	329.021	220	1	0,5	550	1.000
2016	82	377.409	372	1	1	750	1.500
2017	82	2.224.294	190.686	1	1	1.000	2.000
2018	82	2.483.945	222.373	1	1	1.000	2.000
2019	82	3.884.024	183.559	1	1	1.000	2.000

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, 2020.



Berdasarkan Tabel 3.61. sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung obyek wisata pada tahun 2015 -2019 mengalami kenaikan dan didominasi oleh wisatawan nusantara, sedangkan wisatawan mancanegara relatif lebih sedikit karena wisatawan mancanegara lebih banyak berkunjung ke Candi Prambanan. Hal ini disebabkan adanya penataan di beberapa obyek wisata dan naiknya jumlah pengunjung pada beberapa perayaan seperti Maleman, Syawalan dan Yaqowiyu.

Sedangkan di sisi lain lama tinggal wisatawan Nusantara rata-rata hanya satu hari dan untuk wisatawan mancanegara rata-rata hanya 0,75 hari. Hal ini disebabkan kebanyakan para wisatawan, baik Nusantara maupun mancanegara hanya sekedar berkunjung di tempat obyek wisata saja dan lebih menyukai menginap di Yogyakarta ataupun Surakarta. Demikian juga dengan rata-rata pengeluaran relatif belum begitu besar, untuk wisatawan Nusantara hanya berkisar antara Rp. 350.000,- sampai Rp.1.000.000,- dan wisatawan mancanegara berkisar Rp.500.000,- sampai Rp.2.000.000,- Sumbangan Sektor Pariwisata Terhadap PAD tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 3.62.

Tabel 3.62.
Sumbangan Sektor Pariwisata Terhadap PAD
Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019

No	Jenis Obyek Wisata Perayaan	Realisasi (Rp. dlm 000)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Perayaan Padusan	57.500	52.500	57.500	58.000	64.005
2	Perayaan Maleman	26.000	28.000	28.000	28.000	30.800
3	Perayaan Syawalan	47.000	51.700	52.500	53.000	58.500
4	Perayaan Yaqowiyu	0	0	0	0	0
5	Deles Indah	12.500	14.000	15.600	9.600	4.200
6	OMAC	559.175	609.976	739.919	943.170	1.689.580
7	Jombor Permai	68.205	65.495	68.050	71.450	67.175
8	Makam Pandanaran	152.300	143.300	144.500	141.200	161.175
9	Makam Ronggowarsito	1.880	1.890	2.000	2.050	2.435
10	Pemandian Jolotundo	22.017,5	24.200	50.170	81.680	120.065
11	Candi Plaosan	7.758	53.883	80.454	218.718	153.027
12	Makam Ki Ageng Gribig	2.000	3.000	3.030	3.041	4.030
13	Lain-lain	21.350	23.850	13.450	12.460	28.880
	Jumlah	977.685,5	1.071.794	1.255.173	1.622.369	2.384.397

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, 2020.

Berdasarkan Tabel 3.62. sebagaimana tersebut di atas, terlihat bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD pada tahun 2019 sebanyak Rp.2.384.397.000.000,- atau meningkat sebanyak Rp.762.028.000.000,- (31,96%) dibanding tahun 2018.

Pengembangan pariwisata Kabupaten Klaten dapat dilihat antara lain dari produk wisata. Produk pariwisata di Kabupaten Klaten mencakup:

A. Jenis Kekayaan Wisata Alam



Kabupaten Klaten mempunyai banyak wisata alam maupun wisata buatan. Nama dan jenis obyek wisata serta lokasinya di Kabupaten Klaten disajikan pada Tabel 3.63.

Tabel 3.63.
Nama dan Jenis Obyek Wisata serta Lokasinya
di Kabupaten Klaten Tahun 2019

No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
01.	Perayaan Padusan	Event Tradisional	Kec. Tulung Kab.Klaten
02.	Perayaan Maleman	Event Tradisional	Kec. Klaten Utara
03.	Perayaan Syawalan	Event Tradisional	Kec. Bayat dan Kec. Kalikotes
04.	Perayaan Yaqowiyu	Event Tradisional	Kec. Jatinom
05.	Deles Indah	Wisata Alam	Kec. Kemalang
06.	Sumber Air Ingas (OMAC)	Wisata Alam	Kec. Tulung Kab.Klaten
07.	Makam Sunan Pandanaran	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Bayat
08.	Jombor Permai	Wisata Alam	Kec. Bayat
09.	Makam R.Ng Ronggowarsito	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Trucuk
10.	Makam Ki Ageng Perwito	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Wonosari
11.	Pemandian Jolotundo	Wisata Alam	Kec. Karanganom
12.	Candi Plaosan, Sojiwan, Sewu dan Candi Bubah	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Prambanan
13.	Makam Ki Agen Gribig	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Jatinom
14.	Sendang Sinongko	Wisata Alam	Kec. Ceper
15.	Umbul Ponggok, Nganten, Siblarak dan Umbul Nilo	Wisata Air dan Snarkling	Kec. Polanharjo
16.	Umbul Pelem	Wisata Air	Kec. Tulung
17.	Umbul Susuhan	Wisata Air	Kec. Ngawen
18.	Umbul Brintik, Brondong, Geneng dan Umbul Pluneng	Wisata Air	Kec. Kebonarum
19.	Desa Wisata Bugisan	Wisata Budaya dan Sejarah	Kec. Prambanan
20.	Desa Wisata Nganjat	Wisata Air dan Perikanan Nila	Kec. Polanharjo
21.	Desa Wisata Janti	Pemancingan	Kec. Polanharjo
22.	Desa Wisata Sidowayah	Wisata Air, Outbond, Kampung Dolanan dan Oase	Kec. Polanharjo
23.	Desa Wisata Soropaten	Wisata Budaya	Kec. Karanganom
24.	Desa Wisata Beku	Wisata Air dan Outbond	Kec. Karanganom
25.	Desa Wisata Kebondalem Kidul	Wisata Budaya, Sejarah dan Industri	Kec. Prambanan
26.	Desa Wisata Soran-Duwet	Wisata Budaya dan Outbond	Kec. Ngawen
27.	Desa Wisata Jarum	Wisata Budaya dan Kerajinan Batik	Kec. Bayat
28.	Desa Wisata Krakitan	Wisata Religi dan Alam	Kec. Bayat
30.	Desa Wisata Paseban	Wisata Religi, Budaya	Kec. Bayat



No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
		dan Industri	
31.	Desa Wisata Gunung Gajah	Wisata Alam	Kec. Bayat
32.	Desa Wisata Jotangan	Wisata Alam	Kec. Bayat
33.	Desa Wisata Demak Ijo	Wisata Budaya dan Kerajinan	Kec. Karangnongko
34.	Desa Wisata Karangnongko	Wisata Budaya dan Sejarah	Kec. Karangnongko
35.	Desa Wisata Balerante	Wisata Alam dan Air	Kec. Kemalang
36.	Desa Wisata Sidorejo	Wisata Alam dan Agro	Kec. Kemalang
37.	Desa Wisata Tegalmulyo	Wisata Alam, Outbond dan Embung	Kec. Kemalang
38.	Desa Wisata Nglingsi	Wisata Pemancingan dan Kuliner	Kec. Klaten Selatan
39.	Desa Wisata Mlese dan Tlising	Industri Lurik	Kec. Cawas
40.	Desa Wisata Melikan	Wisata Budaya dan Kerajinan Keramik	Kec. Wedi
41.	UmbulTirtomulyani&TirtoMulyono	Alam	Kec. Kebonarum
42.	WatuPrahur Bukit Cinta	Alam	Kec. Bayat
43.	WatuSepur	Alam	Kec. Bayat
44.	Bukit Petrum	Alam	Kec. Bayat
45.	Puncak Arjuna	Alam	Kec. Bayat
46.	Kedungan Waterpark	Buatan	Kec. Pedan
47.	Tirtonirmolo	Buatan	Kec. Prambanan
48.	Museum Gula Jawa Tengah	Buatan	Kec. Jogonalan
49.	Candi Merak	Budaya	Kec. Karangnongko
50.	Candi Sojiwan	Budaya	Kec. Prambanan
51.	Kolam Renang Tirta Pelangi	Buatan	Kec. Bayat
52.	Kolam Renang Tirta Indah	Buatan	Kec. Klaten Selatan
53.	Kolam Renang Tirta Harapan	Buatan	Kec. Klaten Utara
54.	Desa Wisata Glagah	Edukasi	Kec. Jatinom
55.	Wisata Hidroponik	Edukasi	Kec. Kemalang
56.	Kalitalang	Alam	Kec. Kalitalang
57.	Banyu Beku	Alam	Kec. Polanharjo
58.	Water Gong	Alam	Kec. Polanharjo
59.	Pongok Ciblon	Buatan	Kec. Polanharjo
60.	Susur Kali Pusur	Alam	Kec. Tulung
61.	Tugu Waseso Soropaten	Budaya	Kec. Polanharjo
62.	Taman Celosia Tlogo Nursery	Buatan	Kec. Prambanan
63.	Umbul Gedaren	Alam	Kec. Jatinom
64.	Umbul Manten	Alam	Kec. Tulung
65.	Umbul Brondong	Alam	Kec. Kebonarum
66.	Omah Wayang	Budaya	Kec. Klaten Selatan

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Klaten , 2020.

Berdasarkan Tabel 5.63. sebagaimana tersebut di atas, jumlah Obyek Wisata (OW) di Kabupaten Klaten sebanyak 66 (enam puluh enam) WO, dan tersebar di beberapa kecamatan, serta jenis wisatanyapun sangat beragam. Sehingga potensi ini perlu dijaga dan dikembangkan untuk meningkatkan daya saing daerah.



B. Jenis Kekayaan Wisata Budaya

Jenis kekayaan wisata budaya di Kabupaten Klaten antara lain: Candi Plaosan, Candi Lumbung, Candi Bubrah, Candi Asu (Sona), Candi Sojiwan, Candi Merak, Candi Karangnongko, Candi Sewu, Masjid Jimbung, Masjid Golo, Masjid Jawi, Makam Syech Domba, Makam Syeh Kewel, Makam Ki Ageng Gribig, Makam R Ng. Ronggowarsito, Situs Kaliworo, dan Situs Wonobojo, Makam Sunan Pandanaran, dan Makam Kyai Mlati.

C. Tempat Bersejarah

Tempat bersejarah yang ada di Kabupaten Klaten diantaranya: Monumen Juang 45 Klaten, Monumen PARATA MBKD Pos X-I, Museum Gula Jawa Tengah di Jogonalan, Monumen Patung Kemerdekaan Soekarno, Goa Jepang dan Pesanggrahan Pakubuwono di Deles.

Permasalahan:

Permasalahan yang dijumpai dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Klaten adalah masih perlunya peningkatan pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata serta peningkatan sumber daya manusia yang terkait dengan kepariwisataan serta penataan kawasan pariwisata yang dapat memiliki daya tarik.

Solusi:

Peningkatan pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata serta peningkatan sumber daya manusia yang terkait dengan kepariwisataan serta penataan kawasan pariwisata yang dapat memiliki daya tarik.

26. Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM;



Sektor perdagangan, koperasi dan UKM merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya sebagai penggerak utama perekonomian di daerah, untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan. Upaya yang dilakukan untuk: [Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UMKM](#)

diupayakan dengan berbagai kebijakan Daerah yang mendukung urusan perdagangan, koperasi dan UMKM.

Adapun capaian Sasaran: Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UMKM sebagaimana Tabel 3.64.

Tabel 3.64.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Urusan
Perdagangan, Koperasi dan UMKM

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	18,74	17,88	19,12	19,98	104,50	19,38	19,98
2	Persentase UMKM yang memiliki daya saing	5	8,99	11	11,45	104,09	15	11,45

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM, 2020.

1. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Pada tahun 2019 tercatat kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tumbuh sebesar 19,98%. Tumbuhnya sektor perdagangan ini ditunjang adanya pengembangan dan pemberdayaan UKM melalui pola kluster dan penetapan Produk Unggulan Daerah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta dapat menjadi daya ungkit bagi pertumbuhan sektor dan sub sektor lainnya.

Disamping itu, tumbuhnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ditunjang adanya peningkatan nilai investasi PMDN sebanyak Rp.189.278.100.000,- dan PMA sebanyak 1.952.800 US\$, serta nilai adanya peningkatan ekspor dari 44.969.878,96US\$ pada tahun 2018, menjadi 448.740.170,03 US\$.

2. Persentase UMKM yang Memiliki Daya Saing

Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 55.070 UMKM, namun dari sebanyak 55.070 UMKM tersebut yang memiliki keunggulan daya saing produk kompetitif baru sebanyak 6.306 UMKM (atau 11,45%) yang tersebar di 11 (sebelas) kluster UMKM.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatkan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2019, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis sasaran Meningkatkan Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM diantaranya dengan program:



1. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
2. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
3. Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan;
4. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
5. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM; dan
6. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;

Permasalahan :

- a. Terbatasnya akses dan perluasan pasar produk ekspor serta kurang berkembangnya kerjasama perdagangan internasional;
- b. Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;
- c. Terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha di sektor perdagangan khususnya Usaha Dagang Kecil Menengah;
- d. Masih lemahnya legalisasi hak kekayaan intelektual terhadap produk - produk perdagangan unggulan Kabupaten Klaten;
- e. Belum optimalnya penataan dan pemberdayaan PKL; dan
- f. Masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana pasar yang representatif.

Serta:

- a. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk memberikan informasi, data dan laporan perkembangan usahanya,;
- b. Kurangnya inovasi dan diversifikasi produk; dan
- c. Terbatasnya produk berorientasi ekspor.

Solusi :

- a. Peningkatan akses dan perluasan pasar produk ekspor dengan membuka kerjasama perdagangan internasional;
- b. Penguatan daya saing dengan pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;
- c. Optimalisasi pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;
- d. Peningkatan kemampuan kualitas SDM pelaku usaha di sektor perdagangan khususnya Usaha Dagang Kecil Menengah;
- e. Mengupayakan legalisasi hak kekayaan intelektual terhadap produk - produk perdagangan unggulan Kabupaten Klaten; dan
- f. Penataan dan pemberdayaan PKL.



27. Sasaran Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah;



Penerapan inovasi dalam pembangunan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya sebagai penggerak utama perekonomian di daerah, untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan masyarakat.

Adapun capaian Sasaran: Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah sebagaimana Tabel 3.65.

Tabel 3.65.


Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah

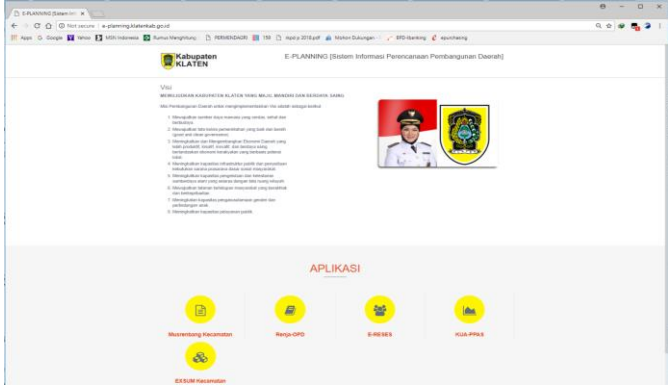
No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Persentase inovasi yang diterapkan	31,82	60	81,82	105	128,33	100	105

Sumber: Bappeda, 2020.

Inovasi Pembangunan Daerah merupakan upaya untuk mengakselerasi pencapaian-pencapaian pembangunan daerah dan pengembangan Daerah. Inovasi ini didorong munculnya pola pikir yang inovatif menjadi pijakan bagi kerangka penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 19 jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan. Gambaran inovasi-inovasi yang telah dilakukan dan terus dikembangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten disajikan pada Tabel. 3.66.

Tabel 3.66.
Inovasi Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten

No	Inovasi	Gambaran Ringkas	Urusan Bidang Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Matur Dokter	<p>Matur Dokter merupakan aplikasi yang berfungsi untuk mempermudah masyarakat di Kabupaten Klaten dalam mendapat informasi atau melakukan pengaduan dan konsultasi tentang masalah kesehatan kepada petugas. Dalam Aplikasi Matur Dokter memiliki beberapa fitur seperti logo, Panel Kontrol, <i>Whatsapp Chat</i> Darurat, Telepon Darurat, Informasi Tempat Tidur Rumah Sakit, Matur Dokter, Forum Kesehatan, Berita Kesehatan, Tips Kesehatan, <i>Slide Show</i> Berita Kesehatan</p> 	Kesehatan

No	Inovasi	Gambaran Ringkas	Urusan Bidang Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)
2	e-Planning e-Budgeting	<p>Perencanaan APBD dimulai dari perencanaan RKPD/Renja Perangkat Daerah yang sudah dilakukan melalui aplikasi yang berbasis web yang dapat diakses melalui alamat http://e-planning.klatenkab.go.id. Fokus aplikasi ini dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan tahunan/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang dalam tahapan penyusunannya mengkomodir dan mendokumentasikan antara lain Musrenbang Kecamatan, <i>E-Reses</i> yang menghasilkan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, serta penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang selanjutnya dibahas dalam Forum Perangkat Daerah</p>  <p>Sistem aplikasi integrasi perencanaan dan penganggaran sudah dibangun di tahun 2018, dengan berbasis web yang dapat diakses di alamat http://ebudgeting.klatenkab.go.id/</p> <p>Sistem ini digunakan dalam penyusunan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang mempedomani dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sampai dengan rincian belanja yang disusun menjadi PRA-RKA yang kemudian dijadikan dasar penyusunan Raperda APBD yang diintegrasikan dalam sistem SIMDA.</p> 	Perencanaan



No	Inovasi	Gambaran Ringkas	Urusan Bidang Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Pengembangan Varietas Padi Rojo Lele	Latar belakang pengembangan varietas padi Rojolele adalah keinginan untuk pelestarian varietas tersebut, dikarenakan petani mulai enggan menanam disebabkan oleh kondisi fisik varietas padi yang tinggi sekitar 180 cm, sehingga mudah rebah pada saat akan panen dan umur tanaman yang lama sekitar lima setengah bulan. Bekerjasama dengan instansi BATAN (Badan Tenaga Nuklir Nasional) kelemahan tersebut diperbaiki dengan tujuan memendekkan umur tanaman dan memendekkan tinggi tanaman. Penelitian dimulai bulan Desember 2013 dan saat ini tujuan tersebut telah tercapai, umur tanaman lebih pendek menjadi sekitar seratus hari dan tinggi tanaman menjadi sekitar 110 cm. disamping itu tambahan hasil positifnya antara lain produktivitas menjadi lebih besar diindikasikan dari jumlah anakan yang lebih banyak, serta sifat padi rojolele yang pulen dan wangi masih terjaga. Direncanakan pada awal pebruari dijadwalkan akan dilakukan uji proposal pelepasan varietas padi hasil penelitian sebagai varietas padi Rojolele yang baru sebagai varietas lokal khas Klaten.	Penelitian dan Pengembangan
4	Layanan e-KTP Mobile	Layanan <i>e-KTP mobile</i> dilakukan dalam rangka pendekatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. <i>e-KTP mobile</i> diutamakan menyasar pada siswa-siswa sekolah yang telah berwajib KTP, penduduk usia wajib KTP yang mempunyai keterbatasan fisik dan masyarakat umum.	

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran inovasi yang diterapkan di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2019, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis inovasi yang diterapkan dengan Program Penelitian dan Pengembangan, dan program lainnya.

Permasalahan :

- a. Terbatasnya akses dan perluasan pasar produk inovasi serta kurang berkembangnya kerjasama inovasi Daerah; dan
- b. Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu, desain dan produk inovasi Daerah;

Solusi :

- a. Peningkatan akses dan perluasan pasar produk inovasi Daerah dengan membuka kerjasama pihak ketiga; dan
- b. Penguatan daya saing dengan pengembangan mutu, desain dan produk inovasi Daerah;



28. Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Penanaman Modal;



Sektor penanaman modal merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya sebagai penggerak utama perekonomian di daerah untuk mendorong peningkatan daya saing daerah. Upaya yang dilakukan untuk: Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Penanaman Modal diupayakan dengan berbagai kebijakan Daerah yang mendukung urusan penanaman modal.

Adapun capaian Sasaran: Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Penanaman Modal sebagaimana Tabel 3.67.

Tabel 3.67.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Penanaman
Modal

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Rasio daya serap tenaga kerja (PMDN/PMA):							
	PMDN	189	131	438	19	4,34	483	3,93
	PMA	46	264	294	139	47,28	294	47,28
2	Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA):							
	PMDN	1,75	1078	2,2	733	33318,18	2,50	29320,00
	PMA	2,25	52	2,5	272	10880,00	2,55	10666,67

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2020.

Kondisi perekonomian Kabupaten Klaten diukur dari berbagai variabel makro seperti PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi, tingginya kedua variable tersebut sangat mendukung masuknya investasi baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Gambaran jumlah Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019, disajikan pada Tabel 3.68.



Tabel 3.68.
Jumlah Investasi PMA dan PMDN
Tahun 2015-2019

Tahun	Penanaman Modal Asing				Penanaman Modal Dalam Negeri		
	Nilai Investasi (US\$)	Nilai Investasi (Rp.000)	Jumlah Proyek	Kenaikan / Penurunan (%)	Nilai Investasi (Rp 000.)	Jumlah Proyek	Kenaikan/ Penurunan (%)
2015	420.700	5.469.100.000	27	-86	20.598.400.000	5	259
2016	6.372.700	82.845.100.000	53	1.415	62.385.300.000	21	203
2017	10.257.000	138.469.500.000	43	61	247.327.500.000	41	68
2018	3.091400	41.211.500.000	39	-70	229.788.500.000	67	27
2019	11.490.893	160.872.497.498	15	272	1.914.915.766.292	870	733

Sumber Data : DPMPSTSP Kabupaten Klaten, 2020.

Berdasarkan Tabel 3.68. sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat bahwa jumlah investasi PMDN maupun PMA pada Tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu PMDN sebesar Rp.1.914.915.766.292.000,- dan PMA sebesar Rp.160.872.497.498.000,- dibandingkan dengan Tahun 2018 yaitu PMDN sebesar Rp.229.788.500.000.000,- dan PMA sebesar Rp.41.211.500.000.000,- Hal ini disebabkan oleh iklim usaha yang kondusif, fasilitas dan infrastruktur investasi yang memadai, ketersediaan tenaga kerja, dengan rincian sebagai berikut:

1. Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN)

Faktor penting lain yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah adalah penanaman modal/investasi. Penanaman modal/investasi tidak bisa dilepaskan dari sektor usaha industri, semakin besar dan berkembang industri di suatu daerah semakin besar investasi yang ditanamkan dalam daerah tersebut. Perkembangan PMDN di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 3.69.

Tabel 3.69.
Perkembangan Realisasi PMDN Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	PMDN				
			2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Unit Usaha	Unit	5	21	41	67	870
2	Jumlah Tenaga Kerja	Orang	3.959	2.861	2.781	1.793	16.772
3	Nilai Investasi (Rp. 000)	Rp.	20.598.400	62.385.300	247.327.200	229.788.500	1.914.915.766

Sumber Data : DPMPSTSP Kabupaten Klaten, 2020.



2. Penanaman Modal Asing (PMA)

Jumlah investasi PMA di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2015-2019 mengalami peningkatan. Perkembangan PMA di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 3.70.

Tabel 3.70.
Perkembangan Realisasi PMA Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	PMA				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Unit Usaha	Unit	27	53	43	39	15
2	Jumlah Tenaga Kerja	Orang	230	1.468	79	561	2.087
3	Nilai Investasi	(US \$)	420.700	6.372.700	10.257.000	3.091.400	11.490.893

Sumber Data : DPMPSTSP Kabupaten Klaten, 2020.

Berdasarkan Tabel 3.69. dan Tabel 3.70. sebagaimana tersebut di atas, realisasi perkembangan PMDN dan PMA di Kabupaten Klaten tahun 2019 terlihat bahwa sebagian perusahaan atau proyek belum dapat merealisasikan investasi atau penanaman modal, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatkan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Penanaman Modal didukung dengan program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

Permasalahan :

1. Kurangnya informasi terkait potensi investasi; dan
2. Harga tanah peruntukan industri yang tinggi.

Solusi :

- a. Peningkatan akses dan perluasan pasar produk ekspor dengan membuka kerjasama perdagangan internasional;
- b. Mengupayakan pemanfaatan lahan kritis sebagai lokasi investasi, dan Pemerintah daerah wajib menyediakan infrastruktur penunjang.



29. Sasaran Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Data Saing Sektor Ketenagakerjaan;



Masalah angkatan kerja adalah masalah yang perlu mendapat perhatian serius dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah. Karakteristik angkatan kerja ini sangat besar pengaruhnya bagi kesejahteraan penduduk, terutama jika dilihat secara ekonomi makro. Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna sebagai acuan Pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Di samping itu, trend indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Adapun capaian sasaran: Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Data Saing Sektor Ketenagakerjaan disajikan pada Tabel 3.71.

Tabel 3.71.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing
Sektor Ketenagakerjaan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Rasio penduduk yang bekerja	0,97	0,87	1,05	1	95,24	1,08	92,59
2	Angka partisipasi angkatan kerja	6,779	73,58	69	81	117,39	69	117,39

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2020.

1. Rasio Penduduk yang Bekerja

Jumlah angkatan kerja pada tahun 2018 sebanyak 894.536 jiwa dan yang bekerja sebesar (54,56%) , pada tahun 2019 jumlah angkat kerja meningkat menjadi sebanyak 963.445 jiwa dan yang bekerja sebesar 70,72%. Sehingga rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2019 meningkat sebanyak 68.886 jiwa (atau naik 7,15%) dibanding tahun 2018.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pada tahun 2018 sebesar 70,46%, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 75,64%. Sehingga masalah angkatan kerja adalah masalah yang perlu mendapat perhatian besar penyerapan



angkatan kerja. Karakteristik angkatan kerja ini sangat besar pengaruhnya bagi kesejahteraan penduduk, terutama jika dilihat secara ekonomi makro.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari sasaran Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Ketenagakerjaan di Kabupaten Klaten dengan dukungan program: 1) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dan 2) Peningkatan Kesempatan kerja.

Permasalahan:

- a. Terbatasnya kesempatan kerja yang disebabkan oleh: (i) ketidakseimbangan antara kesempatan kerja yang ada dengan kebutuhan masyarakat akan pekerjaan; dan (ii) Penyerapan angkatan kerja yang ada tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja, sehingga jumlah pengangguran bertambah;
- b. Peluang kerja relatif belum bisa menampung tenaga kerja bagi pencari pekerjaan;
- c. Hambatan budaya (feodalisme), masyarakat cenderung kepada pekerjaan kantoran (pegawai negeri, dll) sebagai pekerjaan prestisius, sehingga mematkan kreatifitas untuk bekerja di luar sektor jasa Pemerintahan;
- d. Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh: (i) Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja; (ii) Rendahnya ketrampilan tenaga kerja; (iii) Ketidaksesuaian antara persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja dengan kompetensi pendidikan yang dimiliki; (iv) Ketersediaan lembaga pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerja juga belum memadai;
- e. Meningkatnya jumlah pencari kerja yang diakibatkan angkatan kerja baru, tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia;
- f. Belum optimalnya pembinaan dan pemihakan anggaran terhadap kelompok-kelompok pengangguran untuk membuka kesempatan kerja mandiri melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif ;
- g. Belum optimalnya pelatihan kerja bagi para angkatan kerja guna meningkatkan keterampilan untuk mampu bersaing di pasar kerja;
- h. Belum optimalnya organisasi serikat pekerja sebagai wadah perjuangan hak - hak pekerja;
- i. Belum optimalnya proteksi dan advokasi terhadap tenaga kerja yang berakibat kurangnya nilai tawar tenaga kerja;
- j. Inkonsistensi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI); dan
- k. Belum tersedianya *database* ketenagakerjaan.

Solusi :

- a. Membuka peluang kerja seluas-luasnya untuk menampung tenaga kerja bagi pencari pekerjaan;



- b. Menghilangkan hambatan budaya (feodalisme), bahwa semua lapangan kerja adalah pekerjaan prestisius, sehingga akan membuka ruang kreatifitas untuk bekerja di luar sektor jasa Pemerintahan;
- c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh: (i) Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja; (ii) Rendahnya ketrampilan tenaga kerja; (iii) Ketidaksesuaian antara persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja dengan kompetensi pendidikan yang dimiliki; (iv) Ketersediaan lembaga pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerja juga belum memadai;
- d. Mengoptimalkan pembinaan dan pemihakan anggaran terhadap kelompok-kelompok pengangguran untuk membuka kesempatan kerja mandiri melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif ;
- e. Mengoptimalkan pelatihan kerja bagi para angkatan kerja guna meningkatkan keterampilan untuk mampu bersaing di pasar kerja.
- f. Mengoptimalkan organisasi serikat pekerja sebagai wadah perjuangan hak-hak pekerja;
- g. Mengoptimalkan proteksi dan advokasi terhadap tenaga kerja yang berakibat kurangnya nilai tawar tenaga kerja; dan
- h. Merintis *database* ketenagakerjaan secara *online*.

30. Sasaran Meningkatnya Perlindungan Sektor Ketenagakerjaan;



Perlindungan tenaga kerja sangat besar pengaruhnya bagi kesejahteraan penduduk, terutama jika dilihat secara ekonomi makro. Tidak saja memberi rasa nyaman bagi pekerja, tetapi juga menjaga ketahanan daerah. Sehingga perlunya perlindungan tenaga kerja akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Adapun capaian sasaran: [Meningkatnya Perlindungan Sektor Ketenagakerjaan](#) disajikan pada Tabel 3.72.

Tabel 3.72.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Perlindungan Sektor Ketenagakerjaan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	86,81	82,59	87,9	71,48	81,32	25,5	280,31

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2020.

Berdasarkan Tabel 3.72, sebagaimana tersebut di atas Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2018 sebanyak 52.866 peserta, dan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi sebanyak 51.922 peserta (atau turun 1,79% dibanding tahun 2018). Penurunan ini disebabkan gagal setor, dan pindah kerja. Sebagian peserta Program BPJS Ketenagakerjaan tersebar di PMA dan PMDN yang ada di Klaten.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari sasaran Meningkatkan Perlindungan Ketenagakerjaan di Kabupaten Klaten dengan dukungan program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

Permasalahan:

1. Belum optimalnya organisasi serikat pekerja sebagai wadah perjuangan hak - hak pekerja;
2. Belum optimalnya proteksi dan advokasi terhadap tenaga kerja yang berakibat kurangnya nilai tawar tenaga kerja;
3. Belum optimalnya pembinaan dan pemihakan anggaran terhadap kelompok-kelompok pekerja/buruh melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif ;
4. Belum optimalnya pelatihan kerja bagi para angkatan kerja guna meningkatkan keterampilan untuk mampu bersaing di pasar kerja;

Solusi :

- a. Menghilangkan hambatan budaya (feodalisme), bahwa semua lapangan kerja adalah pekerjaan prestisius, sehingga akan membuka ruang kreatifitas untuk bekerja di luar sektor jasa Pemerintahan dan wajib difasilitasi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- b. Mengoptimalkan pembinaan dan pemihakan anggaran terhadap kelompok - kelompok pekerja/buruh melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif;
- c. Mengoptimalkan organisasi serikat pekerja sebagai wadah perjuangan hak - hak pekerja; dan



- d. Mengoptimalkan proteksi dan advokasi terhadap tenaga kerja yang berakibat kurangnya nilai tawar tenaga kerja.

31. Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Perindustrian;



Sektor perindustrian merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya sebagai penggerak utama perekonomian di daerah, untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan, serta menumbuhkan daya saing daerah. Upaya yang dilakukan untuk: Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Industri diupayakan dengan berbagai kebijakan Daerah yang mendukung urusan perindustrian.

Adapun capaian Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Sektor Perindustrian sebagaimana Tabel 3.73.

Tabel 3.73.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Perindustrian

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	27,55	35,94	34,98	37,00	105,77	35,2	105,11
2	Persentase IKM yang memiliki daya saing	2,5	1,80	6,5	7,6	116,92	7,5	101,33

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2020.

1. Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB

Komponen pembentuk PDRB, sektor industri manufaktur dibentuk oleh sub sektor industri besar, menengah, kecil dan rumah tangga. Sektor industri sebagai sektor andalan memberikan andil yang besar bagi perekonomian di Kabupaten Klaten, yaitu memberikan sumbangan terhadap PDRB sebesar 36,80 % (atau

Rp.9.013.718,21 juta) pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 menjadi sebesar 37,00 % (atau Rp.9.601.710,72 juta).

2. Persentase IKM yang Memiliki Daya Saing

Pada tahun 2018 jumlah IKM sebanyak 34.823 IKM dan yang memiliki daya saing baru mencapai 1,8% (atau sebanyak 62 IKM, dan pada tahun 2019 jumlah IKM menjadi sebanyak 34.828 IKM dan mempunyai daya saing mencapai 7,6% (atau sebanyak 2.647 IKM).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2019 program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis sasaran Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor industri diantaranya dengan program:

1. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; dan
2. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.

Permasalahan :

- a. Terbatasnya akses dan perluasan pasar produk ekspor serta kurang berkembangnya kerjasama perdagangan internasional;
- b. Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;
- c. Terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha di sektor IKM; dan
- d. Masih lemahnya legalisasi hak kekayaan intelektual terhadap produk - produk perindustrian unggulan Kabupaten Klaten;

Solusi :

- a. Peningkatan akses dan perluasan pasar produk ekspor dengan membuka kerjasama perdagangan internasional;
- b. Penguatan daya saing dengan pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;
- c. Optimalisasi pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar; dan
- d. Peningkatan kemampuan kualitas SDM pelaku usaha IKM.



32. Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana Dasar Masyarakat;



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah, Pemerintah kabupaten diwajibkan melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Sementara ini kewajiban yang harus diperhatikan terkait prasarana jalan adalah: Total panjang jalan di Kabupaten Klaten yang termasuk ke dalam kategori jalan negara 45,272 km, jalan provinsi sepanjang 34,238 km dan jalan kabupaten sepanjang 769,63 km. Faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan adalah aksesibilitas, mobilitas, dan keselamatan.

Luas area layanan irigasi di Kabupaten Klaten sebesar 1.608 ha yang tercakup dalam Daerah Irigasi (DI). Secara kewenangan, ada 2 (dua) DI yang menjadi kewenangan Pemerintah pusat, 5 (lima) DI yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 478 DI yang menjadi kewenangan Kabupaten Klaten. Dengan pembagian kewenangan itu, maka pengelolaan irigasi dilakukan dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Klaten maupun yang bersumber dari dana desa. Pengelolaan sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. Disamping itu Pemerintah kabupaten diwajibkan pula serius untuk memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat.

Adapun capaian sasaran: Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana Dasar Masyarakat disajikan pada Tabel 3.74.

Tabel 3.74.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik dan Sarana
Prasarana Dasar Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Indeks layanan infrastruktur	26,27	58,61	37,19	60,87	163,67	38,16	159,51

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik dan Sarana



Prasarana Dasar Masyarakat di Kabupaten Klaten yang ditunjang oleh indikator persentase jalan dalam kondisi baik sepanjang 471,86 Km (total panjang jalan 769,63 Km), drainase dalam kondisi baik baru mencapai 61,31% (471,86 Km), hal ini disebabkan karena pembangunan jalan tidak disertai pembangunan drainase, sehingga merupakan salah satu penyebab rusaknya kondisi jalan. Program pendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana Dasar Masyarakat, diantaranya:

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
2. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya; dan
3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.

Permasalahan :

- a. Infrastruktur jalan dan jembatan banyak dalam kondisi rusak, sebagai akibat minimnya pemeliharaan dan peningkatan prasarana jalan dan jembatan.
- b. Belum terpenuhinya semua kebutuhan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam mendukung pembangunan pertanian dan penyediaan air baku.
- c. Belum optimalnya fungsi sarana, prasarana dan utilitas umum (drainase).
- d. Belum optimalnya kinerja sarana dan prasarana air bersih, sanitasi terutama, di lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah.
- e. Rendahnya kualitas pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung Pemerintah diakibatkan tidak dipatuhinya NSPM (Norma Standar Pedoman Manual) dan rendahnya sosialisasi serta pengawasan pelaksanaan NSPM.
- f. Belum optimalnya kinerja tim pembina jasa konstruksi di tingkat kabupaten dalam pembinaan sampai dengan pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi.

Solusi :

- a. Peningkatan pemeliharaan dan peningkatan kualitas prasarana jalan dan jembatan;
- b. Pemenuhan secara bertahap kebutuhan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam mendukung pembangunan pertanian dan penyediaan air baku;
- c. Optimalisasi fungsi sarana, prasarana dan utilitas umum (drainase);
- d. Optimalisasi kinerja sarana dan prasarana air bersih, sanitasi terutama, di lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah;
- e. Sosialisasi serta pengawasan pelaksanaan NSPM (Norma Standar Pedoman Manual) untuk mengawasi pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung Pemerintah secara ketat; dan
- f. Peningkatan kinerja tim pembina jasa konstruksi di tingkat kabupaten dalam pembinaan sampai dengan pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi.



33. Sasaran Meningkatnya Kualitas Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Penyelenggaraan Angkutan;



Peningkatan jumlah sarana angkutan publik, menuntut ketersediaan prasarana perhubungan jalan yang memadai untuk pengangkutan barang dan jasa. Adapun kondisi sarana perhubungan pada saat ini dapat dicerminkan dari keberadaan sarana transportasi darat yang terdiri mobil barang, kendaraan khusus dan angkutan publik.

Adapun capaian sasaran: [Meningkatnya Kualitas Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Penyelenggaraan Angkutan](#) disajikan pada Tabel 3.75.

Tabel 3.75.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Sasaran Meningkatnya Kualitas Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan
Penyelenggaraan Angkutan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan	36,04	43,58	47,41	45,87	96,75	57,52	79,75

Sumber: Dinas Perhubungan, 2020.

Pencapaian indikator tingkat pelayanan infrastruktur perhubungan meningkat dari tahun lalu 43,58% menjadi 45,87%, angka tersebut masih dibawah target yang ditetapkan pada tahun 2019 yaitu sebesar 47,41%. Prosentase tingkat realisasinya sebesar 96,75%, hal tersebut disebabkan karena target yang disampaikan merupakan target renstra pada tahun ke-4 (Tahun 2019) yang belum disesuaikan kedalam target Renja Tahun 2019 dengan melewati berapa kebijakan terkait pengurangan anggaran.

Pencapaian indikator tingkat pelayanan infrastruktur perhubungan sebagaimana tersebut di atas, didukung jumlah sarana angkutan (Umum dan Pribadi) disajikan pada Tabel 3.76.

Tabel 3.76.
Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi)
Di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019

Jenis Kendaraan	Tahun (unit)				
	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01 Mobil Barang	11.049	10.657	9.622	8.878	8.591
02 Mobil Bus					
* Umum	386	464	397	384	408
<i>Bus Besar</i>	80	44	65	97	88
<i>Bus Sedang</i>	196	131	261	248	268
<i>Bus Kecil</i>	110	289	71	39	52
* Bukan Umum	155	137	105	111	117
03 Kendaraan Khusus / Alat Berat	9	9	6	10	21
Jumlah	11.985	11.731	10.527	9.383	9.137

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2020.

Berdasarkan Tabel 3.76. sebagaimana tersebut di atas, jumlah terminal angkutan penumpang umum/sub terminal sebanyak 8 (delapan) lokasi untuk mendukung transportasi darat. Data terminal angkutan penumpang umum pada tahun 2019 disajikan pada Tabel 3.77.

Tabel 3.77.
Data Terminal Angkutan Penumpang Umum
Di Kabupaten Klaten Tahun 2019

No	Terminal	Alamat	Type	Luas
1	2	3	4	5
1	Penggung	Penggung, Ceper, Klaten	C	4500 m ²
2	Cawas	Cawas, Klaten	C	3000 m ²
3	Teloyo	Teloyo, Wonosari, Klaten	C	3310 m ²
4	Pasar Klaten	Klaten Tengah	C	600 m ²
5	Bendogantungan	Bendogantungan, Klaten Selatan	C	3168 m ²
6	Tulung	Tulung, Klaten	C	400 m ²
7	Manisrenggo	Manisrenggo, Klaten	C	1785 m ²
8	Delanggu	Karang, Klaten	C	7000 m ²

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2020.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan, dilaksanakan dengan program Peningkatan Pelayanan Angkutan.



Permasalahan:

1. Perlengkapan Jalan Terpasang belum Optimal
2. Tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas di bidang angkutan (ijin trayek, laik jalan dan angkutan galian Golongan C)
3. Rendahnya kesadaran pemilik KBWU untuk mengujikan kendaraannya
4. Masih minimnya jumlah *Traffic Light ATCS* yang telah terkoneksi dengan *CC Room*
5. Pemasangan Rambu-rambu lalu lintas daerah perbatasan yang masih belum optimal
6. Ketertiban Administrasi dan Teknis di Pengujian kendaraan bermotor yang justru dikeluhkan masyarakat dan berbanding negatif terhadap retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Solusi:

Dari permasalahan yang dihadapi diatas, secara garis besar solusi terhadap permasalahan utama, diantaranya:

1. Meningkatkan tingkat pelayanan infrastruktur perhubungan; dan
2. Mengoptimalkan kualitas pelayanan perhubungan.

34. Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Pemukiman;

Menghadapi tantangan dalam rangka peningkatan prasarana dasar permukiman khususnya kawasan permukiman padat, maka harus ditempuh dengan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukimannya. Masyarakat perlu ditingkatkan kesadarannya untuk mampu memelihara prasarana dasar permukiman yang ada di lingkungannya, dengan demikian sumber daya manusia di tingkat Pemerintahan desa dan kelurahan secara bertahap ditingkatkan kemampuannya, selain berkonsentrasi mengurus masalah administrasi Pemerintahan juga mampu memberdayakan masyarakat.

Keseluruhan lahan yang ada, tidak mungkin untuk dibangun sebagai kawasan permukiman, oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Klaten harus melakukan pembatasan kawasan untuk pembangunan perumahan, dan melakukan optimalisasi pemanfaatan lahan. Sementara ini tercatat sebanyak 379.404 unit

rumah, dengan perincian: untuk tempat tinggal sebanyak 307.713 unit, campuran sebanyak 48.532 unit, dan bukan tempat tinggal sebanyak 23.159 unit.

Adapun capaian sasaran Meningkatkan Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Pemukiman sebagaimana Tabel 3.78.

Tabel 3.78.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Indeks Kualitas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Indeks kualitas perumahan dan kawasan pemukiman	57,71	34,08	73,75	53,76	72,89	74	72,65

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2020.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Pemukiman di Kabupaten Klaten yang pergerakannya relatif lambat. Hal ini disebabkan karena, 1). Penanganan air minum layak, penduduk yang terlayani sistem air limbah yang layak sangat tergantung pada sumber pendanaan dari APBN. Sementara itu jumlah rumah tangga 182.324 unit, 2) penanganan kawasan kumuh perkotaan, sementara ini hanya bergerak di 2 (2 desa) titik sasaran dengan cakupan luasan 34,47 Ha. 3). Penanganan RTLH hanya bergerak pada kisaran 1087 unit pertahun, padahal jumlah RTLH masih sebanyak 24.775 unit.

Pada tahun 2019, program yang dilaksanakan untuk sasaran: Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Pemukiman terdiri dari 8 (delapan) program, diantaranya:

1. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
2. Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan; dan
3. Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial;
4. Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung;
5. Pengembangan Perumahan;
6. Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong;
7. Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial; dan
8. Pembangunan infrastruktur pedesaan/perkotaan.

Permasalahan :

- a. Banyaknya rumah tidak layak huni, dan merata di setiap kecamatan.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan lahan dengan pola pembangunan vertikal terutama pada kawasan-kawasan permukiman yang padat.



- c. Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
- d. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung permukiman (air bersih, sanitasi dan utilitas umum).
- e. Masih adanya kawasan kumuh perkotaan.

Solusi :

- a. Percepatan penanganan pembangunan rumah tidak layak huni;
- b. Mengoptimalkan upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
- c. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung permukiman (air bersih, sanitasi dan utilitas umum) layak melalui pelaksanaan Program Kotaku; dan
- d. Percepatan penanganan kawasan kumuh perkotaan dengan mengerakkan partisipasi masyarakat lewat CSR.

35. Sasaran Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Konsep Tata Ruang;



Peningkatan efektivitas Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai instrumen pembangunan secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus mengintegrasikan aspek lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan yang dimaksud adalah rangkaian konsep dan azas yang menjadi dasar rencana. Hal inilah yang menjadi pijakan pengendalian dan pemanfaatan ruang.

Adapun capaian sasaran: [Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai Dengan Konsep Tata Ruang](#) sebagaimana Tabel 3.79.

Tabel 3.79.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai Dengan Konsep Tata Ruang

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 208	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Ketaatan terhadap RTRW	78,86	78,98	79,2	78,98	100,28	80,00	98,73

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020.

Kebijakan, rencana dan atau program (KRP) yang disusun harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, juga selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Pada tahun 2019 ketaatan terhadap RTRW mencapai 78,98%, konsekwensi logis dari persoalan tersebut, KRP harus memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga pemanfaatan dan pengendalian ruang merupakan upaya yang terstruktur, dan sebagai terobosan dan memastikan bahwa pada setiap tahap awal penyusunan KRP sudah memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam pengertian, makna strategisnya sejak awal proses perencanaan dalam pengambil keputusan sudah mempertimbangkan hal-hal yang mendesak terkait pembangunan berkelanjutan

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: *Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai Dengan Konsep Tata Ruang* dilaksanakan melalui Program:

1. Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang;
2. Penataan Ruang; dan
3. Perencanaan Ruang.

Permasalahan :

- a. Kinerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) belum optimal dalam memfasilitasi pemecahan permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- b. Peningkatan efektivitas RTRW sebagai instrumen pembangunan secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang belum dilaksanakan secara konsisten, hal ini disebabkan karena belum lengkapnya piranti peraturan penunjang.
- d. Belum kuatnya pengendalian pemanfaatan ruang melalui penyusunan rencana detail, penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian *insentif-desinsentif* serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.
- e. Kurangnya pengembangan sarana informasi kepada masyarakat di bidang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan
- f. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya.



Solusi :

- a. Optimalisasi Kinerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) belum optimal dalam memfasilitasi pemecahan permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Peningkatan efektivitas RTRW sebagai instrumen pembangunan secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan secara konsisten, dan tidak tebang pilih; dan
- d. Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penyusunan rencana detail, penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian *insentif-desinsentif* serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.

36. Sasaran Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup;



Sebagai upaya untuk menjaga kualitas lingkungan hidup, target indikator sasaran digunakan sebagai alat ukur pencapaian keberhasilan diantaranya: indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan penegakan hukum lingkungan. Masih rendahnya indeks kualitas air salah satu penyebabnya adalah tingginya pencemaran air oleh limbah domestik.

Adapun capaian sasaran: [Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup](#) disajikan pada Tabel 3.80.

Tabel 3.80.

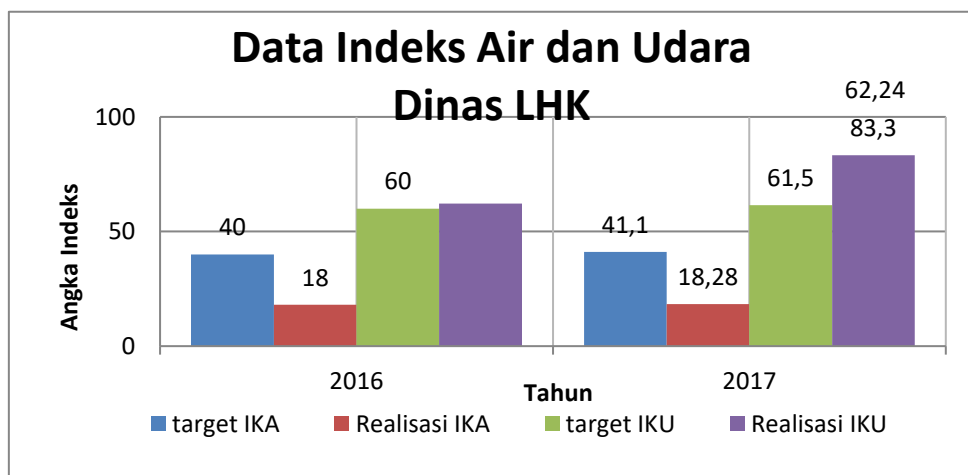
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Indeks kualitas air	16,00	18,28	35,57	28,46	80,01	40,46	70,39
2	Indeks kualitas udara	60,00	83,3	79,57	82,29	103,42	84,46	97,43
3	Indeks tutupan vegetasi (lahan)	34,14	42,54	53,71	83,3	155,09	58,60	142,15

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020.

Target Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2019 sebesar 35,57 dengan capaian realisasi IKA sebesar 28,46 (80,01%) sedangkan target Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2019 sebesar 79,57 telah melampaui target yang ditentukan dengan capaian sebesar 82,29 (103,42%). Uji sampling udara menggunakan *metode pasive sampler* dimana keakuratan lebih baik dan lebih mewakili uji kualitas udara di Kabupaten Klaten, pengambilan uji dilakukan selama 24 jam dengan pelaksanaan 2 kali dalam setahun pada 4 titik (kawasan padat penduduk, transportasi, industri dan perkantoran).

Pengambilan uji sampling kualitas air sungai dilakukan hanya beberapa titik menyesuaikan anggaran dan karena SDM yang terbatas serta antrian pada laboratorium lingkungan yang terakreditasi sangat panjang maka tahun 2019 ini hanya dapat dilakukan sekali dengan pengambilan sampling pada 26 titik dari 7 sungai yang ada di Kabupaten Klaten dari target 10 sungai. Adapun sungai yang dapat dipantau mutu airnya dengan pengambilan sample adalah sebagai berikut : Sungai Rowo Jombor, Sungai Modin, Sungai Soran, Sungai Pusur, Sungai Merbung, Sungai Kacang Ijo, dan Sungai Kroman. Ditambah hasil uji dari BKSDA sebanyak 3 sungai yaitu Sungai Dengkeng, Sungai Jebol dan Sungai Pusur. (DAS Bengawan Solo). Indeks Kualitas air dan Kualitas udara disajikan pada Grafik 3. 15.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019.

Grafik 3.15. Indeks Kualitas Air dan Kualitas Udara

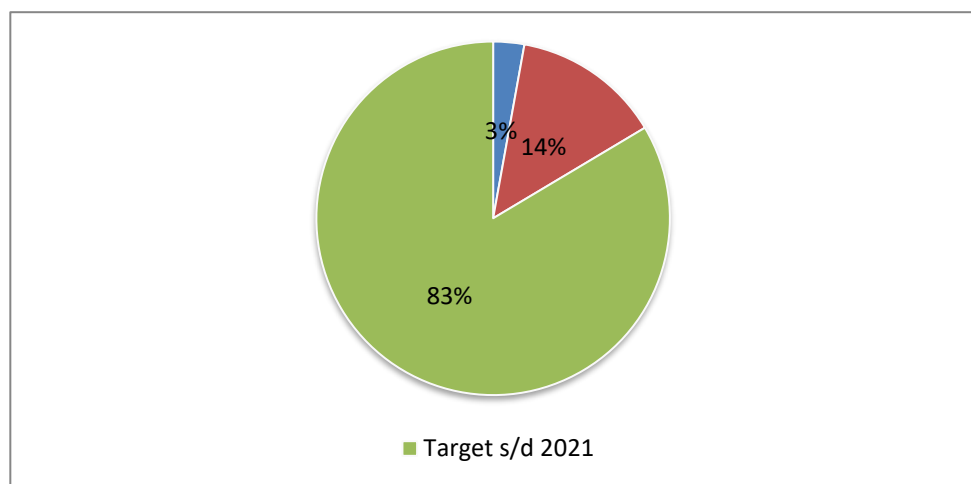
Berdasarkan Grafik 3.15. sebagaimana di atas terlihat bahwa indeks air dibanding tahun lalu mengalami peningkatan sejumlah 0,28 poin dan indeks udara mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebanyak 20,9 poin. Kedua indeks tersebut diatas yaitu indeks kualitas air dan udara apabila digabung dengan indeks tutupan vegetasi/ tutupan lahan dimana indeks tutupan lahan/vegetasi Kab. Klaten tahun 2018 sebesar 42,54 menjadi Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) dengan hasil perhitungan 47,49. Meningkat dibandingkan tahun lalu dimana IKLH Kab. Klaten 39,74, meskipun masih jauh dari target yang diharapkan akan tetapi telah terlihat jelas mengalami progres kenaikan. Dengan adanya komitmen semua pihak



instansi terkait diharapkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten pada akhirnya sesuai dengan apa yang ditargetkan/diharapkan.

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dari target 100% terealisasi 100%. Data perusahaan yang wajib AMDAL sejumlah 9 dan telah dilaksanakan monitoring/pengawasannya.

Perhitungan penegakan hukum lingkungan berdasarkan data jumlah aduan yang masuk kepada Pemda dan diteruskan ke DLHK kemudian ditindaklanjuti sehingga aduan/masalah lingkungan yang ada di masyarakat Kabupaten Klaten dapat terfasilitasi atau terselesaikan. Adapun data selama tahun 2019 sebanyak 5 aduan masyarakat di mana 5 kasus sudah terselesaikan (100%). Hasil tahun 2019 lebih baik dari pada tahun 2018 dimana persentase capaian indikator sasaran ditahun 2018 sebesar 83% menjadi 100% di tahun 2019.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020.

Grafik: 3.16. Capaian Konservasi Penghijauan Daerah Sumber Mata Air Kabupaten Klaten Tahun 2018-2019 dan Target sampai tahun 2021.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: [Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup](#) dilaksanakan dengan program:

1. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
2. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
3. Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH;
4. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
5. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
6. Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).

Permasalahan:

1. Belum sinerginya antar pelaku pemangku kepentingan dalam mengelola lingkungan hidup; dan
2. Tingginya tingkat pencemaran limbah domestik.



Solusi:

Kewenangan dalam pengendalian IPAL domestik bukan menjadi kewenangan Dinas LHK melainkan Perwaskim sehingga diharapkan kedepan adanya program dan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengatasi permasalahan pencemaran limbah air domestik di sungai.

37. Sasaran Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Risiko Bencana;



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan perlunya pengaturan yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (Pasal 1 butir 10 UU PPLH).

Sehingga potensi dampak dan/atau risiko lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh suatu kebijakan, rencana, dan/atau program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi. Dampak dan/atau risiko lingkungan yang mungkin timbul oleh suatu kebijakan, rencana, dan/atau program, oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dikategorisasikan, antara lain sebagai potensi: meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan, keanekaragaman hayati, banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat, dan/atau meningkatkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Berbagai hal tersebut di atas, perlu ada upaya pengurangan kerentanan risiko bencana dengan cara menggerakkan partisipasi masyarakat. Salah satu bentuk upaya tersebut perlunya penguatan masyarakat dengan menciptakan desa tangguh bencana dengan berbagai instrumen yang diperlukan.

Adapun capaian sasaran: [Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Risiko Bencana](#) sebagaimana Tabel 3.81.

Tabel 3.81.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Pengurangan Kerentanan Risiko Bencana

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Kelas Indeks Kapasitas Bencana	0	Sedang	Sedang (119)	Sedang (123,20)	103,53	Sedang	Sedang

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2020.

Pada tahun 2019 upaya untuk mewujudkan desa tangguh bencana belum optimal, sementara ini baru diupayakan dengan rintisan “*Desa Paseduluran*” dan Kabupaten Tangguh Bencana, serta untuk mendukung pencapaian sasaran: *Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Risiko Bencana* di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2019, program yang dilaksanakan untuk sasaran Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Risiko Bencana dengan program, diantaranya:

1. Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
2. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana; dan
3. Program Peningkatan Pengelolaan Logistik;

Permasalahan :

1. Masih rendahnya perencanaan berbasis mitigasi bencana; dan
2. Sulitnya persyaratan dan dukungan pembiayaan Kabupaten Tangguh Bencana.

Solusi :

Berdasarkan perkembangan Indeks Risiko Bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi melalui arah kebijakannya:

- 1) Mengurangi risiko bencana; dan
- 2) Meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana, dilaksanakan melalui strategi:
 - (1) Internalisasi Pengurangan Risiko Bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Pusat dan Daerah;
 - (2) Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana; dan
 - (3) Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana.



38. Sasaran Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Politik dan Demokrasi;



Memperhatikan luas wilayah 65.556 ha (655,56 km²) yang mencakup 26 Kecamatan, 391 Desa serta 10 Kelurahan, sementara ini diukur dari jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk baru pada kisaran 89,83 dengan rasio Pos Siskamling per jumlah penduduk pada kisaran angka 2,49, dan cakupan penegakan Perda baru mencapai 90,91 hal ini disebabkan karena luasan wilayah, jumlah penduduk serta kompleksitas permasalahan kemasyarakatan tidak sebanding dengan jumlah Linmas. Sehingga perlunya pemberdayaan masyarakat dalam ikut menjaga ketentraman dan ketertiban untuk menekan angka kriminalitas menjadi alternatif dalam menjaga kondusivitas daerah.

Adapun capaian sasaran: Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Politik dan Demokrasi sebagaimana Tabel 3.82.

Tabel 3.82.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Politik dan Demokrasi

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019*)			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Indeks Demokrasi	69,75	72,17	77	72,17	93,73	75,70	95,34

Sumber: Kesbangpol Klaten 2020, (diolah).

*) Angka sementara, mengingat tahun 2019 update data dalam proses.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indeks komposit yang diukur berdasarkan 3 (tiga) aspek, diantaranya: 1) kebebasan sipil, 2) hak-hak politik, dan 3) lembaga demokrasi. Penetapan besaran IDI ditetapkan dengan skala nilai 0-100. Penetapan nilai IDI di Kabupaten Klaten mengikuti angka Provinsi Jawa Tengah, karena melakukan pengukuran dan penghitungan Provinsi. Adapun capaian IDI Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 sebesar 70,85, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 72,17.

Pengukuran atas indeks komposit pembentuk IDI pada tahun 2018, diperoleh dari komponen: 1) kebebasan sipil (skor 76,21), 2) hak-hak politik dan lembaga



demokrasi (skor 66,92), dan 3) lembaga demokrasi (skor 75,42). Catatan tahun 2019 belum update data.

Berdasarkan capaian IDI, selanjutnya dikelompokkan berdasarkan kategori baik (indeks > 80), kategori sedang (indeks 60-80), dan kategori buruk (indeks < 60). Oleh karena itu pencapaian IDI pada tahun 2019 angka sementara (sama dengan tahun 2018) memperoleh skor 72,17 dengan kategori sedang.

Pada tahun 2019, program yang dilaksanakan untuk sasaran Meningkatkan: *Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Politik dan Demokrasi* diantaranya:

1. Pengembangan Wawasan Kebangsaan; dan
2. Peningkatan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik;

Permasalahan:

- a. Masih munculnya berbagai penyakit masyarakat;
- b. Adanya ancaman pergerakan terorisme yang berkembang di Klaten;
- c. Masih rendahnya kualitas politik masyarakat.

Solusi :

- a. Pengendalian dan pencegahan dini munculnya berbagai penyakit masyarakat;
- b. Pembinaan kualitas politik masyarakat yang bermartabat dan kepribadian Indonesia.

39. Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya;



Ukuran keberhasilan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya diantaranya diukur dengan indikator Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan). Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 391 desa, dan 10 kelurahan, dengan jumlah kecamatan 10 merupakan target sasaran pembinaan dan fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya melalui lembaga desa untuk menuju ketahanan desa dan kemandirian desa.

Adapun capaian sasaran: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya disajikan pada Tabel 3.83.

Tabel 3.83.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam
Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	16	49	66	58	87,88	100	58

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2020.

Berdasarkan capaian Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya pada tahun 2019 per kelompok rata-rata anggotanya sebanyak 58 orang, atau naik sebanyak 9 (atau 18,37%) kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dibanding tahun 2018.

Apabila per kelompok rata-rata anggotanya sebanyak 58 orang dan diakumulasi dengan jumlah desa/kelurahan sudah merupakan modal sosial untuk melestarikan adat dalam pengembangan kehidupan sosial yang memadai sampai tingkat kabupaten. Tinggal bagaimana pembinaan dan fasilitasi kegiatan dapat dilakukan dengan baik.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya yang didukung dengan program, diantaranya:

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;
2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
3. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.

Permasalahan :

- a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya untuk menjaga keutuhan suatu bangsa;.
- b. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, dalam pelaksanaan Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya;



- c. Belum adanya sarana informasi Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

Solusi :

- a. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya ; dan
 b. Peningkatan sarana informasi Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

40. Sasaran Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;



Ukuran keberhasilan Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat diantaranya diukur dengan indikator Indeks ketertiban masyarakat. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 391 desa, dan 10 kelurahan, dengan jumlah kecamatan 10 merupakan target sasaran Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Adapun capaian sasaran: [Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat](#) disajikan pada Tabel 3.84.

Tabel 3.84.
 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
 Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Indeks Ketertiban Masyarakat	90	92,2	97	96	98,97	100	98,97

Sumber: Satpol PP, 2020.

Berdasarkan capaian Pemeliharaan ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana Tabel 3.86. di atas, memperhatikan luas wilayah 65.556 ha (655,56km²) yang mencakup 26 Kecamatan, 391 Desa serta 10 Kelurahan, sementara ini diukur dari jumlah Linmas per jumlah 10.000 baru pada kisaran 89,83 dengan rasio Pos Siskamling per jumlah penduduk

sudah mencapai kisaran angka 2,49, dan cakupan penegakan Perda pada tahun 2018 mencapai 90,91% dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 92,42% (dari sebanyak 1,254 kasus penegakan Perda dan yang diselesaikan sebanyak 1.159 kasus yang diselesaikan) hal ini disebabkan karena luasan wilayah, jumlah penduduk serta kompleksitas permasalahan kemasyarakatan tidak sebanding dengan jumlah Linmas. Sehingga perlunya pemberdayaan masyarakat dalam ikut menjaga ketentraman dan ketertiban untuk menekan angka kriminalitas menjadi alternatif dalam menjaga kondusivitas daerah.

Jenis kegiatan untuk mendukung pencapaian urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan yang dilaksanakan diantaranya: koordinasi pengamanan wilayah, optimalisasi peran Peningkatan Kinerja Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Toma/ga dan lembaga lainnya, Penegakan Perda, Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dan Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Hal tersebut juga diharapkan mampu untuk mencegah, menekan, dan/atau menyelesaikan terjadinya konflik sosial maupun konflik yang dilatarbelakangi masalah SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan). Berbagai permasalahan yang dihadapi bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan, diantaranya:

1. Penyakit Masyarakat

Data yang tersaji tentang berbagai penyakit masyarakat didapatkan berdasarkan Hasil operasi penertiban pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT), data tersebut adalah mengenai data pelacuran dan peredaran minuman keras/beralkohol. Salah satu jenis penyakit masyarakat yang menonjol yaitu kasus pelacuran dalam kurun waktu Tahun 2015-2019 kasusnya bersifat fluktuatif, data kondisinya disajikan pada Tabel 3.85.

Tabel 3.85.

Rekapitulasi Data Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Tahun 2015-2019

No	Tahun	Jumlah kegiatan	Hasil operasi penertiban					
			PGOT		PSK/ WTS	Pasangan Tidak Resmi	Anjal/punk	
			Pria	Wanita			Pria	Wanita
1	2015	10	11	5	10	50	8	2
2	2016	12	14	7	8	46	12	4
3	2017	15	15	8	6	58	12	14
4	2018	15	8	6	10	78	18	7
5	2019	20	12	5	12	37	38	8

S A N K S I

- Bagi WTS/PSK dan Anjal wanita langsung dikirim ke Barehsos WANODYATAMA Surakarta selama 6 bulan ;
- Bagi Anjal pria dikirim ke PPSA Mandiri Semarang ;
- Bagi PGOT yang terjaring diserahkan ke Rumah Singgah Klaten guna assesment dan tindak lanjut;
- Bagi Pasangan tidak resmi diwajibkan wajib lapor pembinaan sebanyak 20 kali di SATPOL PP.

Sumber: Satpol PP Kab. Klaten, 2019



Berdasarkan Tabel 3.85. sebagaimana tersebut di atas, trend pelanggaran Peraturan Daerah khususnya masalah penyakit masyarakat semakin besar jumlahnya dibandingkan jumlah pelanggaran Peraturan Daerah secara umum, hal ini disebabkan:

- a. Tingkat kesadaran warga masyarakat yang rendah;
- b. Kurangnya sosialisasi peraturan daerah dimaksud sampai kepedesaan/pelosok;
- c. Persaingan ekonomi dan gaya hidup kekinian mendorong masyarakat dan remaja melakukan perbuatan yang cenderung kriminal dan mengganggu ketertiban umum; dan
- d. Penerapan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan daerah belum mampu membuat efek jera para pelanggar.

Berikut Rekapitulasi Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Minuman Keras/Beralkohol selama tahun 2015–2019 disajikan pada Tabel 3.86.

Tabel 3.86.
Rekapitulasi Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan
Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Minuman Keras/ Beralkohol
Tahun 2015–2019

No	Tahun	Jumlah kegiatan	Hasil Operasi Penertiban			
			Ciu	Vodka	Anggur putih	Anggur merah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	2015	6	200 liter	40 botol	5 dus	4 dus
2	2016	4	60 liter	-	2 dus	2 dus
3	2017	3	50 liter	48 botol	4 dus	6 dus
4	2018	0	0	0	0	0
5	2019	2	0	24 botol	7 botol	14 botol
SANKSI						
- Barang bukti miras diserahkan ke Polres guna pemusnahan terpadu;						
- Para pelaku pelanggaran dilakukan tipiring oleh Penyidik Polres Klaten.						

Sumber: Satpol PP Kab. Klaten, 2020.

Berdasarkan Tabel 3.86. sebagaimana tersebut di atas, minuman keras/beralkohol yang ditemukan berdasarkan hasil operasi penertiban pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) jumlahnya juga bersifat fluktuatif. Hal ini tergantung pada situasi sosial budaya masyarakat yang sering kali menjadi baluran tindak kriminal yang mengiringinya.

2. Ancaman Terorisme

Adanya Ancaman Terorisme, Konflik SARA (baik Vertikal maupun Horizontal) dan gerakan yang bersifat radikalisme yang kadang bersifat laten serta kenakalan remaja masih sering terjadi. Kondisi permasalahan ketentraman umum selama tahun 2015–2019 disajikan pada Tabel 3.87.



Tabel 3.87.
Kondisi Jenis Permasalahan Ketentraman Umum
Tahun 2015–2019

No.	Jenis Permasalahan	Tahun (Jumlah Kejadian)				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Ancaman Terorisme	-	17	-	-	-
2.	Konflik Sara	-	17	3	1	-
3.	Gerakan Radikalisme	4	21	9	2	-

Sumber: Kantor Kesbangpol, 2020.

Berdasarkan Tabel 3.87. sebagaimana tersebut di atas jenis permasalahan ketentraman umum di Kabupaten Klaten secara umum mengalami penurunan. Ancaman terorisme hanya terjadi pada tahun 2016 yaitu sebanyak 17 kasus. Sedangkan konflik SARA terbanyak pada Tahun 2016 yaitu sebanyak 17 kasus. Rata-rata jumlah dari jenis permasalahan di Tahun terakhir mengalami penurunan hal ini disebabkan karena intensifnya kegiatan forum kerukunan umat beragama untuk meminimalisir konflik SARA.

3. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas dirumuskan: *Jumlah kriminalitas tertangani/jumlah penduduk X 10.000 (Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)* maka diperoleh data angka kriminalitas sebagai berikut :

a. Tahun 2015 : 3,94.

Jumlah kriminalitas tertangani 509 kasus dibagi jumlah penduduk 1.292.013 dikali 10.000.

b. Tahun 2016 : 4,19

Jumlah kriminalitas tertangani 546 kasus dibagi jumlah penduduk 1.300.706 dikali 10.000.

c. Tahun 2017 : 3,25

Jumlah kriminalitas tertangani 424 kasus dibagi jumlah penduduk 1.304.519 dikali 10.000.

d. Tahun 2018 :1,89.

Jumlah kriminalitas tertangani 248 kasus dibagi jumlah penduduk 1.314.781 dikali 10.000

e. Tahun 2019 : 2,73

Jumlah kriminalitas tertangani 361 kasus dibagi jumlah penduduk 1.323.609 dikali 10.000

Sumber Kesbangpol, 2020.

Angka Kriminalitas belum bisa ditekan, hal ini disebabkan beberapa permasalahan, diantaranya: 1). Bentuk dan modus kejahatan (tindak pidana)



pun terus berkembang, sehingga penanganannya pun harus beda. 2). Selain itu meningkatnya tindak kriminal disebabkan persoalan seperti, ekonomi, sosial, konflik dan rendahnya kesadaran hukum, kemajuan teknologi informasi yang mendorong terjadinya bentuk-bentuk tindak yang didasari atau pun tidak. 3). Selain itu rendahnya ketaatan pelaksanaan terhadap perda/perbup karena kurangnya sosialisasi, dan terbatasnya sumber daya manusia aparatur penegak Perda/Perbup.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang didukung dengan program Pemeliharaan ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Permasalahan :

- a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat untuk menjaga keutuhan suatu bangsa;
- b. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, dalam pelaksanaan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Belum adanya sarana informasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan masyarakat lebih senang mengkonsumsi berita hoax sebagai komoditas politik.

Solusi :

- a. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
- b. Peningkatan sarana informasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas untuk melawan berita *hoax*.

41. Sasaran Meningkatnya Kapasitas Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak;



 **Forum Anak Nasional**

Peningkatan kapasitas perempuan, dan perlindungan anak merupakan salah satu tujuan/*goals* dari pembangunan berkelanjutan (SDGs). Penyebaran



jumlah penduduk yang tidak merata, serta besarnya jumlah jiwa sudah barang tentu akan terkait dengan masalah pangan, gizi, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan khusus anak menjadi hal krusial yang harus diwujudkan untuk melindungi anak. Sehingga perlunya penguatan kelembagaan anak, perlunya hak sipil dan kebebasan, serta perlindungan khusus terhadap tumbuh kembang anak perlu menjadi perhatian serius. Data menunjukkan 14,47 persen penduduk Indonesia termasuk dalam kelompok sangat rawan pangan (asupan kalori <1.400 Kkal/orang/hari), 5,38 persen prevalensi gizi kurang hal ini menunjukkan bahwa *foodborne disease* merupakan masalah kesehatan masyarakat yang perlu diantisipasi bagi tumbuh kembang anak.

Secara khusus, peningkatan kapasitas perempuan diukur dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IPG), dan Indeks Pembangunan Gender (IDG). Sedangkan kondisi umum pencapaian dan permasalahan yang dihadapi perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Klaten, diantaranya terkait : (1). Penguatan kelembagaan, (2). Hak sipil dan kebebasan, (3). Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (4). Kesehatan dasar dan kesejahteraan, (5). Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan kreatif, serta (6). Perlindungan khusus.

Adapun capaian sasaran: [Meningkatnya Kapasitas Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak](#) disajikan pada Tabel 3.88.

Tabel 3.88.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kapasitas Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019*)			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59,95	60,25	60,23	60,25	100,03	60,37	98,72
2	Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Madya	Madya (650)	Nindya (750)	Madya (650)	86,67	Nindya (750)	86,67

Sumber: Dinas Sosial, P3A dan KB, 2020.

Catatan: capaian tahun 2019 angka sementara, karena rilis data belum keluar

Indikator kinerja keberhasilan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG);

Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2015-2019 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan meskipun pada tahun 2016 sempat mengalami penurunan. Peningkatan ini disebabkan adanya komitmen pemerintah Daerah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, hanya saja peningkatan ini perlu ditunjang dengan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender yang optimal. Perkembangan Indeks



Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 3.89.

Tabel 3.89.
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
IPG	95,90	73,97	96,54	96,62	96,62

Sumber : Dinsos P3A dan KB, 2020.

Catatan: *) angka sementara

Berdasarkan Tabel 3.89. sebagaimana tersebut di atas, selama dua tahun terakhir IPG tidak mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 96,62% dan pada tahun 2019 sementara tetap 96,62%. Perlunya peningkatan kerjasama yang baik antara pemangku kepentingan melalui penguatan lembaga P2TP2A, dan dukungan penganggaran responsif gender diharapkan akan meningkatkan IPG.

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) selama tahun 2015-2019 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan meskipun pada tahun 2017 sempat mengalami penurunan. Peningkatan ini disebabkan adanya komitmen pemerintah Daerah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan. Perkembangan Indeks komposit pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 3.90.

Tabel 3.90.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Klaten Periode 2015-2019

No.	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	6,00	6,00	6,00	6,00	18
2	Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	52,74	49,7	43,65	52,71	52,71
3	Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja (%)	37,69	37,69	37,76	37,77	37,77
4	IDG	59,95	59,95	59,60	60,25	60,25

Sumber : Dinas Sosial, P3A dan KB, 2020.

Catatan: *) angka sementara update terakhir per Februari 2020. (IDG)



Berdasarkan Tabel 3.90. sebagaimana tersebut di atas bisa dilihat perkembangan Indeks komposit pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) selama tahun 2015-2019 bersifat relatif fluktuatif, hal ini dikarenakan budaya *patriarki* yang masih kuat. Hal ini termanifestasi dalam bentuk *stereotype*, marginalisasi, subordinasi, tindak kekerasan dan beban ganda perempuan, dan adanya deskriminasi pada upah pekerja perempuan di sektor non formal. Khusus Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%) pada tahun 2019 angkanya mencapai 18% (atau 9 perempuan dari total anggota DPRD sebanyak 50 orang).

3. Peran Perempuan dalam Pemerintahan

Partisipasi perempuan dalam pembangunan dapat dilihat dari posisi perempuan dalam jabatan eksekutif dan legislatif selama tahun 2015-2019 relatif stagnan, hal ini disebabkan karena masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap perempuan untuk menduduki posisi jabatan eksekutif dan legislatif. Perkembangan keterwakilan peran perempuan dalam jabatan pemerintahan, dan Lembaga Perwakilan Rakyat selama tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 3.91.

Tabel 3.91.
Keikutsertaan Perempuan di dalam Jabatan Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019

No.	Jenis Jabatan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Eksekutif (%)	(7.417/26.518) = 27,97	(7.072/27.344) = 25,86	56,6	57	59,7
2	Legislatif (%)	(3/50) = 6,00	(3/50) = 6,00	(3/50) = 6,00	(3/50) = 6,00	(9/50) = 18

Sumber: Dinsos P3A dan KB, 2020 (diolah.)

Berdasarkan Tabel 3.91. sebagaimana tersebut di atas, keterlibatan perempuan di lembaga legislatif pada tahun 2015-2019 stagnan karena masih dalam satu periode DPRD hasil Pemilu tahun 2014, hanya dalam jabatan eksekutif mulai tahun 2017 persentasenya meningkat, hal ini seiring dengan peningkatan kualitas dan kemampuan perempuan dalam mengisi formasi jabatan publik.

4. Perlindungan Anak

Upaya perlindungan anak dan perempuan ditunjukkan dengan meningkatnya penyelesaian terhadap kasus kekerasan yang berbasis gender dan anak disebabkan karena secara intensif telah dilakukan sosialisasi tentang hukum dan peraturan lainnya berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak kepada masyarakat. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat pada Tabel 3.92.



Tabel 3.92.
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Klaten 2015-2019

Tahun	Fisik		Psikis		Seksual		Penelantaran		Traficking		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2015	7	10	2	0	2	18	0	3	0	0	42
2016	11	16	2	8	0	29	0	6	0	1	73
2017	9	6	3	5	0	12	0	7	1	0	43
2018	7	8	2	5	0	22	1	6	0	0	51
2019	6	7	9	3	5	15	4	8	0	0	57

Sumber: Dinsos P3A dan KB, 2020 (diolah.)

Berdasarkan Tabel 3.92. sebagaimana tersebut di atas, selama dua tahun terakhir (tahun 2018-2019) jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) mengalami peningkatan sebesar 6 kasus dari tahun 2018 sebesar 51 kasus menjadi 57 kasus di tahun 2019, hal ini disebabkan belum optimalnya perlindungan perempuan dan anak dalam menghadapi kekerasan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Peningkatan Kapasitas Perempuan, dan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Klaten didukung dengan program:

1. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
2. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
3. Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan; dan
4. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.

Permasalahan :

- a. Masih kurangnya kebijakan pembangunan yang berpihak pada perempuan dan anak;
- b. Lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
- c. Masih adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- d. Sistem kesejahteraan dan perlindungan anak belum memadai.

Solusi :

- a. Peningkatan kebijakan pembangunan yang berspektif perempuan dan anak;
- b. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
- c. Peningkatan pendampingan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan; dan
- d. Peningkatan sistem kesejahteraan dan perlindungan anak.



42. Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Perhubungan;



Ukuran keberhasilan meningkatnya kualitas layanan perhubungan diantaranya diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan, terkait dengan aspek keselamatan, keamanan, kemudahan dan kesetaraan dalam penyelenggaraan angkutan serta kepuasan bagi pengguna layanan perhubungan. Adapun capaian sasaran: [Meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan](#) disajikan pada Tabel 3.93.

Tabel 3.93.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kualitas Layanan Perhubungan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Indeks kepuasan layanan perhubungan	75,99	78,95	80,05	79,02	98,71	81,08	97,48

Sumber: Dinas Perhubungan, 2020.

Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Berdasarkan capaian Meningkatnya Kualitas Layanan Perhubungan sebagaimana Tabel 3.93. di atas, ditunjang adanya ketersediaan prasarana perhubungan jalan yang memadai untuk pengangkutan barang dan jasa. Adapun kondisi sarana perhubungan pada saat ini dapat dicerminkan dari keberadaan sarana transportasi darat yang terdiri mobil barang, kendaraan khusus dan angkutan publik. Jumlah sarana angkutan (Umum dan Pribadi) disajikan pada Tabel 3.94.

Tabel 3.94.
Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi)
di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019

Jenis Kendaraan	Tahun (unit)				
	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01 Mobil Barang	11.049	10.657	9.622	8.878	8.591
02 Mobil Bus					
* Umum	386	464	397	384	408
<i>Bus Besar</i>	80	44	65	97	88
<i>Bus Sedang</i>	196	131	261	248	268
<i>Bus Kecil</i>	110	289	71	39	52
* Bukan Umum	155	137	105	111	117
03 Kendaraan Khusus/Alat Berat	9	9	6	10	21
Jumlah	11.985	11.731	10.527	9.383	9.137

Sumber : Dinas Perhubungan, 2020.

Disamping Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi) yang tercatat, juga dimiliki terminal angkutan penumpang umum/sub terminal sebanyak 8 (delapan) lokasi untuk mendukung transportasi darat. Data terminal angkutan penumpang umum pada tahun 2019 disajikan pada Tabel 3.95.

Tabel 3.95.
Data Terminal Angkutan Penumpang Umum
di Kabupaten Klaten Tahun 2019

No	Terminal	Alamat	Type	Luas
1	2	3	4	5
1	Penggung	Penggung, Ceper, Klaten	C	4500 m ²
2	Cawas	Cawas, Klaten	C	3000 m ²
3	Teloyo	Teloyo, Wonosari, Klaten	C	3310 m ²
4	Pasar Klaten	Klaten Tengah	C	600 m ²
5	Bendogantungan	Bendogantungan, Klaten Selatan	C	3168 m ²
6	Tulung	Tulung, Klaten	C	400 m ²
7	Manisrenggo	Manisrenggo, Klaten	C	1785 m ²
8	Delanggu	Karang, Klaten	C	7000 m ²

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2020.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Perhubungan yang didukung dengan program Peningkatan Pelayanan Angkutan.



Permasalahan :

- a. Tingginya mobilitas penduduk, diperlukan sarana perhubungan massal yang terjangkau dan mudah. Namun banyak kondisi angkutan umum yang sudah tidak laik jalan;
- b. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, dalam pelaksanaan pemenuhan layanan perhubungan; dan
- c. Belum optimalnya sarana informasi layanan perhubungan yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

Solusi :

- a. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait layanan perhubungan ; dan
- b. Peningkatan sarana informasi layanan perhubungan yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

43. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Perijinan Satu Pintu yang Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat;



Ukuran keberhasilan meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat diukur dengan indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 391 desa, dan 10 kelurahan, dengan jumlah kecamatan 10 merupakan target sasaran Pelayanan Perijinan Satu Pintu dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menuju ketahanan desa dan kemandirian desa, serta daya saing Daerah.

Adapun capaian sasaran: [Meningkatnya Pelayanan Perijinan Satu Pintu yang Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat](#) disajikan pada Tabel 3.96.

Tabel 3.96.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Perijinan Satu Pintu yang Tepat Waktu, Tepat Mutu,
Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	84,50	80,52	80	78,37	97,96	80,00	97,96

Sumber: DPM dan PTSP, 2020.

Berdasarkan tanggapan penggunaan layanan ketika disurvei secara mandiri oleh Dinas Penanaman Modal, dan Perijinan Satu Pintu nilai Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 78,37 (artinya kategori baik). Perolehan indeks ini didasarkan atas penilaian atas 8 (delapan) unsur pelayanan, diantaranya: a. Persyaratan, b. Prosedur, c. Waktu pelayanan, d. Biaya/tarif, e. Produk layanan, f. Kompetensi pelaksana, g. Perilaku pelaksana, h. Maklumat pelayanan, dan i. Penanganan pengaduan.

Disamping itu pada tahun 2019 tercatat kinerja layanan satu pintu diukur dari jumlah penerbitan Surat Izin usaha berdasarkan jenis usaha, diantaranya: 1. Perusahaan kecil sebanyak 61 izin usaha, 2. Perusahaan menengah sebanyak 367 izin usaha, dan 3. Perusahaan besar sebanyak 73 izin usaha. Sedang izin ganggu (HO) menurut bentuk badan usaha, diantaranya: 1. Perusahan Terbatas (PT) sebanyak 46 PT, 2. CV sebanyak 73, dan 3. Lainnya sebanyak 193 HO.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat yang didukung dengan program Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah.

Permasalahan :

- a. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, dalam pelaksanaan pemenuhan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat; dan
- b. Belum optimalnya sarana informasi layanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

Solusi :

- a. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait layanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat ; dan
- b. Peningkatan sarana informasi layanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.



44. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas;



Ukuran keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan publik tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat diantaranya diukur pada layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Jumlah penduduk pada tahun 2019 tercatat sebanyak 1.323.609 orang, yang sudah memiliki e-KTP sebanyak 957.821 orang dan yang mempunyai Akte Kelahiran sebanyak 1.313.742 orang.

Adapun capaian sasaran: Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas sebagaimana Tabel 3.97.

Tabel 3.97.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Indeks kepuasan layanan masyarakat thd layanan administrasi	Sdh	82,74	Sdh (92,70)	Sdh (91,77)	99,00	sdh	sdh

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2020.

Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil meliputi 3 (tiga) bidang, yaitu : (i) Pendaftaran Penduduk, (ii) Pencatatan Sipil, dan (iii) Pengelolaan Informasi Kependudukan. Pendaftaran Penduduk dengan produk Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Kependudukan (SKK). Pencatatan Sipil dengan produk Akte Kelahiran, Akte Kematian, Akte Perkawinan, Akte Pengangkatan Anak dan Akte Pengakuan/Pengesahan Anak. Pengelolaan Informasi Kependudukan dengan produk data/informasi kependudukan yang berupa olahan proses dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Perkembangan jumlah pelayanan akte di Kabupaten Klaten Tahun 2015–2019 disajikan pada Tabel 3.98.

Tabel 3.98.
Jumlah Pelayanan Akte di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019

No	Jenis Akte	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kelahiran	23.503	22.356	23.256	27.755	26.582
2	Kematian	1.336	615	1.400	2.116	1.800
3	Perkawinan	595	441	450	473	472
4	Perceraian	58	58	58	71	76

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2020.

Berdasarkan Tabel 3.98. sebagaimana tersebut di atas, untuk mewujudkan penerapan *Single Identity Number* program e-KTP sampai dengan tahun 2019 baru tercatat penduduk yang ber-KTP sebanyak 957.821 orang, dan yang mempunyai Akte Kelahiran sebanyak 1.313.742 orang. Kondisi masyarakat Kabupaten Klaten yang belum memiliki kartu identitas (baik kartu identitas dalam bentuk akte lahir dan Kartu Tanda Penduduk) dalam kurun waktu tahun 2015-2019 cenderung menurun, hal ini dapat dilihat dari Tabel 3.98. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen resmi kependudukan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan secara signifikan. Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Klaten yang belum memiliki Akte Lahir dan KTP Elektronik tahun 2015–2019 disajikan pada Tabel 3.99.

Tabel 3.99.
Penduduk Kabupaten Klaten yang Belum Ber-Akte Lahir dan KTP Elektronik Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Belum Memiliki Akte Lahir	Belum Memiliki KTP Elektronik
1	2015	967.452	106.872
2	2016	927.310	93.846
3	2017	894.986	91.538
4	2018	877.190	71.223
5	2019	850.325	55.921

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2020.

Berdasarkan Tabel 3.99. sebagaimana tersebut di atas jumlah penduduk Kabupaten Klaten yang belum memiliki Akte Lahir dan KTP Elektronik tahun 2015–2019 cenderung turun, hal ini disebabkan karena validasi data kependudukan untuk mewujudkan penerapan *Single Identity Number* program e-KTP.

Permasalahan :

- a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen resmi kependudukan.



- b. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, dan
- c. Belum adanya sarana informasi kependudukan dan catatan sipil yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

Solusi :

- a. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan administrasi kependudukan; dan
- b. Peningkatan sarana informasi kependudukan dan catatan sipil yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

45. Sasaran Pengembangan Ketrasmigrasian;



Ukuran keberhasilan pengembangan ketrasmigrasian diukur dengan indikator Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi. Selama tahun 2015-2019 sasaran transmigrasi di daerah: Kalimantan, Sulawesi dan Sumatra, namun mulai tahun 2017-2019 tinggal Sumatra saja yang menjadi tujuan transmigrasi.

Adapun capaian sasaran: Pengembangan Ketrasmigrasian disajikan pada Tabel 3.100.

Tabel 3.100.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Pengembangan Ketrasmigrasian

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi	-64,62	-80	41	5,2	12,68	42	12,38

Sumber: Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Tranmigrasi, 2020.

Ukuran keberhasilan peningkatan besaran minat transmigrasi diukur dari jumlah peserta transmigrasi yang terdaftar pada tahun 2018 sebanyak 37 jiwa (20 KK), dan pada tahun 2019 menjadi sebanyak 56 jiwa (20 KK). Sedangkan yang diberangkatkan menjadi peserta yang ditempatkan pada tahun 2018 sebanyak 28 jiwa (7 KK), dan pada tahun 2019 menjadi sebanyak 44 jiwa (14 KK).



Adapun peta penyebaran penempatan transmigrasi menurut daerah penempatan tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 3.101.

Tabel 3.101.
Realisasi Penempatan Transmigrasi Umum Menurut Daerah Penempatan Tahun 2015-2019

TAHUN	Sumatra		Kalimantan		Sulawesi	
	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2015	5	23	2	7	-	-
2016	5	20	10	46	4	17
2017	4	13	-	-	-	-
2018	7	28	-	-	-	-
2019	14	44				

Sumber : Disperinaker Kabupaten Klaten, 2020.

Berdasarkan Tabel 3.101. sebagaimana tersebut di atas, pengiriman transmigrasi dari tahun ke tahun mengalami penurunan, hal ini dikarenakan berkurangnya quota penempatan transmigran asal Kabupaten Klaten yang ditetapkan oleh Provinsi Jawa Tengah. Selama ini penempatan transmigrasi Kabupaten Klaten masih tergantung dengan quota dan anggaran dari Provinsi Jawa Tengah

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran pengembangan ketransmigrasian yang didukung dengan program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, dan program Transmigrasi Lokal.

Permasalahan :

- a. Minimnya minat calon transmigrasi, sekalipun fasilitasi dan pembekalan dari pemerintah cukup;
- b. Penempatan calon transmigrasi itupun harus Provinsi yang menentukan quotanya.
- c. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, dalam pelaksanaan penjangkaran sampai penempatan transmigrasi; dan
- d. Belum optimalnya sarana informasi layanan ketransmigrasian yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

Solusi :

- a. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait layanan ketransmigrasian; dan
- b. Peningkatan sarana informasi layanan ketransmigrasian yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.



3.3 Akuntabilitas Anggaran*)

Potensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah pada tahun 2019 direncanakan sebesar Rp.2.716.040.824.886,- (*dua trilyun tujuh ratus enam belas milyar empat puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah rupiah*), dan terealisasi sebesar Rp.2.680.504.038.263,44 (*dua trilyun enam ratus delapan puluh milyar lima ratus empat juta tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tiga koma empat puluh empat rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019 direncanakan sebesar Rp.292.651.477.481,- (*Dua ratus sembilan puluh dua milyar enam ratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah*), dan teralisasi sebesar Rp.311.577.751.655,44. (*tiga ratus sebelas milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh lima koma empat puluh empat rupiah*), atau melampaui target sebanyak Rp.19.026.274.174,44 (*sembilan belas milyar dua puluh enam juta dua ratus tujuh empat ribu seratus tujuh puluh empat koma empat puluh empat rupiah*).

1.2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan pada tahun 2019 direncanakan sebesar Rp.1.719.123.949.405,- (*satu trilyun tujuh ratus sembilan belas milyar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima rupiah*), dan terealisasi sebesar Rp.1.659.690.587.378,- (*satu trilyun enam ratus lima puluh sembilan milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah*) atau 96,54%.

1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2019 direncanakan sebesar Rp.704.265.398.000,- (*tujuh ratus empat milyar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*), dan terealisasi sebesar Rp.709.135.699.230,- (*tujuh ratus sembilan milyar seratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah*) atau 100,69%.

2. Belanja Daerah

Mengingat potensi pendapatan dan meningkatnya kebutuhan pembangunan, namun Belanja Daerah pada tahun 2019 direncanakan sebesar Rp.3.091.935.509.198,52 (*tiga trilyun sembilan puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta lima ratus sembilan ribu seratus sembilan*



puluh delapan koma lima puluh dua rupiah), dan terserap sebanyak Rp.2.673.947.783,68 (dua trilyun enam ratus tujuh puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga koma enam puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

2.1. *Belanja Tidak Langsung*

Belanja Tidak Langsung pada tahun 2019 sebesar Rp.2.079.221.807.921,- (Dua trilyun tujuh puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah), dan terealisasi sebanyak Rp.1.816.935.736.757,- (satu trilyun delapan ratus enam belas milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah). Atau terserap 87,39%

2.2. *Belanja Langsung*

Belanja Langsung (mendanaikan program dan kegiatan) pada tahun 2019 direncanakan sebanyak Rp.1.012.713.701.277,52 (satu trilyun dua belas milyar tujuh ratus tiga belas juta tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma lima puluh dua rupiah), dan terealisasi sebanyak Rp.857.012.047.026,68 (delapan ratus lima puluh tujuh milyar dua belas juta empat puluh tujuh ribu dua puluh enam koma enam puluh delapan rupiah). Atau terserap 84,53%

Untuk menjaga keseimbangan sistem penganggaran daerah langkah yang diperlukan adalah menyusun kebijakan pembiayaan daerah dengan penjelasan sebagai berikut:

1. *Penerimaan Pembiayaan Daerah pada tahun 2019 direncanakan sebesar Rp.395.394.684.312,52,- (Tiga ratus sembilan puluh lima milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat tiga ratus dua belas koma lima puluh dua rupiah).*
2. *Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada tahun 2019 direncanakan sebesar Rp.19.500.000.000,- (Sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah).*

**) Catatan: input data per: pk. 10,17 WIB tanggal 27 Januari 2020.*



Tabel 3.102.

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	Persentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	50	98,28	196,56	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): 1. Dinas 2. TK 3. SKB	722.000.000 180.000.000 45.016.000	576.773.886 164.348.400 42.868.000	79,90 91,30 95,23
		Persentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	85	88,09	100,11	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	27.151.950.500	22.874.027.146	84,24
							Pendidikan Non Formal: 1. Dinas 2. SKB	155.000.000 3.476.777.000	123.102.250 3.401.538.950	79,40 97,84
							Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	16.156.200.000	15.292.692.352	94,66
							Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	120.000.000	97.650.600	81,40
							Manajemen Pelayanan Pendidikan	2.781.000.000	2.413.748.155	86,79
							Pengelolaan bantuan Operasional Sekolah (BOS): 1. SD	65.282.177.791	61.556.288.786	94,29

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							2. SMP	40.628.270.099	38.191.515.928	94,00
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan	Kasus kematian Ibu	Kasus	16	12	75,00	Upaya Kesehatan Masyarakat: 1. Dinas 2. Puskesmas	11.051.770.531 22.755.000.000	7.377.244.447 20.001.084.316	66,75 87,90
		Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	10,11	10,01	99,01	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.961.530.000	1.233.545.666	62,89
		Angka kematian Balita	per 1000 KH	1,65	1,59	96,36	Obat dan Perbekalan Kesehatan	4.219.493.000	3.938.314.555	93,34
		Prevalensi gizi buruk (BB/U)	%	0,72	0,71	98,61	Pengawasan Obat dan Makanan	100.000.000	97.129.700	97,13
							Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	444.700.000	439.433.250	98,82
							Perbaikan Gizi Masyarakat	410.900.000	400.875.550	97,56
							Pengembangan Lingkungan Sehat	1.265.150.000	1.041.250.146	62,89
							Standarisasi Pelayanan Kesehatan: 1. Dinas 2. Puskesmas	60.000.000 73.972.517.015	23.103.700 62.361.586.356	38,51 84,30
							Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	19.596.892.625	17.217.203.931	87,86
							Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan prasarana	16.248.661.000	13.880.824.648	85,43

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							sarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya			
							Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/Rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/Rumah sakit mata	6.749.999.000	6.544.341.345	96,24
							Peningkatan pelayanan kesehatan Lansia	93.634.000	75.642.950	80,79
3	Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitkan oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit.	Usia Harapan Hidup	Tahun	76,22	76,67	100,59	Pelayanan Kesehatan	43.599.095.276,52	37.064.495.638,69	85,01
							Manajemen, informasi dan regulasi kesehatan	200.000.00	156.996.372	78,50
4	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	85	62,26	72,25	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	115.000.000	98.689.800	85,82

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Persentase penguatan kapasitas PSKS	%	97	96	98,9	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.690.900.000	1.292.352.299	76,43
		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	13,10	13,09	99,92	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial: 1. Dinsos P3A dan KB 2. Kesra	862.000.000 9.400.000	829.763.850 300.000	96,26 3,18
							Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)	40.000.000	29.501.100	73,75
5	Menurunnya angka kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>) / TFR	Angka Kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>) / TFR	Angka	2,14	2,10	98,13	Keluarga Berencana	8.439.392.000	7.152.344.757	84,75
							Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja	14.500.000	14.342.450	98,91
							Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri	521.640.000	443.081.500	84,94
							Pelayanan kontrasepsi	146.287.000	130.942.484	89,51
							Promosi Kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	190.000.000	184.350.000	97,02
							Pengembangan pusat informasi dan konseling KRR	158.350.000	124.626.647	78,70

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	45.773.000	44.806.700	97,89
							Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	10.500.000	10.150.000	100
							Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	8.000.000	7.927.650	99,10
6	Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda	%	10	13	130	Peningkatan Peran Serta kepemudaan	725.000.000	675.803.578	93,21
		Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga	%	5	22	440	Pembinaan dan Pemasyaratan Olahraga	1.293.000.000	1.230.055.680	95,13
							Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	250.000.000	218.283.000	87,31
							Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba:	75.000.000	61.576.000	82,10
							Pembinaan Pemuda dan Olahraga: 1. Disbudparpora 2. Kesra	1.206.000.000 18.030.000	1.079.379.000 16.770.000	89,00 93,01

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	%	6	3,2	54	Pengelolaan Kekayaan Budaya	2.795.000.000	2.565.670.071	91,79
		Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	10	14,3	143	Pengembangan Nilai Budaya	185.000.000	160.626.500	86,83
							Pengelolaan Keragaman Budaya	75.000.000	71.316.000	95,09
							Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya (Humas)	465.000.000	464.600.000	99,91
8	Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	Persentase kenaikan kunjungan masyarakat	%	5	22,19	443,8	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.970.276.500	1.692.887.360	85,92
9	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	84,08	77,55	92,18	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur: 1. Setda Organisasi 2. BKPD	325.000.000 10.825.000.000	167.382.684 10.770.819.727	51,50 99,5

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							Pembinaan dan Pengembangan Aparatur: 1. Setda Organisasi 2. BKPD	209.000.000 5.550.000.000	152.050.840 3.776.110.192	72,75 68,68
10	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WDP	WTP	133,33	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	15.739.178.000	12.025.963.240	76,41
11	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu	%	100	92,28	92,28	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	27.592.151.000	26.379.372.529	95,06
12	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan	%	100	100	100	Perencanaan Pembangunan Daerah	2.700.000.000	2.242.381.983	83,05
							Perencanaan Pembangunan Ekonomi	556.500.000	507.823.394	91,25
							Perencanaan Sosial dan Budaya	550.000.000	469.979.808	85,45
							Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	600.000.000	590.469.375	98,41
							Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah	490.400.000	417.316.023	85,10

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
13	Meningkatnya tata kelola arsip SKPD	Persentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku	%	5	12,56	251,2	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	308.681.000	261.331.000	84,66
							Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	156.111.000	134.915.388	86,42
							Perbaikan sistem adminstrasi kearsipan	27.340.000	18.861.880	68,99
14	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	Persentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	%	72	71	98,61	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan	192.195.726	156.774.166	81,57
							Tata Kelola Pemerintah Desa	2.767.704.150	2.117.954.375	76,52
							Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	100.000.000	94.170.275	94,17
15	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Level Maturitas SPIP	Tingkat	3	3	100	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	5.335.229.350	4.307.726.169	80,74
		Level Kapabilitas APIP	Tingkat	3	3	100	Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	599.142.200	540.374.741.	90,19
							Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur	39.999.850	33.729.791	84,32

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							pengawasan			
		Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah	Angka	66 (B)	60,33 (B)	91,41	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Tata Laksana Perangkat Daerah	780.000.000	655.486.551	84,04
							Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	165.000.000	123.801.378	75,03
16	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Angka	3	3,22	107,33	Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah			
							1. Pemerintahan	951.000.000	427.616.200	44,96
							2. Umum	3.196.200.000	2.577.112.000	80,63
							Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	135.000.000	128.571.000	95,24
							Pengembangan Wilayah Perbatasan	260.000.000	227.451.100	87,48
							Peningkatan koordinasi pembinaan fasilitasi administrasi Tata Kelola Kecamatan	120.000.000	105.579.700	87,98
							Pengembangan komonikasi, informasi dengan Mass Media (Humas)	296.755.000	281.960.632	95,01
							Peningkatan Koordinasi Pembinaan Fasilitasi Pemberdayaan Desa/Kelurahan di kecamatan	2.871.759.405	2.677.236.150	93,23

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							Peningkatan Koordinasi Pembinaan Fasilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	1.575.178.000	1.472.241.668	93,47
							Peningkatan Koordinasi Pembinaan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	1.661.341.400	1.556.233.494	93,67
							Kerjasama informasi dengan Mass Media (Humas)	1.594.782.500	1.486.845.464	93,23
17	Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara	%	90	83	92,22	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1.861.500.000	1.667.423.000	89,57
		Indeks kabupaten peduli HAM	%	80	90	112,50	Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM	820.000.000	567.147.000	69,16
18	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)	%	90	81	90,00	Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	967.457.000	767.382.500	79,57

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
19	Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi	%	100	100	100	Peningkatan Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa (Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan)	523.513.000	385.890.557	73,71
20	Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah	%	94	94	100	Kerjasama dengan Mass Media: 1. Kominfo 2. Humas	1.051.000.000 1.594.782.500	1.027.080.383 1.486.845.464	97,72 93,23
		Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah	%	94	98	102,1	Pengembangan data/informasi/statistik Daerah	200.000.000	189.082.246	94,54
		Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah	%	94	95	101,06	Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	580.000.000	486.580.950	83,89
							Penanganan pengaduan masyarakat	100.000.000	76.599.931	96,60
							Peningkatan Persandian Daerah	30.000.000	27.333.150	91,11
21	Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan bidang perekonomian	Tingkat Inflasi YoY	%	3,5 (± 1)	2,64	74,26	-	-	-	-

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
22	Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat	Persentase keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra	%	95	95	100	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	23.336.000	21.419.000	91,79
							Peningkatan Keagamaan	5.271.895.000	3.960.071.610	95,12
							Peningkatan penanggulangan narkoba, penyakit menular seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS	46.717.000	40.711.550	87,15
23	Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	12,3	12,3	100	Peningkatan Ketahanan Pangan:			
							1. Pertanian	5.906.317.000	5.478.945.178	93
							2. Setda Perekonomian	175.000.000	139.018.220	79,44
							Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat	1.436.150.000	1.324.289.220	92
							Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	150.000.000	136.519.825	93
							Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1.450.000.000	1.378.854.900	95
							Peningkatan Kesejahteraan Petani	1.948.555.000	1.415.634.050	73
Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	2.750.000.000	2.211.041.967	80							

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	105.000.000	103.965.000	99
							Pengembangan perikanan tangkap	250.000.000	170.602.475	68
							Pengembangan budidaya perikanan	1.743.576.000	1.618.978.252	93
							Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	455.000.000	391.253.650	86
							Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	245.000.000	210.012.121	86
							Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	560.000.000	535.864.572	96
24	Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	Persentase desa yang memiliki LEM, LED dan Posyantek	%	35	35	100	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	848.214.582	738.537.184	87,07
							Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	394.500.000	319.845.051	81,08
25	Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata	%	25	31,96	127,84	Pengembangan Kemitraan	485.000.000	456.914.900	94,21
							Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2.028.438.000	1.967.859.910	97,01

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							Pengembangan Destinasi Pariwisata	4.639.496.000	4.477.541.255	96,51
26	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	19,12	19,98	104,49	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	605.000.000	537.597.940	88,86
		Persentase UMKM yang memiliki daya saing	%	11	11,45	104,09	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	1.240.000.000	1.038.995.234	83,79
							Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	430.000.000	399.524.387	92,91
							Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1.075.000.000	788.143.137	73,32
							Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	5.853.542.000	5.039.185.575	86,09
							Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	410.000.000	394.312.760	96,17
27	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	Persentase inovasi yang diterapkan	%	81,82	105	128,33	Program penelitian dan pengembangan	1.000.000.000	886.073.933	89

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
28	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	Rasio daya serap tenaga kerja (PMDN/PMA):					Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi: 1. DPM dan PTSP 2. Setda Perekonomian	648.950.000 391.000.000	528.840.840 294.877.132	81,49 75,42
		PMDN	%	438	19	4,34				
		PMA	%	294	139	47,28				
		Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA):					Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	430.655.000	338.578.625	78,62
		PMDN	%	2,2	733	33318,18				
		PMA	%	2,5	272	10880,00				
29	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor Ketenagakerjaan	Rasio penduduk yang bekerja	%	1,05	1,00	95,24	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	355.000.000	318.335.000	89,67
		Angka partisipasi angkatan kerja	%	69,00	81	117,39	Peningkatan Kesempatan Kerja	327.000.000	263.282.920	80,51
30	Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	87,90	71,48	81,32	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	197.000.000	178.475.154	90,60
31	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	34,98	36,82	105,26	Pengembangan industri kecil dan Menengah: 1. Disperinaker 2. Setda Perekonomian	912.000.000 705.000.000	834.655.750 599.516.027	91,52 85,04

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Persentase IKM yang memiliki daya saing	%	6,50	7,6	116,92	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	225.000.000	189.619.500	84,28
32	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	Indeks layanan infrastruktur	Indeks	36,44	60,87	167,04	Pembangunan Jalan dan Jembatan	111.278.649.000	85.874.407.215	77,17
							Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan	8.500.000.000	7.004.431.627	82,41
							Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	17.610.212.000	13.956.511.465	79,25
							Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	8.000.000.000	6.350.334.682	79,38
							Penataan Trotoar jalan	2.000.000.000	1.504.006.950	75,20
33	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan	Tingkat	47,41	45,87	96,75	Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	-		
							Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1.833.840.000	1.526.234.269	83,23
							Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	4.724.595.000	4.512.942.202	95,52

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	1.082.000.000	763.849.378	70,60
34	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Indeks kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Indeks	45,27	53,76	118,78	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	49.800.000.000	44.570.037.708	89,50
							Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah:			
							1. DPU	1.000.000.000	931.040.000	93,10
							2. Perwaskim	10.181.694.000	9.246.483.832	90,81
							Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	1.638.282.500	1.458.668.310	89,04
							Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung	55.770.600.000	47.489.111.754	85,15
							Pengembangan Perumahan	131.250.000	70.718.563	53,88
							Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong	1.600.000.000	1.231.058.505	76,94
							Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	3.000.000.000	2.315.094.162	77,17
							Pembangunan infrastruktur pedesaan/perkotaan	150.000.000	91.934.750	61,29
35	Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai	Ketaatan terhadap RTRW	%	79,20	78,98	86,09	Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang:			

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	dengan konsep tata ruang						1. DPU 2. Perwaskim	150.000.000 550.000.000	148.304.925 59.502.081	98,87 10,82
							Perencanaan Tata Riuang	1.600.000.000	1.254.562.852	78,41
							Pemanfaatan Ruang	400.000.000	250.002.607	62,50
36	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	Indeks	35,57	28,46	80,01	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1.590.755.000	572.306.724	35,98
		Indeks kualitas udara	Indeks	79,57	82,29	103,42	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	790.000.000	652.358.450	82,58
		Indeks tutupan vegetasi (lahan)	Indeks	53,71	83,3	155,09	Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH	545.000.000	386.813.599	70,97
							Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			
							1. DPU	18.450.000.000	15.170.958.809	82,23
							2. DLHK	7.516.329.000	5.965.271.645	79,36
							Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	110.000.000	87.905.150	79,91
							Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH):			
							1. DPU	10.900.000.000	9.068.900.239	83,20
							2. DLHK	1.422.400.000	1.367.840.447	96,16
37	Terwujudnya pengurangan kerentanan risiko bencana	Kelas Indeks kapasitas bencana	Kelas Indeks	Sedang (119)	Sedang (123,20)	103,53	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1.172.580.000	867.798.540	74,01
							Penanganan Darurat Bencana:			
							1. Satpol PP	1.083.950.000	1.035.882.793	95,57

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							2. BPBD	2.176.444.440	1.509.853.553	69,37
							Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	16.043.150.000	13.775.569.007	85,87
							Peningkatan Penanganan Bencana Kebakaran	155.000.000	148.668.400	95,92
38	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	Indeks demokrasi	Indeks	77	72,17	93,7	Peningkatan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan:			
							1. Kesbangpol	425.000.000	358.091.500	84,26
							2. Satpol PP	160.000.000	140.865.600	88,04
							Peningkatan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik	425.000.000	379.895.000	89,39
39	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	Klpk	66	58	87,89	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	884.995.242	840.595.105	94,98
							Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga	901.000.000	874.958.316	97,11
							Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	848.214.582	738.537.184	87,07

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
40	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Indeks ketertiban masyarakat	Indeks	97	96	98,97	Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan Keamanan	1.513.050.000	1.506.108.466	99,54
							Peningkatan Pemberantasan penyakit Masyarakat (Pekat)	265.000.000	260.167.100	98,18
							Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan: 1. Kesbangpol 2. Satpol PP	1.390.000.000 775.000.000	1.104.226.450 701.655.000	79,44 90,54
							Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindakkriminal	270.000.000	219.361.700	81,25
							Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan	100.000.000	90.611.050	90,61
41	Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	60,23	60,25	100,03	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	110.000.000	62.610.570	56,92
		Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kelas	Nidya (750)	Madya (650)	86,67	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	107.500.000	100.495.850	93,48
							Peningkatan peran serta anak dan kesetaraan gender dalam	297.500.000	282.329.090	94,69

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							pembangunan			
							Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	180.000.000	170.441.070	94,69
42	Meningkanya kualitas layanan perhubungan	Indeks kepuasan layanan perhubungan	Indeks	80,05	79,02	98,71	Peningkatan Pelayanan Angkutan	862.500.000	813.458.422	94,31
43	Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Indeks	80	78,37	97,96	Peningkatan Pengembangan Pelayanan Perizinan	0	0	0
44	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Indeks	Sdh (92,70)	Sdh (91,77)	95,06	Penataan Administrasi Kependudukan	3.998.689.000	3.685.734.035	92,17
45	Pengembangan ketransmigrasian	Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi	%	41	5,2	12,68	Pengembangan Wilayah Transmigrasi	218.000.000	177.255.850	81,31
							Transmigrasi Lokal	32.000.000	26.592.750	83,10
Jumlah Anggaran Prioritas I (<i>program untuk membiayai visi dan misi Bupati</i>)								878.973.204.765,00	751.695.655.912,00	85,52
Jumlah Belanja Langsung								1.012.713.701.277,52	857.012.047.026,68	84,63
Jumlah Belanja Tidak Langsung								2.079.221.807.921,00	1.816.935.736.757	87,39
Jumlah Total Belanja Daerah								3.091.935.509.198,52	2.673.947.783.783,69	86,48

3.4 Efektifitas Sumber Daya

Untuk mengukur sejauh mana tingkat efektifitas sumber daya pelaksanaan pembangunan Daerah, dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2019, diantaranya mencakup: 1) tingkat efisiensi penggunaan anggaran, dan 2) efektifitas penggunaan sumber daya aparatur. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.4.1. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 ditetapkan 45 (empat puluh lima) sasaran strategis dengan 67 (enam puluh tujuh) Indikator Kinerja Sasaran yang terdiri dari: 61 (enam puluh satu) indikator yang sifatnya progresif, dan 6 (enam) indikator yang sifatnya represif.

Selanjutnya untuk mengimplementasikan RPJMD, telah ditetapkan pula Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten tahun 2019, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan APBD Kabupaten Klaten Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 169 program dengan 2.918 kegiatan. Realisasi fisik tercapai 95% dari target rencana. Dukungan dana untuk melaksanakan pembangunan dianggarkan sebanyak Rp.1.012.713.701.277,52 dan terserap sebesar Rp.857.012.047.026,68 (atau 84,63%). Secara rinci tingkat pencapaian efektifitas sumber daya antara sasaran dan realisasi keuangan dapat disajikan pada Tabel 3.103.

Tabel 3.103.
Tingkat Efisiensi Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(10)	(11)
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	Persentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	196,56	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	88,81	Efisien
		Persentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	100,11	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	84,24	Efisien
					Pendidikan Non Formal:	88,62	Efisien
					Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	94,66	Efisien
					Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	81,40	Efisien
					Manajemen Pelayanan Pendidikan	86,79	Efisien
					Pengelolaan bantuan Operasional Sekolah (BOS): 1. SD 2. SMP	94,29 94,00	Efisien
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan	Kasus kematian Ibu	Kasus	75,00	Upaya Kesehatan Masyarakat: 1. Dinas 2. Puskesmas	66,75 87,90	Efisien
		Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	99,01	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	62,89	Efisien
		Angka kematian Balita	per 1000 KH	96,36	Obat dan Perbekalan Kesehatan	93,34	Efisien
		Prevalensi gizi buruk (BB/U)	%	98,61	Pengawasan Obat dan Makanan	97,13	Efisien

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(10)	(11)
					Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	98,82	Efisien
					Perbaikan Gizi Masyarakat	97,56	Efisien
					Pengembangan Lingkungan Sehat	62,89	Efisien
					Standarisasi Pelayanan Kesehatan:		Efisien
					1. Dinas	38,51	
					2. Puskesmas	84,30	
					Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	87,86	Efisien
					Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan prasarana sarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya	85,43	Efisien
					Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/Rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/Rumah sakit mata	96,24	Efisien
					Peningkatan pelayanan kesehatan Lansia	80,79	Efisien
3	Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakititan oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit.	Usia Harapan Hidup	Tahun	100,59	Pelayanan Kesehatan	85,01	Efisien
					Manajemen, informasi dan regulasi kesehatan	78,50	Efisien
4	Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda	%	130	Peningkatan Peran Serta kepemudaan	93,21	Efisien
		Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga	%	440	Pembinaan dan Pemasyaratan Olahraga	95,13	Efisien
					Peningkatan upaya penumbuhan	87,31	Efisien

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(10)	(11)
					kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda		
					Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba:	82,10	Efisien
					Pembinaan pemuda dan olahraga: 1. Disbudparpora 2. Kesra	89,00	Efisien
5	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya	Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	143	Pengembangan Nilai Budaya	86,83	Efisien
					Pengelolaan Keragaman Budaya	95,09	Efisien
					Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya (Humas)	99,91	Efisien
6	Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	Persentase kenaikan kunjungan masyarakat	%	443,8	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	85,92	Efisien
7	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	133,33	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	76,41	Efisien
8	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan	%	100	Perencanaan Pembangunan Daerah	83,05	Efisien
					Perencanaan Pembangunan Ekonomi	91,25	Efisien
					Perencanaan Sosial dan Budaya	85,45	Efisien

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(10)	(11)
					Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	98,41	Efisien
					Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah	85,10	Efisien
9	Meningkatnya tata kelola arsip SKPD	Persentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku	%	251,2	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	84,66	Efisien
					Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	86,42	Efisien
					Perbaikan sistem administrasi kearsipan	68,99	Efisien
10	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Level Maturitas SPIP	Tingkat	100	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	80,74	Efisien
		Level Kapabilitas APIP	Tingkat	100	Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	90,19	Efisien
					Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	84,32	Efisien
					Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	75,03	Efisien
11	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Angka	107,33	Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 1. Pemerintahan 2. Umum	44,96 80,63	Efisien
					Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	95,24	Efisien

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(10)	(11)
					Pengembangan Wilayah Perbatasan	87,48	Efisien
					Peningkatan koordinasi pembinaan fasilitasi administrasi Tata Kelola Kecamatan	87,98	Efisien
					Pengembangan komunikasi, informasi dengan Mass Media (Humas)	95,01	Efisien
					Peningkatan Koordinasi Pembinaan Fasilitasi Pemberdayaan Desa/Kelurahan di kecamatan	93,23	Efisien
					Peningkatan Koordinasi Pembinaan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	93,47	Efisien
					Peningkatan Koordinasi Pembinaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	93,67	Efisien
					Kerjasama informasi dengan Mass Media (Humas)	93,23	Efisien
12	Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	Indeks kabupaten peduli HAM	%	112,50	Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM	69,16	Efisien
13	Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi	%	100	Peningkatan Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa (Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan)	73,71	Efisien
14	Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah	%	100	Kerjasama dengan Mass Media: 1. Kominfo 2. Humas	97,72 93,23	Efisien
		Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah	%	102,1	Pengembangan data/informasi/statistik Daerah	94,54	Efisien

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(10)	(11)
		Persentase pelayanan keprotokolanan kegiatan kepala daerah	%	101,06	Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	83,89	Efisien
					Penanganan pengaduan masyarakat	96,60	Efisien
					Peningkatan Persandian Daerah	91,11	Efisien
15	Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat	Persentase keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra	%	100	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	91,79	Efisien
					Peningkatan Keagamaan	95,12	Efisien
					Peningkatan penanggulangan narkoba, penyakit menular seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS	87,15	Efisien
16	Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	100	Peningkatan Ketahanan Pangan: 1. Pertanian 2. Setda Perekonomian	93 79,44	Efisien
					Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat	92	Efisien
					Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	93	Efisien
					Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	95	Efisien
					Peningkatan Kesejahteraan Petani	73	Efisien
					Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	80	Efisien
					Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	99	Efisien
					Pengembangan perikanan tangkap	68	Efisien
					Pengembangan budidaya perikanan	93	Efisien
					Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	86	Efisien

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(10)	(11)
					Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	86	Efisien
					Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	96	Efisien
17	Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	Persentase desa yang memiliki LEM, LED dan Posyantek	%	100	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	87,07	Efisien
					Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	81,08	Efisien
18	Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata	%	190	Pengembangan Kemitraan	94,21	Efisien
					Pengembangan Pemasaran Pariwisata	97,01	Efisien
					Pengembangan Destinasi Pariwisata	96,51	Efisien
19	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	104,49	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	88,86	Efisien
		Persentase UMKM yang memiliki daya saing	%	104,09	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	83,79	Efisien
					Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	92,91	Efisien
					Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	73,32	Efisien
					Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	86,09	Efisien
					Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	96,17	Efisien

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(10)	(11)
20	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	Persentase inovasi yang diterapkan	%	128,33	Program penelitian dan pengembangan	89	Efisien
21	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA):			Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	78,62	Efisien
		PMDN	%	33318,18			
		PMA	%	10880,00			
22	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor Ketenagakerjaan	Angka partisipasi angkatan kerja	%	117,39	Peningkatan Kesempatan Kerja	80,51	Efisien
23	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	105,26	Pengembangan industri kecil dan Menengah: 1. Disperinaker 2. Setda Perekonomian	91,52 85,04	Efisien
		Persentase IKM yang memiliki daya saing	%	116,92	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	84,28	Efisien
24	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	Indeks layanan infrastruktur	Indeks	167,04	Pembangunan Jalan dan Jembatan	77,17	Efisien
					Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan	82,41	Efisien
					Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	79,25	Efisien
					Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	79,38	Efisien
					Penataan Trotoar jalan	75,20	Efisien

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(10)	(11)
25	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Indeks kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Indeks	118,78	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	89,50	Efisien
					Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah: 1. DPU 2. Perwaskim	93,10 90,81	Efisien
					Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	89,04	Efisien
					Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung	85,15	Efisien
					Pengembangan Perumahan	53,88	Efisien
					Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong	76,94	Efisien
					Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	77,17	Efisien
					Pembangunan infrastruktur pedesaan/perkotaan	61,29	Efisien
26	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas udara	Indeks	103,42	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	82,58	Efisien
		Indeks tutupan vegetasi (lahan)	Indeks	155,09	Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH	70,97	Efisien
					Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1. DPU 2. DLHK	82,23 79,36	Efisien
					Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	79,91	Efisien
					Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH): 1. DPU	83,20	Efisien

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(10)	(11)
					2. DLHK	96,16	
27	Terwujudnya pengurangan kerentanan risiko bencana	Kelas Indeks kapasitas bencana	Kelas Indeks	103,53	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	74,01	Efisien
					Penanganan Darurat Bencana: 1. Satpol PP 2. BPBD	95,57 69,37	Efisien
					Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	85,87	Efisien
					Peningkatan Penanganan Bencana Kebakaran	95,92	Efisien
28	Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	100,03	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	56,92	Efisien

Catatan: *) *Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian, Angka Kesakitan dan Kecacatan sifatnya refresif, sehingga capaian indikator kinerja ≤ 100 tingkat capaian targetnya tercapai.*

Berdasarkan Tabel 3.103. sebagaimana tersebut di atas, jumlah sasaran strategis yang memiliki tingkat efisiensi tinggi sebanyak 28 sasaran (atau 62,22% dari sebanyak 45 sasaran strategis), sedangkan jumlah indikator sasaran strategis yang memiliki tingkat efisiensi tinggi sebanyak 41 indikator sasaran (atau 61,19% dari sebanyak 67 indikator sasaran strategis). Berdasarkan Tabel 3.102 dan Tabel 3.103, sebagaimana tersebut di atas jumlah rencana anggaran untuk membiayai Anggaran Prioritas I (*program untuk membiayai visi dan misi Bupati*) sebanyak Rp.878.973.204.765,00 dan terealisasi sebanyak Rp.751.695.655.912,00 serta memperhatikan indikator sasaran strategis yang memiliki tingkat efisiensi tinggi sebanyak 41 indikator sasaran (atau 61,19% dari sebanyak 67 indikator sasaran) dengan anggaran sebanyak Rp.669.058,465.685,00 maka dapat disimpulkan tingkat efisien penggunaan anggaran sebanyak Rp.82.637.190.287,00 {dengan perhitungan: *Realisasi anggaran sebanyak Rp.751.695.655.912,00 dikurangi Rp.669.058,465.685,00 dari anggaran sebanyak 41 indikator sasaran (atau 61,19% dari sebanyak 67 indikator sasaran) yang mencapai efisiensi*}.

3.4.2. Efektifitas Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran, serta untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektifitas sumber daya aparatur disajikan terlebih dahulu jumlah Sumber Daya Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2019 disajikan pada Tabel 3.104.

Tabel 3.104
Jumlah Sumber Daya Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2019

Bagian / Dinas / Kantor		Jenis Kelamin		Tingkat Pendidikan					
		Laki-laki	Perempuan	SD	SMP	SMA	Diploma	Sarjana /Strata I	Pasca Sarjana / Strata 2 & 3
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01.	Sekretariat Daerah	7	0	0	0	0	0	1	6
	<i>Bagian Pemerintahan Setda</i>	5	3	1	0	0	1	3	3
	<i>Bagian Hukum Setda</i>	7	7	0	0	4	1	7	2
	<i>Bagian Perekonomian Setda</i>	5	4	0	0	2	0	2	5
	<i>Bagian Pembangunan Setda</i>	4	4	0	0	1	1	3	3
	<i>Bagian Kesra Setda</i>	8	7	0	1	5	1	5	3
	<i>Bagian Organisasi Setda</i>	9	6	0	0	1	2	9	3
	<i>Bagian Humas Setda</i>	12	10	0	0	5	5	11	1
	<i>Bagian Umum Setda</i>	31	21	1	5	29	3	12	2
	<i>Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda</i>	10	3	0	0	2	0	6	5
02	Sekretariat DPRD	35	6	3	5	12	1	11	9
03	Inspektorat	30	21	0	0	3	3	22	23
04	Dinas Pendidikan	2139	3993	4	89	462	617	4758	202
05	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	28	19	1	0	18	3	15	10
06	Dinas Kesehatan	329	1204	4	17	236	834	408	34
07	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	23	24	1	0	8	8	24	6
08	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	16	20	0	0	10	6	7	13
09	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21	14	0	0	12	3	10	10

Bagian / Dinas / Kantor		Jenis Kelamin		Tingkat Pendidikan					
		Laki-laki	Perempuan	SD	SMP	SMA	Diploma	Sarjana /Strata I	Pasca Sarjana / Strata 2 & 3
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16	8	0	0	3	2	14	5
11	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	123	35	6	15	95	8	23	11
12	Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja	18	12	1	0	6	2	15	6
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	18	6	1	0	4	1	10	8
14	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	32	11	2	2	14	1	17	7
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	282	25	32	58	145	15	45	12
16	Dinas Perhubungan	41	14	2	4	21	11	9	8
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	11	10	0	1	1	0	11	8
18	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	145	96	0	6	55	21	138	21
19	Dinas Arsip dan Perpustakaan	13	14	0	1	8	5	7	6
20	Satuan Polisi Pamong Praja	55	6	1	6	33	2	15	4
21	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	29	11	0	0	6	8	14	12
22	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	63	41	0	4	31	6	45	18
23	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	24	15	0	0	5	2	16	16
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	21	8	0	0	9	3	11	6
25	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	10	4	0	0	5	0	6	3
26	Kecamatan Klaten Tengah	27	21	0	1	17	3	20	7
27	Kecamatan Klaten Selatan	6	14	0	0	6	2	9	3
28	Kecamatan Klaten Utara	14	17	0	0	12	3	9	7
29	Kecamatan Kebonarum	8	9	0	0	8	2	3	4
30	Kecamatan Wedi	14	10	0	0	12	1	7	4
31	Kecamatan Kalikotes	11	9	0	1	7	1	9	2
32	Kecamatan Ngawen	7	10	0	0	8	1	7	1
33	Kecamatan Jogonalan	9	10	0	0	8	1	7	3
34	Kecamatan Karangnongko	17	7	0	2	13	2	5	2
35	Kecamatan Manisrenggo	17	6	0	0	13	2	7	1
36	Kecamatan Gantiwarno	10	7	0	0	10	0	4	3

Bagian / Dinas / Kantor		Jenis Kelamin		Tingkat Pendidikan					
		Laki-laki	Perempuan	SD	SMP	SMA	Diploma	Sarjana /Strata I	Pasca Sarjana / Strata 2 & 3
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Kecamatan Prambanan	12	11	0	0	9	1	11	2
38	Kecamatan Kemalang	17	4	0	0	12	2	4	3
39	Kecamatan Jatinom	16	7	0	0	14	1	5	3
40	Kecamatan Karanganom	12	10	1	0	12	1	5	3
41	Kecamatan Tulung	20	5	0	1	17	1	5	1
42	Kecamatan Polanharjo	14	3	0	1	8	2	6	0
43	Kecamatan Pedan	15	4	1	0	8	2	3	5
44	Kecamatan Karangdowo	12	6	0	0	12	3	1	2
45	Kecamatan Trucuk	11	6	0	0	9	0	5	3
46	Kecamatan Bayat	16	5	0	2	10	1	7	1
47	Kecamatan Delanggu	12	11	0	0	13	1	7	2
48	Kecamatan Wonosari	19	8	0	1	15	0	9	2
49	Kecamatan Cawas	12	11	1	0	12	1	6	3
50	Kecamatan Ceper	12	5	0	2	4	0	10	1
51	Kecamatan Juwiring	12	7	0	1	11	0	3	4
Jumlah		3.972	5.905	63	226	1.531	1.610	5.884	563

Sumber: BKPD, dan Setda Bagian Organisasi, 2020 (Diolah)

Keterangan:

	Efektif	70,18%
	Ada yang efektif, dan ada yang tidak efektif	17,54%
	Tidak efektif	12,28%

Penilaian tingkat efektifitas sumber data dihitung berdasarkan capaian indikator sasaran yang mempunyai tingkat efisiensi sebagaimana Tabel 3.102. dan Tabel 3.103.



BAB IV PENUTUP



4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2019 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja.

Sehingga LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2019 secara umum merupakan gambaran penyelenggaraan pemerintah berazaskan: tanggung jawab negara, kesinambungan dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik dan otonomi daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 45 (empat puluh lima) sasaran strategis dengan 67 (enam puluh tujuh) Indikator Kinerja Sasaran terdiri dari: 60 (enam puluh) indikator yang sifatnya progresif, dan 7 (tujuh) indikator yang sifatnya regresif. Dari masing-masing indikator diperoleh hasil:

A. Indikator Progresif, dengan hasil:

- Sebanyak 49 (empat puluh sembilan) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 81,67% dengan Kriteria *Sangat Tinggi*;
- Sebanyak 5 (lima) atau sebanyak 8,33% dengan Kriteria *Tinggi*;
- Sebanyak 2 (dua) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 3,33% dengan kriteria *Sedang*;
- Sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 1,67% dengan Kriteria *Rendah*; dan
- Sebanyak 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 5,00% dengan Kriteria *Sangat Rendah*.

B. Indikator Regresif, dengan hasil semua indikator regresif dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja *Tercapai (Berhasil Menekan)*, atau interval nilai realisasi kinerja skala $\leq 99,99$ sebanyak 7 (tujuh) indikator.

Selanjutnya untuk mengimplementasikan RPJMD, telah ditetapkan pula Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan

APBD Kabupaten Klaten Tahun 2019 tercatat sebanyak 169 program dengan 2.918 kegiatan. Realisasi fisik tercapai 95% dari target rencana. Dukungan dana untuk melaksanakan pembangunan dianggarkan sebanyak Rp.1.012.713.701.277,52 dan terserap sebesar Rp.857.012.047.026,68 (atau 84,63%).

Evaluasi atas data pendukung beserta berbagai permasalahan yang muncul dari setiap sasaran strategis perlu diantisipasi. Sebagaimana hasil menunjukkan berdasar tingkat efisiensi sumber daya diperoleh hasil: Jumlah sasaran strategis yang memiliki tingkat efisiensi tinggi sebanyak 28 sasaran (atau 62,22% dari sebanyak 45 sasaran strategis), sedangkan jumlah indikator sasaran strategis yang memiliki tingkat efisiensi tinggi sebanyak 39 sasaran (atau 58,21% dari sebanyak 67 sasaran strategis). Sedangkan tingkat efektifitas sumber daya: yang efektif sebanyak 70,18%, kurang efektif sebanyak 17,54% dan yang tidak efektif sebanyak 12,28%.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

- a. Memedomani ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 hasil LKjIP tahun berkenaan wajib dipakai sebagai *bahan penyusunan atau evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program* terkait dengan: (a) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-Perangkat Daerah), dan (b) Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- b. Berpedoman pada pencapaian kinerja sasaran tahun 2019, kiranya yang menjadi penekanan dan perhatian pada tahun 2020, diantaranya:
 - a) Mengupayakan penurunan angka kemiskinan sesuai target RPJMD;
 - b) Mendorong pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,43% dan menekan inflansi pada angka 3,5 (± 1)%
 - c) Meningkatkan Angka Partisipasi Angkatan Kerja pada angka 69% dan mengupayakan tingkat PDRB Per Kapita sebesar Rp.24.720.000,-
 - d) Meningkatkan Rasio daya serap tenaga kerja PMDN/PMA, seiring dengan meningkatnya nilai investasi.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu, maupun yang berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2019 diucapkan terima kasih, dengan harapan semoga mampu mewujudkan **Visi Daerah : Maju, Mandiri dan Berdaya Saing**.



Klaten, 17 Maret 2020

BUPATI KLATEN,

SRI MULYANI

LAMPIRAN I

Penghargaan dan Piagam Penghargaan Kabupaten Klaten Tahun 2019

1. Piagam Penghargaan Kepala Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten sebagai Juara Harapan I pada Lomba Ketangkasan Pemadam Kebakaran Dalam Rangka Peringatan HUT 100 Th Pemadam Kebakaran Indonesia dan 8 Th BPBD Kabupaten Bantul.
2. Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2019 oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Klaten Kategori MADYA.
3. Sertifikat Wahana Tata Nugraha Menteri Perhubungan Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah atas Keberhasilan Mengikuti Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Sistem Transportasi Perkotaan Tahun 2019.
4. Tanda Penghargaan STBM Berkelanjutan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai Kabupaten STOP BABS / ODF Dalam Upaya Memobilisasi Masyarakat untuk Terlibat Dalam Penyediaan Layanan Sanitasi Berkelanjutan Berbasis Masyarakat Tahun 2019.
5. Piagam Penghargaan Badan/Kantor/Sebutan lainnya Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten Oleh Kementerian Dalam Negeri Menyampaikan Apresiasi, Penghargaan dan Terima Kasih Atas Partisipasi Aktif dan Kerjasamanya dalam Mendukung Sukses Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019.
6. Piagam Penghargaan Gubernur Jawa Tengah kepada Pos Pelayanan Terpadu Siwi Asih III Desa Gatak Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten sebagai Pemenang III Kategori Kabupaten Pelaksana Terbaik Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.
7. Piagam Penghargaan Gubernur Jawa Tengah Kepada Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Tibayan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten sebagai Pemenang III Kategori Kabupaten Pelaksana Terbaik Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga,

Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

8. Piagam Penghargaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten sebagai Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori “Baik Dengan Catatan” Tahun 2019.
9. Piagam Penghargaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten sebagai Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori “Baik” Tahun 2019.
10. Piagam Penghargaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten sebagai Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori “Baik Dengan Catatan” Tahun 2019.
11. Piagam Penghargaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten sebagai Juara II Lomba Penghematan Energi dan Air Kategori Instansi Pemerintah Tahun 2019.
12. Piagam Penghargaan Gubernur Jawa Tengah Kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten sebagai TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
13. Penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kepada Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia pada Tahun 2018.
14. Penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten sebagai Anggota Jaringan Dokumen Tasi dan Informasi yang telah terintegrasi dengan Sistem JDIHN.



PIAGAM PENGHARGAAN

Lomba Ketangkasan Pemadam Kebakaran

No : 002/00986/BPBD



Diberikan Kepada

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KLATEN

Sebagai

JUARA HARAPAN I

Pada Lomba Ketangkasan Pemadam Kebakaran
Dalam Rangka Peringatan
HUT 100 Th Pemadam Kebakaran Indonesia
dan 8 Th BPBD Kabupaten Bantul

Bantul, Maret 2019
Sekretaris Daerah/
Ex-Officio Kepala BPBD Kab. Bantul



Drs. Helmi Jamharis, M.M.





PENGHARGAAN
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2019

Kepada

Pemerintah Kabupaten Klaten

Kategori

MADYA

Makassar, 23 Juli 2019

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Yohana Yembise'.

Yohana Yembise



MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT WAHANA TATA NUGRAHA

Diberikan Penghargaan Kepada :

*Pemerintah Kabupaten Klaten
Provinsi Jawa Tengah*

Atas

Keberhasilan Mengikuti Penilaian Kinerja Penyelenggaraan
Sistem Transportasi Perkotaan Tahun 2019

Jakarta, 15 September 2019

MENTERI PERHUBUNGAN

BUDI KARYA SUMADI



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

menganugerahkan

**TANDA PENGHARGAAN
STBM BERKELANJUTAN**

kepada :

KABUPATEN KLATEN

sebagai

KABUPATEN STOP BABS/ODF

Dalam upaya memobilisasi masyarakat untuk terlibat
dalam penyediaan layanan sanitasi berkelanjutan
berbasis masyarakat tahun 2019

(Kep.Menkes RI Nomor : KP.04.04/Menkes/559/2019)

Jakarta, 20 September 2019



MENTERI KESEHATAN,

Nila Farid Moeloek
NILA FARID MOELOEK



Piagam Penghargaan

Diberikan Kepada :

**BADAN/KANTOR/SEBUTAN LAINNYA
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KLATEN**

Kementerian Dalam Negeri

Menyampaikan Apresiasi, Penghargaan, Dan Terima Kasih Atas Partisipasi Aktif Dan Kerjasamanya
Dalam Mendukung Sukses Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019

Jakarta, 16 Oktober 2019

Menteri Dalam Negeri

TJAHJO KUMOLO



GUBERNUR JAWA TENGAH

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 912.5/02/2019

Dasar : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 912.5/61 tanggal 11 November 2019 Tentang Pemenang Lomba Pelaksana Terbaik Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Kesehatan, Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat, Lingkungan Bersih Dan Sehat, Dan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

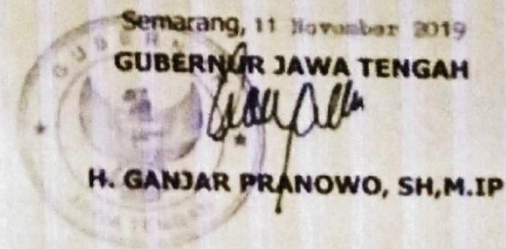
Diberikan Kepada :

**POS PELAYANAN TERPADU SIWI ASIH III
DESA GATAK, KECAMATAN DELANGGU, KABUPATEN KLATEN**

Sebagai :

**PEMENANG III
Kategori Kabupaten**

**Pelaksana Terbaik Pos Pelayanan Terpadu
Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019**





GUBERNUR JAWA TENGAH

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 002.5/0025579

Dasar : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 002.5/61 Tahun 2019 tanggal 11 November 2019 tentang Pemenang Lomba Pelaksana Terbaik Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.
Diberikan kepada:

**Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Tibayan,
Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten**

sebagai :

PEMENANG III

Kategori Kabupaten

**Pelaksana Terbaik Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga,
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kesehatan
Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019**



11 November 2019



GUBERNUR JAWA TENGAH

H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP.



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Piagam Penghargaan

Diberikan Kepada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Klaten

Sebagai

Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik
Kategori "Baik dengan Catatan"
Tahun 2019

Jakarta, 20 Oktober 2019
Deputi Bidang Pelayanan Publik

Prof. Dr. Dian Natalisa, MBA.



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

Piagam Penghargaan

Diberikan Kepada

**Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras
Kabupaten Klaten**

Sebagai

**Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik
Kategori "Baik"
Tahun 2019**

Jakarta, 5 November 2019
Deputi Bidang Pelayanan Publik

Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA.



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Piagam Penghargaan

Diberikan Kepada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Klaten

Sebagai

**Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik
Kategori "Baik dengan Catatan"
Tahun 2019**

Jakarta, 5 November 2019
Deputi Bidang Pelayanan Publik

Prof. Dr. Dian Natalisa, MBA.

4TH
SDM UNGGUL
INDONESIA MAJU



Jateng
JAWA TENGAH



JUARA 2
LOMBA PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR
KATEGORI INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019

DINAS LINGKUNGAN HIDUPI
KABUPATEN KLATEN

Rp. 7.500.000,-

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH





GUBERNUR JAWA TENGAH

FLAGAM PENGHARGAAN

Nomor: 062.5/1002940/2019

Dasar: Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 060/53 Tahun 2019 Tentang TOP 10, TOP 20 dan TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Diberikan Kepada:

**Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Klaten**

Dengan Inovasi:

SAPA sms layanan kepegawaian

Sebagai:

TOP 40

INOVASI PELAYANAN PUBLIK PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019



H. GARJAN PRASOWO, S.H., M.P.



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

MENGANUGERAHKAN

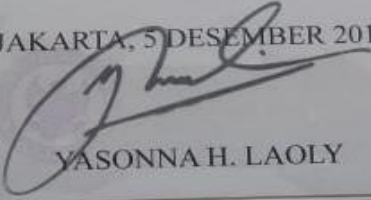
PENGHARGAAN

KEPADA

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

SEBAGAI KABUPATEN PEDULI HAK ASASI MANUSIA PADA TAHUN 2018

JAKARTA, 5 DESEMBER 2019


YASONNA H. LAOLY



**Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia**

memberikan

PENGHARGAAN

kepada

**Bagian Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten**

sebagai

**Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
yang telah terintegrasi dengan sistem JDIHN (jdihn.go.id)**

dalam rangka pelaksanaan
Peraturan Presiden RI No. 33 Tahun 2012
tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)

Jakarta, 9 September 2019

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**



YASONNA H. LAOLY



**Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia**

memberikan

PENGHARGAAN

kepada

**Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Klaten**

sebagai

**Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi
yang telah terintegrasi dengan Sistem JDIHN**

dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden RI No. 33 Tahun 2012
tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**


YASONNA H. LAOLY

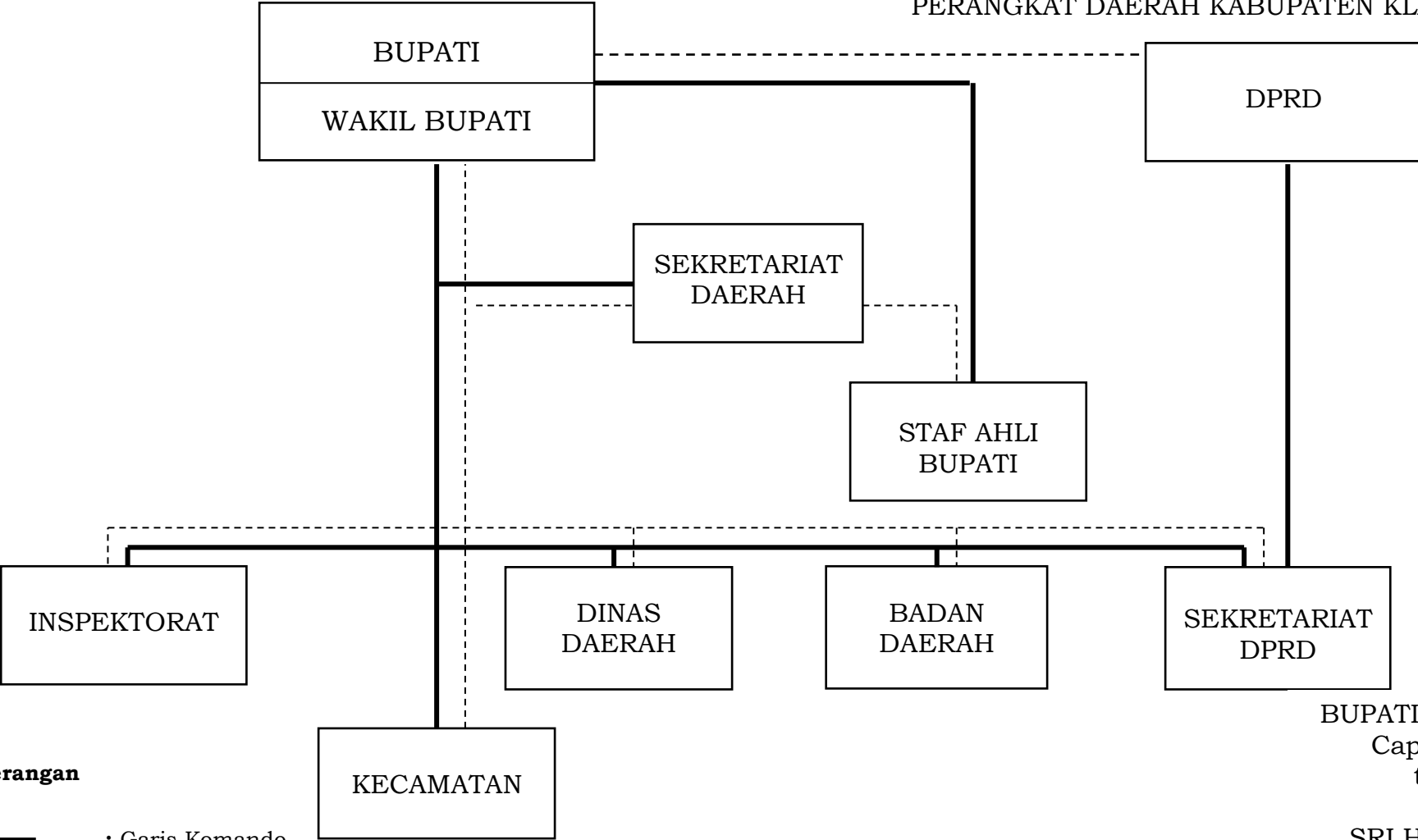


LAMPIRAN I

Struktur Pemerintah Kabupaten Klaten

BAGAN ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN KLATEN

PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN



Keterangan
 — : Garis Komando
 - - - : Garis Koordinasi

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI HARTINI